

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 15 No 2 Juni 2016
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan 89 - 100
Unemployment and Its Influence on Poverty Level
Ratih Probosiwi
2. Kontribusi Ketahanan Keluarga terhadap Sikap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba 101 - 114
The Contribution of Family Resilience towards Youth Attitude in Drug Abuses
Ikawati
3. Sikap Pembauran Sosial dan Prasangka Etnis dalam Masyarakat Multikultural 115 - 130
Social Attitude Integration and Ethnic Prejudice in Multicultural Society
Trilaksmi Udiati dan Sunit Agus Tri Cahyono
4. Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan 131 - 144
House Rehabilitation as Poverty Elimination Form
Eny Hikmawati dan Tri Gutomo
5. Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir 145 - 164
Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster
Sri Yuni Murti Widayanti
6. Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan 165 - 178
Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls
Tateki Yoga Tursilarini
7. Analisis terhadap Hasil Penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Disabel 179 - 190
Analysis on Exploration Result of Ten Disabled-Friendly Cities
Gunanto Surjono
8. Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik 191 - 202
Fulfilling Physical Disable Base Right
Elly Kuntjorowati

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS), volume 15 nomor 2 dibuka dengan tulisan Ratih Probosiwi tentang Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan, yang menemukan bahwa tidak ada sumbangan dari faktor pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sajian disambung dengan Ikawati dalam kontribusi ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba, yang menemukan bahwa kepedulian keluarga, adanya kasih sayang dan pengawasan, berpengaruh terhadap kecenderungan remaja menyalahgunakan narkoba. Sunit Agus Tricahyono dan Trilaksmi Udiati menulis tentang sikap pembauran sosial dan prasangka etnis keluarga dalam masyarakat multikultur, yang intinya dalam daerah yang dihuni masyarakat multikultur seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, komunikasi intens masing-masing masyarakat merupakan syarat untuk kelancaran pembauran. Tri Gutomo dan Eny Hikmawati yang mengkaji tentang bedah rumah sebagai salah satu bentuk pengentasan kemiskinan, yang menemukan bahwa program bedah rumah secara gotong royong di Kabupaten Kulonprogo, dapat menjadi salah satu kenyamanan hidup yang lebih sejahtera. Sri Yuni Murti Widayanti menulis tentang sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam banjir, disusul oleh Tateki Yoga Tursilarini dalam inses: kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak perempuan. Edisi Juni ditutup dengan dua tulisan yang hampir bermiripan, Gunanto Surjono dalam Analisis terhadap hasil penjelajahan sepuluh kota ramah disabel yang menemukan bahwa penyikapan pemerintah dan masyarakat terhadap eksistensi disabel dalam berbagai aspek amatan masih rendah, seperti juga hasil pengkajian dan Elly Koentjorowati di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentang pemenuhan hak dasar disabel yang memang secara umum belum mencapai tingkat seperti yang diharapkan.

Dari Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Ratih Probosiwi (B2P3KS)

Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan

Unemployment and Its Influence on Poverty Level

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 89 - 100

Poverty is one of main issue in many discussions in developing countries, including Indonesia. In some previous studies showed that unemployment has significant impact on poverty levels. The case study took the city of Yogyakarta as the region with the highest unemployment rate in Yogyakarta Special Territory (YST) but has the lowest levels of poverty. This paper attempts to reveal the influence of unemployment and poverty in Yogyakarta Municipalities via data in the last ten years. Through statistical analysis, the relationship between unemployment and poverty are tested and be seen to do. The results showed that in fact unemployment and poverty showed no significant effect with significant value 0.159 (greater than α 0.05) with directional value. This shows that there is no direct link between unemployment and poverty in the city of Yogyakarta, which can be caused by educated unemployment who are looking for work and are not included in the group of the poor.

Keywords: unemployment ; poverty; effect

Kemiskinan menjadi bahasan utama di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Dalam beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Studi kasus mengambil Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun memiliki tingkat kemiskinan paling rendah. Tulisan ini mencoba mengungkapkan pengaruh tingkat pengangguran dengan kemiskinan di Kota Yogyakarta melalui data sepuluh tahun terakhir. Melalui analisis statistik, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan diuji dan dilihat hubungannya. Hasil menunjukkan bahwa ternyata pengangguran dan kemiskinan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0.159 (lebih besar dari α 0.05) dengan nilai searah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang dapat disebabkan penganggur merupakan kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan dan tidak termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Kata kunci: pengangguran; kemiskinan; pengaruh

Ikawati (B2P3KS)

Kontribusi Ketahanan Keluarga terhadap Sikap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba

The Contribution of Family Resilience towards Youth Attitude in Drug Abuses

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 101 - 114

This research to know the enfluence of family resilience towards youth attitude in drug abuses. This researh is correlational study. Research location ditermined purposively in Yogyakarta Municipality. Research subjects ditermined purposively as many 30 respondents. Research object was family resilience and youth attitude in drug abuses. Data were gathered through questionnaire distribution, interview, and observation. Data were analyzed through regressive technique. The result showed that there was coorelative regresively between independent variable in family resilience physically (X1), psychically (X2), socially (X3), and spiritually (X4), towards dependent variable (Y) in youth attitude in drug abuses. It be concluded that family resilience variable physically, psychically, socially, and spiritually enfluence or contribute youth attitude in drug abuses. Based on that result, recommended that the Ministry of Social Affairs, through Directorate of Drug Abuses Victims, put foward a program to empower family resources, like physical (economic, education, knowledge), psychical, social, and spiritual resilience.

Keywords: family resilience; youth; drug abuses

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Tipe penelitian adalah penelitian korelasional (*correlational studies*). Penentuan lokasi secara *purposive* di kota Yogyakarta. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, sebanyak 30 responden. Obyek penelitian adalah ketahanan keluarga dan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan, ada hubungan secara regresi antara variabel bebas (x) dalam hal ini ketahanan keluarga baik secara fisik (x1), psikis (x2), sosial (x3) dan spritual (x4), terhadap variabel taut (y), dalam hal ini sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Kesimpulan, variabel ketahanan keluarga baik secara fisik, psikis, sosial dan spritual mempengaruhi atau menyumbangkan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba, untuk mengedepankan program ke arah penguatan sumber daya keluarga, seperti ketahanan secara fisik (pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pengetahuan/wawasan), psikis, sosial dan spritual.

Kata Kunci: ketahanan keluarga; remaja; penyalahgunaan narkoba

Trilaksmi Udiati¹ dan Sunit Agus Tri Cahyono² (B2P3KS)

Sikap Pembauran Sosial dan Prasangka Etnis dalam Masyarakat Multikultural

Social Attitude Integration and Ethnic Prejudice in Multicultural Society

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 115 - 130

This research to describe social attitude integration and ethnic prejudice in multicultural society. The research took

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap pembauran sosial dan prasangka etnis dalam masyarakat multikultural.

place in Yogyakarta Municipality and Sleman Regency, Yogyakarta Special Province, based on consideration that the location resided by families of multicultures (heterogen), prone to interethnic conflict and brawl. Data gathering technique were interview and observation, respondents were 50 people of each location, whole was 100 respondents. Data analysis was qualitative-descriptive technique. The research showed that 79 percent respondents having social integration attitude, 21 percent having ethnic prejudice. The prevention against widening and deteriorating conflict, flaring up, social brawl are to enhance understanding, consiousness, and benefiting pluralism or various cultures as potensial resources, strength for joint progress. Social dialogue facility and communal activity by government and community need to be done. To the Directorate of Social Protection for Social Disaster Victims (PSKBS), General Directorate of Social Protection and Assurance, The Ministry of Social Affairs, need to hold a program on enhancing communal capacity (family) through socialization, education, and training of social harmony management (social integration) to prevent social conflict, set up interethnic community forum that can fill pluralism value so that families and community resilience can be realized.

Keywords: *social integration; community; multicultures*

Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri atas keluarga-keluarga multikultural (heterogen), berpotensi rawan konflik antaretnis dan kerusuhan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, dengan responden di setiap lokasi 50 orang, sehingga semua 100 responden. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa 79 persen responden memiliki sikap pembauran sosial dan 21 persen memiliki prasangka etnis. Pencegahan meluasnya atau berkembangnya prasangka etnis yang memicu konflik, gejolak, kerusuhan sosial adalah peningkatan pemahaman, penyadaran dan memanfaatkan kemajemukan atau keanekaragaman budaya sebagai sumber potensi, kekuatan untuk kemajuan bersama. Fasilitasi dialog sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan pembauran sosial oleh pemerintah bersama masyarakat perlu dilakukan. Kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial perlu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas masyarakat (keluarga) melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan manajemen keserasian sosial (pembauran sosial) yang diharapkan dapat mencegah dan mengeliminir konflik sosial, pembentukan forum komunitas antaretnis yang dapat menanamkan nilai keberagaman, sehingga terwujud ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *pembauran sosial; masyarakat; multikultural.*

Eny Hikmawati dan Tri Gutomo (B2P3KS)
Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan
House Rehabilitation as Poverty Elimination Form
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 131 - 146

This research was done to know Kulonprogo Regency government policy on poverty elimination through houses rehabilitation (PBR). The research used qualitative-descriptive approach, using

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogodalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah (PBR). Penelitian ini menggunakan

informants (program commitees, poor families beneficiaries, public figures), observation as data resources. Data was analysed through qualitative-descriptive technique. The research showed that houses rehabilitation program implemented in Kulonprogo Regency proved successfully on eliminating poverty, especially in providing houses for poor families. Houses rehabilitation implemented transparantly through submitting proposal, verification agreement for program beneficiary. The success of home rehabilitation could not be rid off regent commitment on his decree to cut 2.5 percent of each moslem local civil servant salary to fund the rehabilitation (managed by Bazda), and whole and active participation and synergy support from related agencies, subdistrict leaders, entreprenur, funding institution, and community mutual cooperation as social capital. It recommended that home rehabilitation can be disseminated in other regions commited on poverty elimination.

Keywords: Poverty elimination; home rehabilitation; social capital

pendekatan diskriptif kualitatif, menggunakan informan panitia program, keluarga miskin penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi bebas. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Pelaksanaan PBR dilaksanakan secara transparan melalui pengajuan proposal, verifikasi dan penetapan bagi penerima program. Keberhasilan PBR ini tidak lepas dari adanya komitmen dari bupati yang menetapkan setiap PNS di Kabupaten Kulonprogo yang beragama Islam dipungut 2.5 persen dari gaji bulanan (dikelola Bazda), adanya dukungan partisipasi dan sinergitas secara aktif seluruh instansi terkait, Camat, pengusaha, lembaga keuangan, dan gotong-royong masyarakat sebagai modal sosial. Keberhasilan PBR ini dapat dikembangkan di daerah lain yang berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan; PBR; Modal Sosial

Sri Yuni Murti Widayanti (B2P3KS)

Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir
Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 145 - 164

The research on social attitude and community participation on the floods prevention aimed to describe community's knowledge. Social attitude, and participation toward floods victims prevention and also the implementation of post-floods social rehabilitation. The research was conducted in the district of North Lampung, Lampung Province. Data were collected from various sources, such as documentation, in-depth interview, and observation. Through descriptive qualitative analysis, the results revealed that community's knowledge and understanding about floods were quite high,

Penelitian tentang sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir di Provinsi Lampung bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan dampak terjadinya bencana banjir, serta diketahuinya sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir. Lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana alam banjir sudah tinggi, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh petugas instansi sosial atau

so the floods prevention which was conducted by the social agencies and related social institutions were more effective in reducing the impact of floods. People tried to find social rehabilitation assistance for the flood victims. The proposed recommendation was there should be mitigation efforts towards floods prevention through regional regulation which regulates spacial building, implementation and enforcement of legislation on safety land use, as well as the development of the village disaster alert program that will be used to coordinating participation of community, improving the system of agriculture and socialization to the society about the causes and effects of floods,

Keywords: *social attitude; community's participation; floods prevention.*

yang terkait, lebih efektif mengurangi dampak akibat bencana alam banjir. Masyarakat berusaha mencari bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana banjir, rekomendasi yang diusulkan adalah perlu kiranya upaya mitigasi terhadap bencana dengan melakukan pencegahan terhadap bencana banjir dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penggunaan tata ruang bangunan. Penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, penggunaan tanah dan pengembangan program kampung siaga bencana sebagai wadah partisipasi masyarakat. Memperbaiki sistem pertanian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat banjir.

Kata kunci: *sikap sosial; partisipasi masyarakat; penanggulangan banjir*

Tateki Yoga Tursilarini (B2P3KS)

Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan

Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 165 - 178

Incest is a kind of sexual violence conduct that mostly done by close person or related blood, the victims are girls in domestic areas. Children that should get protection and love to grow normally, but they are suffering from violence in domestic areas. This research is to describe the kinds of violence against children and girls, patriarchal value and culture that contribute to incest, and its settlement. Data resources from local social institution, non-government organization, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC of Bengkulu Social Agency, victims, and victim families. Data were gathered through interview, documentary analysis, and analysed through qualitative-descriptive technique based on incest cases. The result showed that violences against the girls were reflections of patriarchal value system, men domination over girls, and the strong against the weak or subordinated. The settlement were, not all the victims, family and community, having courage to report incest conduct, so the settlement needs serious

Inses merupakan bentuk tindak kekerasan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau bertalian darah, korbannya adalah anak perempuan di ranah domestik. Beberapa kasus inses dapat dijumpai di setiap kota atau kabupaten di Indonesia, menunjukkan tren meningkat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi anak mengalami kekerasan di ranah domestik. Kajian ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, nilai dan budaya patriarkhis memberi andil terhadap inses dan bentuk penyelesaiannya. Sumber data berasal dari instansi sosial di daerah, lembaga swadaya masyarakat, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC Dinsos Provinsi Bengkulu dan korban, keluarga korban. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, telaah dokumen, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menampilkan kasus-kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap

effort and mindset change to reconstruct community having gender equality. Incest handling needs grand cultural and structural strategy, to combine eight ministres overseeing the case, through law enforcement or any policy and community culture to set up synergy on handling incest, that needs comprehensive and continuity handling, on the perpetrator, family, and incest victims.

Keywords: *incest; violence; patriarchy*

perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriarkhis, dominasi laki-laki terhadap perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai. Penyelesaian inses, belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak inses, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan perubahan mindset sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Penanganan inses diperlukan adanya *grand* strategi struktural dan kultural, memadukan delapan kementerian yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan perangkat hukum atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses, karena membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan, menyangkut pelaku, keluarga, korban inses.

Kata Kunci: *Inses; kekerasan; patriarkhis*

Gunanto Surjono (B2P3KS)

Analisis terhadap Hasil Penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Disabel

Analysis on Exploration Result of Ten Disabled-Friendly Cities

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 179 - 190

The research meant to descibe an analysis on exploration of disabled friendly cities held in ten cities, namely Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Disabled friendly cities seen form four indicators. First, public space that deliberately built to support disabled existence. Second, building model (offices and shops) to go in and out for disabled. Third, local government regulation to protect and realize disabled friendly city policy. Fourth, disabled power that can be absorbed in government and privat offices. Fifth, the existence of disabled forum as representative of disabled existence. Data were gathered, first through documentary analysis related to local regulation on disabled. Second, through interview with local official agencies and disabled representative, third through direct observation inthe cities

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan analisis hasil penjelajahan kota-kota ramah disabel di 10 kota di Indonesia, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Kota ramah disabel dianalisis dari indikator, pertama ruang publik yang sudah disengaja bangun untuk mendukung eksistensi disabel, kedua pola bangunan (perkantoran dan pertokoan) untuk memudahkan keluar-masuk disabel, ketiga penyerapan disabel ke dalam pekerjaan (pemerintah dan swasta), keempat ketersediaan perangkat peraturan daerah guna melindungi dan merealisasikan kota ramah disabel, kelima adanya forum komunikasi sebagai wakil kelembagaan disabel. Pengumpulan data dilakukan, pertama dengan telaah dokumen yang berkaitan dengan ketersediaan peraturan daerah, kedua wawancara dengan aparat pemerintah daerah

observed in supporting disabled existence. It was found that 50 percent of cities observed having local regulation that support disabled existence, 70 percent having no friendly public space, and only very low percentage all 10 cities observed have not absorbed yet disabled power in government and privat offices. It can be concluded that in all 10 cities observed, the existence of disabled have not been supported adequately, and there was no associative relation among having local regulation on disabled existence, disabled friendly, and job absorbtion for disabled in government and privat offices. It is recommended that The Ministry of Social Affairs should promote the understanding and needs of disabled to local government and people, so they can create positive policy for disabled existence.

Keywords: *disabled; existence; friendly city*

dan tokoh forum komunikasi disabel (apabila ada), ketiga dengan pengamatan langsung kondisi kota sasaran amatan dalam mendukung eksistensi (mobilitas) disabel. Hasil penelitian menemukan, bahwa baru 50 persen sepuluh kota amatan yang memiliki perangkat peraturan daerah dalam mendukung eksistensi disabel, 70 persen belum memiliki (memiliki tetapi “direnggut” oleh kegiatan usaha masyarakat) infrastruktur ruang publik ramah disabel, dan baru sebagian kecil eksistensi disabel usia produktif yang terserap dalam dunia pekerjaan (pemerintah dan swasta). Kesimpulan, di 10 kota yang diobservasi eksistensi disabel belum terdukung dan terserap dalam dunia pekerjaan sehingga mereka mampu mengurangi ketergantungan pada orang lain, tidak ada hubungan asosiatif antara kepemilikan peraturan daerah, ramah disabel, dan kemampuan kota amatan dalam menyerap tenaga kerja disabel. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial dapat melakukan program promosi tentang pemahaman dan kebutuhan eksistensi kehidupan disabel di daerah-daerah, sehingga pemerintah daerah di kota-kota besar dapat meluangkan kebijakan positif dalam mendukung eksistensi disabel mengurangi ketergantungan hidup pada orang lain.

Kata kunci: *eksistensi; disabel; kota ramah*

Elly Kuntjorowati (B2P3KS)

Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik

Fulfilling Physical Disable Base Right

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016, hal 191 - 202

The numbre of physical disabled coming from poor families are not fulfilled their basic rights, such as food, clothing, education, health and employment, showed an unqualified families in meeting their basic needs and attention to the disabled. The research aimed to find out the level of fulfillment of physical disabled basic needs by their family. The type of research was descriptive, data collected through interviews and observation techniques. The research location in Ogan Komering Ilir, South Sumatra Province. Data

Banyaknya disabel dari keluarga miskin yang tidak terpenuhi hak dasarnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, memperlihatkan kurang mampunya keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan perhatian terhadap disabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan dasar disabel oleh keluarga. Jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Komering

were analyzed through descriptive technique. The research showed that lack of social support from family, especially parents, to meet basic needs of disables such as nutrition, education, health and employment. It recommended that is required to hold empowerment for of disable's parents to improve their knowledge and ability to care and gain access to existing social services programs.

Keywords: fulfillment; basic rights; physical disabled

Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis data menggunakan deskriptif berdasarkan data yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya dukungan sosial dari keluarga terutama orangtua terhadap kebutuhan dasar disabel seperti gizi, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Rekomendasi diperlukan agar diadakan pemberdayaan bagi orangtua disabel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guna perawatan dan pengasuhan anak disabel, juga agar bisa mengakses program-program pelayanan sosial yang ada.

Kata Kunci: pemenuhan hak dasar; disabel fisik

Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan

Unemployment and Its Influence on Poverty Level

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Kementerian Sosial Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Telpon: 0274-377265. HP. +6281804870872.
Email: <ratihprobo@yahoo.com>. Diterima 23 Maret, diperbaiki 14 April, disetujui 25 Mei 2016.

Abstract

Poverty is one of main issue in many discussions in developing countries, including Indonesia. In some previous studies showed that unemployment has significant impact on poverty levels. The case study took the city of Yogyakarta as the region with the highest unemployment rate in Yogyakarta Special Territory (YST) but has the lowest levels of poverty. This paper attempts to reveal the influence of unemployment and poverty in Yogyakarta Municipalities via data in the last ten years. Through statistical analysis, the relationship between unemployment and poverty are tested and be seen to do. The results showed that in fact unemployment and poverty showed no significant effect with significant value 0.159 (greater than α 0.05) with directional value. This shows that there is no direct link between unemployment and poverty in the city of Yogyakarta, which can be caused by educated unemployment who are looking for work and are not included in the group of the poor.

Keywords: *unemployment ; poverty; effect*

Abstrak

Kemiskinan menjadi bahasan utama di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Dalam beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Studi kasus mengambil Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun memiliki tingkat kemiskinan paling rendah. Tulisan ini mencoba mengungkapkan pengaruh tingkat pengangguran dengan kemiskinan di Kota Yogyakarta melalui data sepuluh tahun terakhir. Melalui analisis statistik, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan diuji dan dilihat hubungannya. Hasil menunjukkan bahwa ternyata pengangguran dan kemiskinan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0.159 (lebih besar dari α 0.05) dengan nilai searah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang dapat disebabkan penganggur merupakan kelompok terdidik yang sedang mencari pekerjaan dan tidak termasuk dalam kelompok masyarakat miskin.

Kata kunci: *pengangguran; kemiskinan; pengaruh*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang penanganannya terus diupayakan oleh pemerintah hingga kini. Krusialnya penanganan kemiskinan menjadikan masalah ini masuk dalam misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dalam nawacita atau sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 pun secara implisit tercantum yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kementerian Sosial seba-

gai salah satu elemen pemerintah yang berperan dalam penanganan kemiskinan juga menjadikan peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kompleksnya masalah kemiskinan dari sebab dan akibatnya menyebabkan banyak ilmuwan yang tertarik untuk mempelajarinya. Cutler dan Katz (1991) menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan, hasilnya bahwa pengangguran memberi pengaruh yang signifikan dan

positif terhadap tingkat kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan pengangguran di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta cukup bagus. Namun, tingkat kesejahteraan dan rendahnya ketimpangan pendapatan tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan di Kota Yogyakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa masih terdapat empat kantong kemiskinan, yaitu kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Mergansan, dan Gedongtengen. Dari data BPS 2013 Yogyakarta menjadi kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan persentase 15,03 persen, sementara itu BPS DIY mencatat pada Februari 2015 tingkat pengangguran bebas di Yogyakarta mencapai 4,07 persen. Laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2012 mengalami kenaikan dari 3.88 persen menjadi 4.31 persen. Laju inflasi menggambarkan kenaikan atau penurunan harga pada sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi secara umum berdampak pada kegiatan ekonomi daerah yang kemudian dapat berdampak pada pengangguran. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan suatu pemikiran bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila angka pengangguran masih tinggi.

Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang terse-

dia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama di negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Beberapa penelitian menyebutkan banyak faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan termasuk tingkat pengangguran. Tulisan ini mencoba membuktikan hubungan atau pengaruh antara kemiskinan dengan pengangguran di Kota Yogyakarta sebagai kota dengan tingkat pengangguran paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada eksploratif, menggambarkan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta termasuk hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut sehingga juga merupakan kegiatan eksplanatori. Informasi aktual secara rinci digali untuk melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, menggambarkan kondisi yang berlaku, dan membuat perbandingan secara sistematis (Singarimbun & Effendi, 2008). Kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta digambarkan secara sistematis dan aktual. Menganalisis faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhinya terutama tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta dikaji lebih dalam untuk menjelaskan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui revid literatur terkait data kemiskinan dan pengangguran BPS, demografi, peraturan perundangan, penelitian terdahulu, dan laporan teknis program penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta dari Bappeda ataupun dinas terkait. Data dianalisis dengan teknik regresi menggunakan program SPSS 17.0. Teknik analisis regresi menunjukkan tingkat pengaruh dan hubungan antara kedua variabel yang diteliti.

C. Tingkat Pengangguran Kota Yogyakarta

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat.

Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti mengalami penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006)

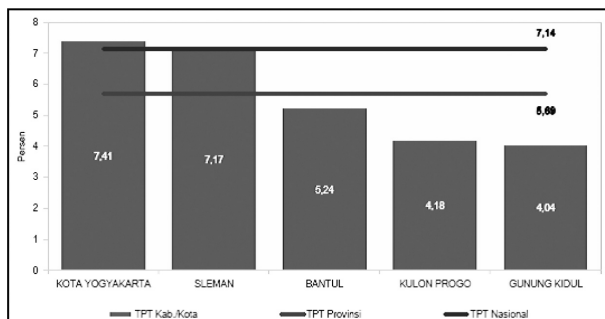
Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut Sukirno (2008 : 13) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Searah dengan pendapat diatas, Murni (2006: 197) mengungkapkan, pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerjadan sedang mencari pekerjaan.

Menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, pengertian penganggur adalah sebagai berikut. Mereka yang terdaftar pada departemen atau dinas yang mengurus tentang daftar pencari kerja atau mereka sebagai pemegang kartu pencari kerja; mereka yang sedang berusaha aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, seperti selama seminggu, sebulan, atau satuan waktu lainnya; mereka yang sedang bekerja, tetapi masih atau sambil mencari pekerjaan selain yang sedang dikerjakan; mereka yang sedang tidak mempunyai pekerjaan karena sesuatu hal dan aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu; dan mereka yang tidak bekerja, tidak aktif mencari pekerjaan, tetapi bersedia bekerja apabila diberi pekerjaan.

Kesamaan konsep yang digunakan mengenai batasan penganggur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik, bahwa penganggur merupakan bagian dari angkatan kerja yang kegiatan utamanya aktif mencari pekerjaan dengan jumlah jam, minimal satu jam per minggu. Menurut Sukirno (2000,) pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari tujuh jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Berdasarkan hasil Saker-nas tahun 2010, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 5.69 persen (dibawah TPTnasional yaitu 7.14 persen) dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kota Yogyakarta 7.41 persen, di atas TPT nasional 7.14 persen dan TPT Provinsi 5.69 persen seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/
Kota di DIY



(Sumber: BPS, 2011)

Hingga Agustus 2015, jumlah pekerja setengah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 22.84 persen. Sekitar 4.2 persen dari setengah pengangguran tergolong setengah pengangguran “terpaksa”, karena masih mau bekerja apabila ada tawaran pekerjaan lain dan selebihnya 18.64 persen tergolong setengah pengangguran “sukarela”, karena tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Dari setengah pengangguran menurut wilayah yang terbanyak ada di wilayah perdesaan, 28.23 persen sedangkan wilayah perkotaan 20.35 persen. Setengah pengangguran menurut jenis kelamin yang terbanyak adalah perempuan sebesar 30.96 persen, sedangkan laki-laki 16.81 persen. Hasil Sakernas Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2015 menunjukkan, TPT daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. TPT Daerah Istimewa Yogyakarta di perkotaan pada Agustus 2015 4.55 persen, yang mengalami peningkatan 0.55

poin jika dibandingkan pada Agustus 2014 4,00 persen karena dipengaruhi oleh beragamnya lapangan pekerjaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian sehingga angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan pindah atau mondok di perkotaan sehingga pengangguran lebih nampak kuantitatifnya.

Penduduk Kota Yogyakarta yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja pada tahun 2011, ada 214,342 orang, 202,393 (94 persen) berstatus bekerja dan sisanya 11,949 (6 persen) orang merupakan pengangguran. Pada tahun 2012 persentase jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat, dari 212,330 orang dalam kelompok angkatan kerja, 95 persen diantaranya bekerja dan hanya 5 persen yang menganggur, dan di tahun 2013 menurun dari 208,438 orang, dalam kelompok angkatan kerja, 93 persen atau 194,736 orang diantaranya bekerja dengan menyisakan 7 persen pengangguran.

Dalam beberapa tahun mendatang, angkatan kerja di Kota Yogyakarta sangat mungkin bertambah mengingat golongan penduduk usia sekolah yang cukup besar sebagai bagian dari kelompok bukan angkatan kerja yang terus meningkat selama tahun 2013. Pada tahun 2013, dari 116,884 orang yang tidak termasuk dalam Angkatan Kerja, 43,164 (37 persen) merupakan pelajar di Kota Yogyakarta.

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tabel 2 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2012. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan

Tabel 1
Komposisi Kelompok Bukan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta

Kegiatan Utama	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	213,686	48.59	166,406	38.91	187,205	46.31
Bekerja	195,445	44.4	149,189	34.89	171,108	42.33
Penganggur	18,241	4.14	17,217	4.02	16,097	3.98
Bukan Angkatan Kerja	143,713	32.65	162,331	37.96	321,742	75.59
Sekolah	70,937	16.11	97,917	22.89	90,711	22.44
Mengurus Rumah	44,456	10.1	38,571	9.02	56,921	14.08
Lainnya	28,229	6.43	25,843	6.04	13,239	3.28

Sumber: Data Pembangunan Sektoral (Sibangtor) 2014

Tabel 2
Rasio Penduduk Bekerja di Kota Yogyakarta

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk yang Bekerja	218,911	208,223	179,882	195,445	149,189
Angkatan Kerja	256,164	239,445	201,535	213,686	166,406
Rasio Penduduk yang Bekerja	0.85	0.86	0.89	0.91	0.90

Sumber: Profil Kesonakertrans Kota Yogyakarta, 2008 - 2012

jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan menganggur (Muchtolifah, 2010). Pada tahun 2008 tercatat 85 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan 15 persen masih mencari kerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2009 sebanyak 86 persen, meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2012, dan pada tahun 2012 sebanyak 90 persen dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh pekerjaan, sedangkan 10 persennya masih mencari kerja.

Berdasarkan data BPS atas hasil Sakernas tahun 2011-2014, jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk laki-laki, 31,450 penganggur, sedangkan perempuan 22,474 penganggur. Hal ini dimungkinkan karena kewajiban untuk mencari pekerjaan dibebankan kepada kaum laki-laki, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga dan tidak tercatat sebagai pengangguran. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan, bahwa kelompok umur 25 sampai dengan 29 tahun menunjukkan tingkat pengangguran paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, yaitu 3,828 jiwa, disusul kelompok umur 20 sampai dengan 24 sebesar 2,810. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang mulai mencari pekerjaan baru setelah lulus dari perguruan tinggi. Kelompok *fresh graduated* biasanya menunjukkan semangat untuk mencari

pekerjaan dan dalam proses tunggu, mereka sementara menjadi pengangguran. Hal ini juga ditunjukkan dalam survei angkatan kerja nasional bulan Agustus 2014, bahwa di Kota Yogyakarta, 11,651 penganggur masuk dalam kategori mencari pekerjaan, 2,687 penganggur sedang mempersiapkan usaha, dan 317 penganggur merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

D. Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta

Pembangunan merupakan suatu proses yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut, kesejahteraan menyangkut aspek penurunan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan yang diterima penduduk. Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan penduduk, artinya bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk, dan sebaliknya. Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia mengacu pada pendekatan pengeluaran yang didasarkan pada kebutuhan dasar minimum (BPS, 2014).

Supriatna (1997) menyatakan, bahwa kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikategorikan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan, lima karakteristik penduduk miskin, meliputi: tidak memiliki faktor produksi sendiri; tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; tingkat pendidikan pada umumnya rendah; banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas; dan berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1993), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Kotze (dalam Hikmat, 2004) menyatakan, bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar terkadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang apabila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasi ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa DIY merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa, 16.83 persen, disusul Jawa Tengah 16.56 persen. Di DIY sendiri, Kabupaten Kulonprogo

menempati urutan paling miskin dengan tingkat kemiskinan 23.15 persen, sedangkan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, 9.75 persen dibandingkan tingkat kemiskinan provinsi dan tingkat kemiskinan nasional 13.33 persen.

Pola perkembangan jumlah penduduk miskin di DIY selama periode 2000-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin tercatat 1,035.8 ribu, dengan persentase 33.39 persen. Tingginya level kemiskinan dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi 1997-1998 yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap, jumlah penduduk miskin dan persentasenya semakin menurun hingga mencapai jumlah 544.9 ribu jiwa atau 15.0 persen pada bulan Maret 2014. Namun berdasarkan data series, jumlah penduduk miskin juga terpantau beberapa mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2005, dan 2006 sebagai akibat dari fenomena kenaikan harga dan inflasi yang cukup tinggi, terutama terkait dengan kenaikan harga BBM. Tingginya laju inflasi berimplikasi pada kenaikan garis kemiskinan, sehingga secara otomatis jumlah penduduk miskin juga meningkat. Sejak tahun 2008, persentase penduduk miskin menunjukkan pola yang semakin menurun hingga tahun 2014. Indikator kemiskinan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2009 sampai dengan 2010 berdasarkan hasil Susenas bulan Juli 2010 ditunjukkan pada tabel 3.

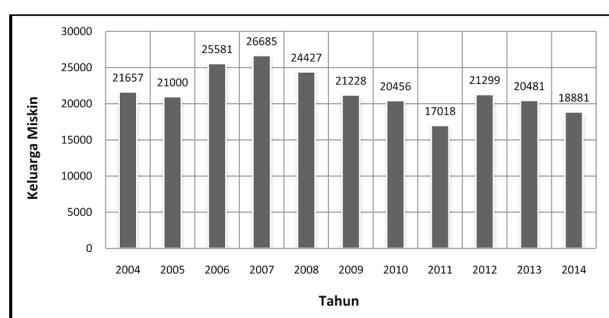
Tabel 3
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kulonprogo	205,585	225,059	24.65	23.15	89,914	89,976
Bantul	224,373	245,626	17.64	16.09	158,522	146,489
Gunungkidul	186,232	203,873	24.44	22.05	163,667	148,683
Sleman	226,256	247,688	11.45	10.70	117,534	116,634
Yogyakarta	265,168	290,286	10.05	9.75	45,287	37,823
DIY	211,978	224,258	17.23	16.83	244,967	259,357
Nasional	200,262	211,726	14.15	13.33	32,530,000	31,023,390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011.

Berdasarkan penyebarannya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan terlihat lebih menonjol dibandingkan daerah perkotaan. Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Secara umum, perbedaan tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kuantitas infrastruktur terutama pendidikan, kesehatan, perekonomian, dari sisi ketersediaan maupun kemudahan dalam mengakses menjadi penyebab perbedaan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebesar 81,334 Jiwa atau 9.44 persen. Pada tahun 2009 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mencatat angka penduduk miskin Kota Yogyakarta 68,998 jiwa, jumlah tersebut terbagi menjadi 32,997 jiwa tergolong hampir miskin, 34,152 jiwa tergolong miskin dan 1,849 jiwa tergolong fakir miskin. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin turun menjadi 65,371 jiwa dan tahun 2011 kembali turun 54,530, tahun 2012 naik menjadi 68,188 jiwa, sedangkan tahun 2013 angka kemiskinan turun kembali menjadi 64,699 jiwa, tahun 2014 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 60,230 jiwa.

Gambar 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Yogyakarta



Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2014.

Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 9.38 persen. kemiskinan ini menurun dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan menandakan meningkatnya kualitas

hidup masyarakat Kota Yogyakarta, untuk tahun 2015 angka kemiskinan 8.6 persen. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 60,230 jiwa, dengan rincian fakir miskin (FM) 101 jiwa, miskin (M) 18,892 jiwa, dan rentan miskin (RM) 41,147 jiwa (Gambar 2). Total jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 adalah 18,881 kepala keluarga (KK), dengan rincian FM 31 KK, M sebanyak 5,983 KK, dan RM sebanyak 12,867 KK. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Tegalrejo, 6,344 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat di Kecamatan Pakualaman, 1,693 jiwa (Bappeda Kota Yogyakarta, 2014).

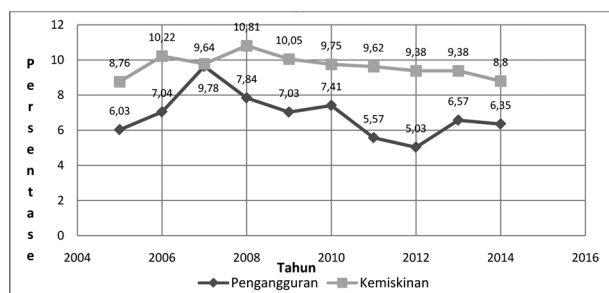
E. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan Kota Yogyakarta

Pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, melainkan juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000). Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1997). Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Tambunan dalam Yacoub, 2012). Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan (Yacoub, 2012).

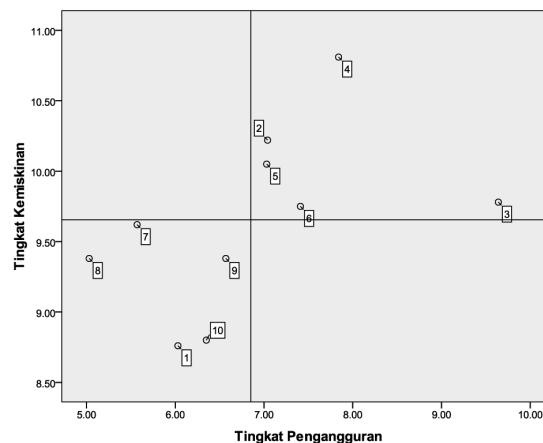
Data yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara tingkat pengangguran dan kemiskinan Kota Yogyakarta diolah dari persentase tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan pada rentang waktu 2005 sampai dengan 2014 oleh BPS yang disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3
Perbandingan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta



Gambar 3 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran, kecuali pada tahun 2007 dengan selisih 0.14 persen. Tingkat kemiskinan terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2008, sedangkan tingkat pengangguran terbuka lebih fluktuatif bahkan menunjukkan kenaikan pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10.81 persen dan terendah pada tahun 2005, 8.76 persen. Tingkat pengangguran terbuka mengalami titik tertinggi pada tahun 2007 dan terendah pada tahun 2012 sebesar 5.03 persen. Selanjutnya, kedua variabel tersebut dianalisis dalam kuadran untuk mengidentifikasi hubungan antara keduanya yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4
Kuadran Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan



Grafik kuadran pada Gambar 4 menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel tingkat kemiskinan dan pengangguran. Adanya pergerakan ke arah kanan yang positif. Keadaan titik sumbu koordinat yang mewakili hubungan tingkat kemiskinan dan pengangguran berada di kuadran yang menunjukkan hubungan positif-positif pada kuadran I, dan negatif-negatif pada kuadran IV yaitu apabila tingkat pengangguran meningkat berpotensi untuk menaikkan tingkat kemiskinan. Secara statistik, hasil estimasi pengaruh tingkat pengangguran (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kota Yogyakarta ternyata menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.159 lebih besar daripada taraf signifikansi yang ditentukan sebesar (α) 0.05. Koefisien *betha* sebesar 0.481 yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan searah, yaitu bahwa tingkat pengangguran berpotensi menaikkan tingkat kemiskinan walaupun dengan nilai pengaruh yang tidak signifikan.

Hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tidak selalu sejalan juga ditemukan di negara Amerika Serikat misalnya, menurut penelitian kemiskinan tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pengangguran tetapi sangat dipengaruhi cara pengukuran

kemiskinan. Di sisi lain, hubungan yang tidak kuat tersebut juga disebabkan oleh lemahnya pengukuran tingkat pengangguran seperti yang diungkapkan dalam penelitian Son dan Kakwani (2006) dengan data Brazil. Berdasarkan penelitian tersebut, dengan memodifikasi tingkat pengangguran konvensional menghasilkan korelasi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan, tetapi berdasarkan ukuran pengangguran konvensional, hubungan pengangguran dan kemiskinan tidak signifikan. Frances, et al (1981) bahkan menegaskan bahwa pengangguran bukan ukuran yang memuaskan kemiskinan karena pada umumnya, orang yang menganggur keadaannya lebih baik, sementara orang yang sangat miskin justru tidak menganggur.

Di Indonesia, berdasarkan data BPS, hubungan tingkat pengangguran dan kemiskinan cenderung berbeda. Setengah pengangguran lebih sensitif untuk mengukur kemiskinan dibandingkan pengangguran. Data menunjukkan bahwa pada level nasional, ketika tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan justru menurun atau sebaliknya. Hubungan tersebut diperkuat dengan data pada level kabupaten/kota yang menunjukkan kecenderungan yang sama. Pengangguran dan kemiskinan tidak berkaitan secara langsung karena bukan variabel yang komplemen. Secara konsep atau metodologi, tidak ada kaitan langsung antara pengangguran dan kemiskinan karena angka pengangguran dihitung secara individu berdasar data Sakernas, sedangkan kemiskinan dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga. Kecenderungan di perkotaan, sebagian orang rela menganggur untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka, misalnya *fresh graduated* yang merupakan kelompok penganggur tertinggi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data BPS, Kota Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dan tingkat kemiskinan paling rendah di DIY. Hal ini yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan karena walaupun tingkat

pengangguran tinggi ternyata tingkat kemiskinan rendah. Banyaknya program penanggulangan kemiskinan ternyata mempunyai pengaruh positif pada tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta termasuk yang menyasar pada kelompok penganggur. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang meliputi strategi perlindungan sosial, perluasan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan.

Dalam rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kota Yogyakarta, pemerintah melakukan beberapa tahapan, yaitu validasi dan pelebagaan *updating* data keluarga miskin; pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin; pengembangan SDM penduduk miskin; peningkatan kualitas hidup keluarga miskin; serta pelebagaan *stakeholder* penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di tingkat basis (kelurahan). Kebutuhan data yang valid menjadi salah satu intervensi awal untuk mengukur keberhasilan kinerja program. Parameter kemiskinan yang digunakan di Kota Yogyakarta sedikit berbeda dengan parameter data kemiskinan nasional sebagai upaya untuk menjangkau sasaran program kemiskinan secara lebih menyeluruh dengan memperhatikan kondisi lokal. Hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi yaitu jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibanding pendataan BPS, sehingga Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan garis kemiskinan dengan kualitas relatif lebih tinggi dari garis kemiskinan pada umumnya. Pendekatan pemenuhan hak dasar merupakan upaya awal untuk memberikan jaminan bagi masyarakat miskin atas kebutuhan hakikinya, baik melalui upaya mandiri maupun bantuan pihak lain. Pendekatan ini memberi porsi yang jelas bagi pemerintah untuk memberikan layanan dasar. Melalui pengembangan SDM penduduk miskin, pemerintah melakukan intervensi sikap mental dan kemampuan kompetitif penduduk miskin. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin merupakan tahapan dampak dari hasil intervensi awal dari penanganan kemiskin-

an dan pengangguran. Upaya yang dilakukan dengan mendasarkan pada potensi yang sudah berkembang pada internal keluarga atau suatu komunitas masyarakat miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan lebih optimal apabila *stakeholders* di tingkat basis dapat dilibatkan secara optimal. Pelembagaan kelompok keluarga atau penduduk miskin dengan ikatan kebersamaan usaha merupakan syarat mutlak untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Kelompok-kelompok ditumbuhkan dalam basis komunitas sehingga dalam masing-masing kelurahan dimungkinkan ditumbuhkan beberapa kelompok usaha.

Penanganan permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program kartu menuju sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluargamiskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang parameter pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup tujuh aspek dengan 16 parameter. Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data keluarga miskin yang akurat *by name* dan *by adress* dengan stratifikasi fakir miskin, miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan pengangguran serta pelatihan bagi warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya.

F. Penutup

Secara statistik, tingkat pengangguran ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta, hal ini didukung dengan adanya data bahwa tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dan tingkat kemiskinan paling rendah. Jumlah pengangguran yang tinggi di Kota Yogyakarta didominasi kelompok usia produktif, 20 sampai dengan 29 tahun. Pada kelompok usia ini sangat dimungkinkan merupakan kelompok *fresh graduated* yang sedang mencari pekerjaan dan kelompok setengah pengangguran. Hal ini didu-

kung data bahwa pada tahun 2014, dari 14,655 penganggur, 79.5 persen masuk dalam kategori mencari pekerjaan. Kelompok pengangguran ini tidak serta merta merupakan kelompok miskin karena masih memiliki anggota keluarga lain yang menyokong kehidupan mereka atau bahkan berasal dari keluarga tidak miskin. Tingkat pendidikan pengangguran di Kota Yogyakarta yang didominasi lulusan SMA (33.63 persen) dan Universitas (26.26 persen) menunjukkan, kelompok tersebut tidak terlalu miskin karena masih mampu membiayai pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Program pengentasan kemiskinan, baik pada tingkat pusat maupun di daerah, melibatkan banyak instansi pemerintah dan swasta. Keterlibatan sedemikian banyak instansi telah mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tergantung pada minat dan bidang masing-masing instansi. Namun berbagai program yang dikeluarkan masih belum dapat menyelesaikan akar kemiskinan yang sebenarnya, sehingga memberikan kesan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk penyikap yang gagap dan tidak terencana. Berangkat dari asumsi tersebut diatas, titik tolak dari penyusunan program penanggulangankemiskinan harus dimulai dari data riil penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta dan terbukanya masing-masing instansi untuk menyinergikan dengan kegiatan instansi lain. Berhasilnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta diperlukan komitmen yang kuat, konsisten, dan konsekuen dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat

Pustaka Acuan

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Cutler, D. M., & Katz, L. F. (1991). Macroeconomic Performance and the Disadvantaged. *Brooking Papers on Economic Activity*, 1-74.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The economics of Labor Markets*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muchtolifah. (2010). *Ekonomi Makro*. Surabaya: Unesa University Press.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Son, H., & Kakwani, N. (2006). Global Estimates of Pro-Poor Growth. *International Policy Center for Inclusive Growth, Working Paper No 31*. Brasilia: UNDP.
- Streeten, P., Burki, S., ul Haq, M., & Stewart, F. (1981). *First Things First: Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*. Oxford and New York: Oxford University Press for the World Bank.
- Sukirno, S. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Erlangga: Jakarta.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS Vol. 8, Nomor 3, Oktober 2012*, 176-185.
- Badan Pusat Statistik. (2015, November 5). *Keadaan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2015 Tingkat Penangguran Terbuka Sebesar 4,07 Persen*. Retrieved February 24, 2016, from Berita Resmi Statistik BPS Prov D.I.Yogyakarta: https://www.google.com/url?sa=t&rc=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-ZvEpI_LAhVEKJQKHc_FCB4QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fyogyakarta.bps.go.id%2Fwebsite%2Fbrs_ind%2FbrsInd-20151105152837.pdf&usg=AFQjCNETMm-FueTmZ4Q3pCCQiG7OYnX-cUQ&sig2=P
- Rumahbelajar. (n.d.). *Pendapatan Per Kapita dan Kesempatan Kerja*. Retrieved February 25, 2016, from Rumah Belajar : Belajar untuk Semua: <https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=54&lvl1=4&lvl2=1&lvl3=1&kl=8>

Kontribusi Ketahanan Keluarga terhadap Sikap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba

The Contribution of Family Resilience towards Youth Attitude in Drug Abuses

Ikawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Nitipuran Yogyakarta. Nomor telpon : (0274) 377265. HP
Email: <ikawati.susatyo@yahoo.com>. Diterima 29 Februari, diperbaiki 4 April, disetujui 2 Mei 2016.

Abstract

This research to know the enfluence of family resilience towards youth attitude in drug abuses. This researh is correlational study. Research location ditermined purposively in Yogyakarta Municipality. Research subjects ditermined purposively as many 30 respondents. Research object was family resilience and youth attitude in drug abuses. Data were gathered through questionnaire distribution, interview, and observation. Data were analyzed through regresive technique. The result showed that there was coorelative regresively between independent variable in family resilience physically (X1), psychically (X2), socially (X3), and spiritually (X4), towards dependent variable (Y) in youth attitude in drug abuses. It be concluded that family resilience variable physically, psychically, socially, and spiritually enfluence or contribute youth attitude in drug abuses. Based on that result, recommended that the Ministry of Social Affairs, through Directorate of Drug Abuses Victims, put foward a program to empower family resources, like physical (economic, education, knowledge), psychical, social, and spiritual resilience.

Keywords: *family resilience; youth; drug abuses*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Tipe penelitian adalah penelitian korelasional (*correlational studies*). Penentuan lokasi secara *purposive* di kota Yogyakarta. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, sebanyak 30 responden. Obyek penelitian adalah ketahanan keluarga dan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan teknik regresi. Hasil penelitian menunjukkan, ada hubungan secara regresi antara variabel bebas (x) dalam hal ini ketahanan keluarga baik secara fisik (x1), psikis (x2), sosial (x3) dan spritual (x4), terhadap variabel taut (y), dalam hal ini sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Kesimpulan, variabel ketahanan keluarga baik secara fisik, psikis, sosial dan spritual mempengaruhi atau menyumbangkan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba, untuk mengedepankan program ke arah penguatan sumber daya keluarga, seperti ketahanan secara fisik (pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pengetahuan/wawasan), psikis, sosial dan spritual.

Kata Kunci: ketahanan keluarga; remaja; penyalahgunaan narkoba

A Pendahuluan

Remaja mengalami berbagai konflik, baik sosial maupun psikis, bagi dirinya sendiri, semua itu dilakukan remaja dalam rangka mencari identitas diri. Remaja sangat memerlukan bimbingan dan arahan yang baik dari orangtua khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif,

salah satunya penyalahgunaan narkoba. Menurut BNNRI (2013), jumlah penyalahgunaan narkoba yang dirawat di tempat rehabilitasi bekerjasama dengan BNN, berdasarkan kelompok usia (<19 tahun) tahun 2011-2013, dan yang sudah terkena AIDS ada 1929 orang (tahun 2011), 2648 orang (tahun 2012) dan 3283 orang di tahun 2013. Jumlah tersangka kasus Narkoba berdasarkan

kelompok umur (<19 tahun), di tahun 2011 (1888 kasus), tahun 2012 (2235 kasus) dan tahun 2013 (2499 kasus).

Untuk membimbing remaja, baik keluarga maupun masyarakat diperlukan sikap yang bijaksana, artinya tingkah laku remaja jangan dijadikan tumpuhan kesalahan, karena di balik perilaku tersebut tentu ada penyebabnya, dengan memahami remaja dengan bijak melalui ciri khasnya, baik watak, sikap maupun perkembangannya dapat mencegah remaja ke dalam perilaku yang tidak negatif. Remaja sebagai generasi muda dan merupakan potensi bagi pembangunan bangsa, untuk dapat mewujudkan remaja sebagai manusia yang berdaya guna, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, karena remaja dalam proses perkembangannya akan mengalami bervariasi variabel baik fisik, psikis, maupun sosial.

Remaja dapat berdaya guna, dan menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik, tetapi membutuhkan bantuan orang lain, terutama keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan lembaga yang fundamental dan lembaga pendidikan pertama yang mempunyai tugas dalam pembentukan jiwa generasi penerus, menumbuhkan dan memupuk jiwa besar, berdisiplin serta bertanggung jawab. Peranan orangtua dan keluarga sebagai sumber daya keluarga sangat penting artinya bagi perkembangan anak, karena anak mendapat pendidikan yang pertama dari keluarganya terutama orangtua, melalui melihat, meniru, mencontoh dan mengikuti yang dilakukan orangtua. Menurut Kartini Kartono (1990), bahwa identifikasi dengan salah satu orangtuanya dapat memperkuat pertumbuhan mental dan perkembangan kepribadian anak remaja.

Sumber daya keluarga merupakan semua sumber yang terdapat di dalam keluarga, dibagi menjadi dua (Amato dan Ochiltree, 1986), yaitu sumber daya keluarga yang bersifat fisik dan sumber daya keluarga yang bersifat psikis. Sumber daya keluarga yang bersifat fisik meliputi pendapatan, status pekerjaan dan pendidikan orangtua, kepadatan dan kualitas tempat tinggal, kualitas dalam hidup bertetangga, jumlah orang

dewasa yang hidup bersama serta kesehatan orangtua. Sumber daya keluarga yang bersifat psikis merupakan sumber di dalam keluarga yang meliputi aspirasi dan harapan orangtua, komunikasi verbal antara orangtua dan anak, bantuan dan perhatian yang diberikan oleh orangtua kepada anak, serta kedekatan keluarga dan konflik keluarga yang timbul. Faktor perhatian orangtua mengungkap persepsi anak mengenai usaha orangtua untuk memberi perhatian terhadap keadaan keluarga, perkembangan sosial anak, sekolah anak, disiplin anak, serta pendidikan agama dan pendidikan etika anak.

Perhatian orangtua yang diharapkan adalah tipe perhatian campuran, yang ditandai dengan orangtua sengaja membagi perhatiannya terhadap macam-macam faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak (Meichati, 1978). Berkaitan dengan kesehatan mental, penerimaan, kasih sayang, keterlibatan dan perhatian yang besar dari orangtua diperlukan agar timbul rasa aman pada remaja. Rees dan Wilbon (Purwani Trangwesti, 1992) menemukan, bahwa remaja pecandu obat-obat terlarang menganggap orangtua mereka terlalu ikut campur, berkuasa, memberi perlindungan yang berlebihan dan sering menyalahkan. Mereka juga memandang orangtua kurang mempunyai arah dalam berperan sebagai orangtua. Sebaliknya, remaja yang tidak terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang menerima orangtua sebagai pendorong kemampuan sosial dan mendukung berpikir mandiri, mereka juga memandang orangtua dan melakukan pengontrolan dengan membuat aturan dan batasan dan menerapkannya secara konsisten.

Menurut Hurlock (1991), bahwa orangtua yang menerima anak apa adanya akan mampu menjalin hubungan yang penuh perhatian dan cinta kasih, dan dengan sepenuhnya memperhatikan perkembangan kemampuan dan minat anak. Hubungan semacam ini memungkinkan anak mampu bersosialisasi dengan baik dan mempunyai emosi yang stabil serta gembira. Barnes (Purwani Trangesti, 1992) menemukan dalam penelitiannya, bahwa adanya sumber daya

keluarga yang tinggi dari orangtua disertai dengan kontrol yang cukup, mempunyai pengaruh yang kuat mencegah keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Barnes, sumber daya keluarga adalah perbuatan orangtua kepada anaknya yang menunjukkan bahwa anak diterima, dicintai dan diakui oleh orangtuanya. Sumber daya keluarga ini meliputi pemberian pujian, dorongan, afeksi secara fisik serta bantuan. Winfree (Ikawati dan Akhmad Purnama, 1998) dalam penelitiannya menemukan, bahwa konflik antara remaja dengan orangtua menyebabkan meningkatnya keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan zat.

Remaja penyalahguna narkoba mempunyai anggapan yang negatif terhadap peran orangtua, keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh ketidakpuasan remaja terhadap hubungan dalam keluarga. Pentingnya sumber daya keluarga dalam mencegah keterlibatan remaja dalam penggunaan narkoba, karena remaja penyalahguna narkoba kurang mendapat sumber daya keluarga. Dalam ungkapan lain, remaja yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan sumber daya keluarga yang lebih baik daripada remaja penyalahguna narkoba. Keluarga merupakan unit pertama yang dikenal anak dan sekaligus tempat pertama seorang anak bersosialisasi, sehingga keluarga sangat penting peranannya dalam pembentukan sikap remaja. Sumber daya keluarga fisik seperti pendapatan, status pekerjaan, pendidikan orangtua, kualitas tempat tinggal dan status kesehatan orangtua.

Sumber daya keluarga yang bersifat psikis seperti aspirasi, harapan, komunikasi verbal antara orangtua-remaja, bantuan dan perhatian, kedekatan dan konflik yang timbul. Sumber daya sosial seperti usaha orangtua untuk memberi perhatian anak dalam perkembangan sosial, pendidikan sekolah, disiplin anak dan agama serta etika. Ketiga sumber daya keluarga tersebut secara positif dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, seperti adanya rasa aman pada remaja, apabila orangtua dapat mengembangkan potensi tersebut kepada anak secara baik, sehingga dapat

tercegah dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian berjudul kontribusi ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah kontribusi ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba? Tujuan penelitiannya adalah diketahui kontribusi ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian kuantitatif (regresi), untuk mengetahui ada tidaknya kontribusi antara variabel "x" yaitu ketahanan keluarga dan variabel "y" yaitu sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba (Suharsimi Arikunto, 2003). Penentuan lokasi secara *purposive*, yaitu Yogyakarta, dengan pertimbangan daerah tersebut rawan terjadi penyalahgunaan narkoba, mengingat daerah kota pelajar, masyarakatnya sangat heterogen dan merupakan daerah tujuan berbagai penduduk Indonesia.

Sasaran subjek penelitian ditentukan secara *puposive* dengan pertimbangan remaja yang masih duduk di bangku SLTA, bertempat tinggal bersama orangtuanya, masih mempunyai orangtua lengkap, berdasarkan tersebut, maka ditentukan 30 responden. Sasaran objek penelitian adalah ketahanan keluarga dan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut. Variabel bebas (x) adalah ketahanan-keluarga yang akan dilihat dalam aspek-aspek sebagai berikut. Ketahanan keluarga secara fisik (x1) adalah sumber daya yang ada dalam keluarga, meliputi pendapatan, pendidikan orangtua, kondisi rumah, kondisi lingkungan tempat tinggal dan kondisi kesehatan keluarga. Ketahanan keluarga secara psikis (x2) adalah sumber daya yang ada dalam keluarga yang meliputi aspirasi dan harapan orangtua, bantuan dan perhatian kepada anak, komunikasi verbal antara orangtua dan anak, kedekatan antaranggota dalam keluarga dan konflik keluarga yang timbul. Ketahanan keluarga secara sosial (x3) adalah sumber daya

yang ada dalam keluarga, meliputi keterlibatan dalam kegiatan sosial dan terlibat kepengurusan sosial di lingkungannya. Ketahanan keluarga secara spiritual (x4) adalah sumber daya yang ada dalam keluarga yang meliputi konsistensi dalam melakukan ibadah, perilaku suri tauladan orangtua kepada anak dan pengamalan norma agama dalam masyarakat.

Variabel taut/dependent/ tergantung (y) adalah sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba, terutama dalam penanganan korban berorientasi secara *promotive/preemptive*/pembinaan, *preventive* (pencegahan), *kurative* (pengobatan), *Rehabilitative* (pemulihan) dan *represive* (penindakan). Teknik pengumpulan data menggunakan distribusi kuisioner. Analisis data dipergu-

nakan teknik regresi, untuk mengetahui ada atau tidaknya kontribusi variabel “x” yaitu ketahanan keluarga yang terdiri dari beberapa aspek yaitu x1 = ketahanan keluarga secara fisik, x2 = ketahanan secara psikis, x3 = ketahanan secara sosial dan ketahanan secara spiritual dan variabel “y” yaitu sikap remaja dalam penyalahgunaan remaja.

C. Kontribusi Ketahanan Keluarga terhadap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba

Untuk memudahkan perhitungan analisis dalam penelitian ini digunakan komputer program statistik (SPSS) Sutrisnohadi dan Yuni Pamardiningsih UGM Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Rangkuman Analisis Regresi

Sumber variasi	JK	Db	RK	F	R ²	P
Regresi penuh	1.169.002	4	292.251	27.749	0.816	0.000
Variabel X3	1.056.925	1	1.056.925	100.356	0.738	0.000
Variabel X1	66.997	1	66.997	6.361	0.047	0.009
Variabel X4	21.165	1	21.165	2.010	0.015	0.083
Variabel X2	23.915	1	23.915	2.271	0.017	0.070
Residu Penuh	263.295	25	10.532	-	-	-
Total	1.432.297	29	-	-	-	-

Dalam tabel 1 rangkuman analisis regresi di atas dapat dimaknai bahwa $F = 27,749$ dengan $p = 0,000$. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa $p < 0,01$, kesimpulannya sangat signifikan yaitu ada hubungan regresif antara variabel bebas (x) ketahanan keluarga baik secara fisik, psikis, sosial dan spritual terhadap variabel taut (y), dalam hal

ini sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumbangan variabel “x” terhadap variabel taut (y) dilihat dalam sumbangan efektif dan relatifnya, dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini, yaitu dalam perbandingan bobot prediktor.

Tabel2
Perbandingan Bobot Prediktor (x dan y) dalam Sumbangan Relatif dan Efektif

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk yang Bekerja	218,911	208,223	179,882	195,445	149,189
Angkatan Kerja	256,164	239,445	201,535	213,686	166,406
Rasio Penduduk yang Bekerja	0.85	0.86	0.89	0.91	0.90

Keterangan:

Variabel X1 : Ketahanan Keluarga secara fisik;

Variabel X2 : Ketahanan Keluarga secara psikis;

Variabel X3 : Ketahanan Keluarga secara sosial;

Variabel X4 : Ketahanan Keluarga secara spiritual;

Variabel y : Sikap Remaja dalam Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam tabel 2 yaitu perbandingan bobot prediktor variabel bebas (x) terhadap variabel taut (y) yang dapat dimaknai dalam sumbangan efektif dan sumbangan relatifnya sebagai berikut. Sumbangan efektif sebesar 81,617 persen artinya ketahanan keluarga baik secara fisik, psikis, sosial dan spritual (variable x) mempengaruhi atau menyumbangkan sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba (variable y) sebesar 81,617 persen. Masih ada sebesar 18,383 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut selain ketahanan keluarga dapat disebabkan antara lain pengaruh lingkungan masyarakat, yang menurut Rozak dan Sayuti (2006) yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba adalah lingkungan masyarakat yang memiliki norma aturan “longgar” dan tempat tinggal remaja yang berada pada lingkungan pengedar narkoba. Selain dipengaruhi masyarakat, teman sebaya juga sangat mempengaruhi, seperti pendapat Satriawatu (Tarigan, 2001) yang menyatakan, bahwa kelompok teman sebaya memiliki pengaruh yang amat besar terhadap remaja. Peranan kelompok teman sebaya bukan hanya sebagai tempat mencari kawan sepermainan, melainkan berfungsi sebagai pembentuk sikap sosial, tingkah laku sosial, membagi pengalaman dan sosialisasi nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang dapat diterima di masyarakat. Hawari (2006), dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa pengenalan pertama dengan narkoba datangnya dari teman kelompok, sebesar 81,3 persen, lebih lanjut Hawari (2006) menyatakan, bahwa pengaruh teman kelompok sebaya dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri, terlebih ketika yang bersangkutan merasa keluarga di rumah sangat tidak bersahabat, kondisi ini biasanya dapat menyebabkan remaja bersandar pada kelompok remaja yang terlibat narkoba.

Variabel taut (y) sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba di lapangan dapat diungkap dalam sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba berorientasi pada promotive atau pre-emptive atau pembinaan, dari 30 responden : (1) waktu

luang pada remaja banyak digunakan untuk kegiatan olah raga ada 19 orang atau 66,67 persen. Menurut Kuppuswamy (Nina Andalina, 1989), bahwa sikap seseorang dapat berubah melalui bermacam-macam cara, salah satu sumber per-variabel sikap adalah memperoleh informasi yang baru melalui media massa atau dari orang lain. Ketahanan keluarga secara fisik melalui kepemilikan tingkat pendidikan orangtua yang tinggi dapat memberikan bimbingan ke arah yang lebih positif kepada anak-anaknya, dalam kaitan dengan penelitian ini orangtua mengarahkan waktu luang yang bermanfaat, sehingga dapat mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba. (2) Remaja selalu mengikuti pertemuan sosial di lingkungan sekolah, ada 11 orang atau 36,67 persen.

Menurut Thurstone (Nina Andalina, 1989), bahwa sikap dapat bersifat positif jika menimbulkan perasaan senang, sehingga individu bersikap menerima, dapat juga bersifat negatif jika menimbulkan perasaan tidak enak, sehingga individu menolak. Dalam kaitannya ini, apabila remaja sering mengikuti pertemuan yang positif, maka akan bersikap positif terhadap suatu masalah tak terkecuali tentang penyalahgunaan narkoba. (3) Remaja mendapat support atau dorongan kegiatan hobinya dari orangtua sebanyak 21 orang atau 70 persen. Menurut Bimo Walgito (1978), bahwa pembentukan dan per-variabel sikap salah satunya ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar individu yang dapat merangsang untuk mengubah dan membentuk sikap. Kaitan dengan data di atas, orangtua telah mengarahkan untuk mengembangkan waktu luangnya untuk kegiatan yang disukainya (hobi), sehingga remaja mempunyai arah dalam segala kegiatan, kondisi ini dapat mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba berorientasi pencegahan, dari 30 responden yang mengatakan: (1) setuju dengan pendapat bahwa remaja perlu terlibat melawan narkoba melalui mengikuti seminar-seminar tentang narkoba ada sebanyak 22 orang atau 73,33 persen. Sikap dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri

terhadap lingkungannya (Abu Ahmadi, 1979), dari data di atas dapat dimaknai bahwa mengikuti seminar tentang Narkoba dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mencegah agar dapat berperang melawan penyalahgunaan Narkoba. (2) Setuju dengan pendapat bahwa dengan mengikuti pelatihan tentang masalah narkoba agar tahu dampaknya bagi kesehatan ada 4 orang atau 13,33 persen. Dalam kaitannya dengan data di atas menurut Hermawan (1988), bahwa seseorang akan terpengaruh penyalahgunaan Narkoba jika kurang adanya penyaluran hobi, pembekalan pengetahuan tentang narkoba.

Fishber dan Afzain (Muhammad Ziedni, 1994), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan dasar dan fungsi sikap, niat dan tindakan. (3) Setuju dengan pendapat bahwa sering berdiskusi tentang narkoba dengan ahlinya, agar dapat tercegah dari penyalahgunaan narkoba (100 persen). Menurut Ahmadi (1979), bahwa sikap sebagai alat pengatur pengalaman artinya manusia dalam menerima pengalaman dari luar tidak bersikap pasif, tetapi diterima secara aktif dengan pemilihan-pemilihan yang perlu atau tidak perlu dilayani. Dalam kaitannya dengan data di atas, maka perlu seorang remaja berdiskusi dengan ahli (dokter) mengenai masalah Narkoba. (4) Keterlibatan remaja dalam kampanye tentang narkoba ada 36,67 persen. Menurut Brown (dalam Muhari, 1993), keluarga mempunyai peranan penting bagi perkembangan anak menuju kedewasaan, peranan tersebut salah satunya mengajarkan dan mewariskan norma kebudayaan, agama dan moral kepada anak. Dalam kaitannya dengan data di atas, maka orangtua mengarahkan, memberi kesempatan pada remaja untuk terlibat dalam kampanye narkoba di sekolahnya

Sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba berorientasi pengobatan, dari 30 responden yang menyatakan: (1) Setuju dengan pendapat bahwa pengguna narkoba sebaiknya disembuhkan dulu dari ketergantungan, baru ada sanksi hukum ada 27 orang (90 persen). Ada kepedulian remaja terhadap nasib penyalahguna narkoba mengingat

mereka masih dapat diperbaiki, masih punya masa depan, sehingga perlu melalui penyembuhan dulu baru mendapat sanksi sesuai aturan yang ada. Sikap seperti ini akan terjadi apabila remaja mempunyai sumber daya keluarga yang baik seperti ketahanan keluarga secara fisik, psikis, sosial dan spritual (Amato dan Ochiltree, 1986). (2) Setuju dengan pendapat bahwa selain pengobatan medis pada pengguna narkoba perlu pengobatan psikis seperti perhatian dari keluarga dan orangtua, ada 30 orang atau 100 persen. Kondisi ini dapat terjadi apabila anak mempunyai sumber daya orangtua yang baik terutama ketahanan keluarga secara psikis. Anak yang telah mengalami perhatian, kasih sayang dan cinta kasih dalam keluarga akan tumbuh empati pada diri anak kepada semua orang yang sedang mengalami kesusahan seperti pengguna narkoba. Peran keluarga sangat vital sebagai benteng pertahanan bagi remaja dari serangan pengaruh luar seperti penyalahgunaan narkoba, sehingga keterbukaan, kehangatan komunikasi, perhatian, cinta kasih antara orangtua terhadap anak sangat berperan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Alit, 1995). Dalam kaitannya dengan data di atas maka pengobatan psikis seperti perhatian dari keluarga terutama orangtuanya sangat penting selain pengobatan medis (3) Setuju pendapat bahwa pengobatan religius sangat dianjurkan pada pengguna narkoba ada sebanyak 20 orang (66,67 persen). Menurut Brown (Muhari, 1993), bahwa salah satu peran keluarga antara lain mengajarkan norma agama dan moral kepada anak, sehingga kaitan dengan data di atas, sumber daya keluarga secara spiritual yang baik akan menanamkan hal tersebut kepada anaknya, sehingga anak dapat tercegah dari penyalahgunaan narkoba

Sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba berorientasi pemulihan dari 30 responden yang menyatakan: (1) Remaja setuju dengan pendapat bahwa orang yang telah terkena narkoba sebaik-nya secepatnya mendapat pengobatan pada ahli-nya, ada 30 orang atau 100 persen. Menurut Yatim (1991), bahwa narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya sering di-

sebut zat adiktif, zat psikoaktif dan psikotropika, obat-obatan ini adalah zat yang dapat mengubah pikiran dan perasaan karena pengaruhnya secara langsung terhadap susunan syaraf pusat. Menurut Wicaksana (1998), bahwa penyalahgunaan obat (zat) merupakan suatu pola penggunaan yang bisa merusak, paling sedikit satu bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, pelajaran dan pergaulan. Kaitan dengan data di atas dapat dimaknai bahwa remaja dapat bersikap seperti di atas apabila mempunyai wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan semua itu didapat dari hubungan sosial yang baik, kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. (2) Remaja setuju dengan pendapat bahwa proses pemulihan yang efektif pada pengguna narkoba adalah dukungan dari berbagai pihak antara lain penderita sendiri, keluarga dan masyarakat, ada 30 orang atau 100 persen.

Menurut Hurlock (1991), kontribusi keluarga dalam perkembangan anak sangat besar, keluarga merupakan benteng utama untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak, perhatian, kasih sayang, pengertian dan kepercayaan dari orangtua sangat dibutuhkan remaja untuk menciptakan rasa aman dalam dirinya, sehingga remaja dapat mengatasi masalahnya dengan baik. (3) Remaja setuju dengan pendapat bahwa agar cepat sembuh, maka diperlukan pemantauan dari keluarga dan masyarakat hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecanduan, ada sebanyak 30 orang atau 100 persen. Pendapat tersebut didukung oleh Hurlock (1991), bahwa kontribusi keluarga sangat besar bagi perkembangan anak salah satunya adalah sebagai model pola perilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial dan bimbingan perilaku yang disetujui. Kaitannya dengan data di atas maka remaja bersikap tentang perlunya pemantauan dari keluarga dan masyarakat agar pecandu narkoba dapat cepat pemulihannya.

Sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba berorientasi penindakan, dari 30 responden yang menyatakan: (1) Remaja setuju dengan pendapat bahwa remaja mempunyai kewajiban melaporkan pada yang berkompeten bila ada permasalahan tentang narkoba di lingkungannya,

ada 18 orang atau 60 persen. Menurut Rozak dan Sayuti (2006), bahwa pengaruh lingkungan masyarakat yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba adalah lingkungan yang memiliki norma aturan yang longgar dan tempat tinggal remaja yang berada pada lingkungan pengedar Narkoba.

Dalam kaitannya dengan data di atas apabila lingkungan masyarakat peduli terhadap permasalahan dampak yang akan ditimbulkan penyalahgunaan narkoba, maka kegiatan yang mencurigakan mengenai kegiatan narkoba di lingkungannya segera dilaporkan pada yang berkompeten. (2) Remaja setuju dengan pendapat bahwa remaja ikut berpartisipasi dalam penindakan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, ada 11 orang atau 36,67 persen Kondisi ini dapat terjadi apabila remaja mempunyai sumber daya keluarga terutama ketahanan keluarga secara fisik dan sosial yang kurang. Menurut Sarwono (1992) salah satu ciri masyarakat Indonesia tempat sebagian besar remaja kita tinggal adalah masyarakat transisi tempat masyarakat beranjak dari keadaan yang tradisional menuju kondisi yang lebih modern, dengan sarana prasarana komunikasinya, keadaan ini cukup membingungkan dan berbahaya bagi remaja. (3) Remaja setuju dengan pendapat bahwa adanya petunjuk yang jelas dari pemerintah terkait kepada masyarakat tentang mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan masalah narkoba yang ada di lingkungannya, ada 18 orang atau 60 persen. Kondisi ini dapat terjadi apabila remaja memiliki sumber daya keluarga yang baik terutama ketahanan sosial. Sebanyak-banyaknya informasi tentang mekanisme pelaporan tentang penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai kontrol sosial bagi keluarga dan masyarakat, akan mencegah penyalahgunaan narkoba di keluarga dan masyarakat sekitarnya

Dalam penelitian ini kontribusi relatif dapat dilihat dalam variabel bebas terhadap variabel terikat (y). Variabel bebas dalam penelitian ini ada empat (4) variabel bebas “x1” yaitu variabel ketahanan keluarga secara fisik, “x2” (variabel ketahanan keluarga secara psikis), “x3” (varia-

bel ketahanan keluarga secara sosial dan “x4” variabel (ketahanan keluarga secara spiritual) dan variabel tautnya (y) adalah sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam tabel 2 di atas yang menunjukkan perbandingan bobot prediktor (“x” dan “y”), yang dapat dimaknai kontribusi relatif variabel “x1” yaitu ketahanan keluarga secara fisik terhadap variabel “y” (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberi sumbangan 5,731 persen. Sumbangan relatif variabel “x2” yaitu ketahanan keluarga secara psikis terhadap variabel “y” (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberikan sumbangan sebesar 2,046 persen. Sumbangan relatif variabel “x3” yaitu ketahanan keluarga secara sosial terhadap variabel “y” (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberikan sumbangan sebesar 90,413 persen. Sumbangan relatif variabel x4 yaitu ketahanan keluarga secara spiritual terhadap variabel y (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberikan sumbangan sebesar 1,811 persen.

Hasil analisis di atas diperkuat dengan data di lapangan, untuk itu satu persatu variabel dijelaskan sebagai berikut. Sumbangan relatif variabel “x1” yaitu ketahanan keluarga secara fisik terhadap variabel “y” (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberi sumbangan 5,731 persen. Dalam variabel ini di lapangan dilihat antara lain: (a) Kondisi pendapatan keluarga (>4 juta ada sebanyak 60 persen). Melihat data di atas dapat dimaknai bahwa ketahanan keluarga yang baik dapat dilihat dari sumber daya keluarga yang bersifat fisik, salah satunya meliputi pendapatan dengan pendapatan keluarga yang baik atau tidak baik dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja (Amato dan Ochiltrie, 1986). Suatu ilustrasi di lapangan ternyata keluarga yang mempunyai pendapatan lebih yang tidak bisa mengelola dengan baik, seperti memberikan uang saku kepada anaknya tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka kelebihan uang saku tersebut rawan digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyalahgunaan narkoba.

Sebaliknya keluarga yang pendapatannya kurang, akan rawan dari tawaran-tawaran untuk memperjualbelikan narkoba, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lambat laun tentu dapat rawan sebagai pengguna narkoba, karena selalu berhubungan dengan barang tersebut (ingin coba-coba). (b) Kondisi tingkat pendidikan orangtua (sarjana 50-53,33 persen). Data tersebut diperkuat pendapat Djaelani, J (1988), bahwa orangtua merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi anak dan remaja, keterlibatan orangtua dalam pendidikan penyalahgunaan narkoba baik dalam bentuk pelatihan, pemberi materi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. (c) kondisi rumah orangtua seperti kualitas rumah semi permanen ada 63,34 persen, status kepemilikan rumah sendiri ada 50 persen, cukup rentan angin, api, banjir ada 60 persen. Kondisi ini diperkuat dengan pendapat Eko Budiharjo (1992), yaitu persyaratan rumah yang baik dapat memberi keamanan seluruh anggota dalam keluarga tersebut apabila terpenuhi kebutuhan fisiologis yang meliputi pencahayaan, perlindungan dari kebisingan, tersedianya yang fungsional seperti ruang tamu, makan, kamar, kamar mandi/wc dan keluarga. Ruangan tersebut dapat memberikan ketenangan psikologis, karena adanya jaminan *privacy*, juga kualitas rumah seperti konstruksi yang kuat sehingga dapat menghindari bahaya kebakaran, angin ribut dan banjir sangat berpengaruh terhadap kondisi kenyamanan anggota keluarga dalam rumah.

Apabila di dalam rumah sudah tidak ada kenyamanan, anggota keluarga banyak yang tidak memfungsikan rumah menjadi tempat berkumpul dalam keluarga, sehingga banyak yang lebih nyaman berada di luar rumah. Kondisi seperti ini rawan remaja dalam menyalahgunakan narkoba. (d) Kondisi lingkungan sekitar seperti kondisi kebisingan tinggi ada 56,67 persen, cukup padat penduduknya ada 63,33 persen, kepedulian tetangga/keluarga kurang ada 73,77 persen, kontrol sosial tidak ada ada 26,67 persen, teguran masyarakat apabila warga melanggar norma atau aturan tidak ada 33,33 persen, permasalahan yang ada, kadang disele-

saikan melalui musyawarah ada 56,67 persen. (e) Kondisi kesehatan seperti keterpenuhiannya gizi cukup ada 50 persen, kadang-kadang dipantau kesehatannya ada 50 persen, frekuensi sakit 2-3 kali dalam satu bulan ada 53,33 persen.

Data di atas dapat dimaknai bahwa dalam lingkungan sekitar keluarga apabila terjadi seperti kondisi kebisingan yang cukup sampai dengan tinggi dapat mempengaruhi kondisi psikis penghuni di sekitarnya seperti tidak tenang, tidak nyaman, membuat marah. Kondisi ini dapat menyebabkan keributan di lingkungan tersebut, sehingga banyak mereka yang lebih nyaman berada di luar rumah daripada kembali ke rumahnya (Clinard dalam Ikawati 2001). Menurut Kartini Kartono (1986), bahwa gangguan perkembangan mental pada seseorang dapat disebabkan oleh bawaan dan lingkungan seperti lingkungan, seperti lingkungan yang tidak kondusif akan melahirkan generasi yang memiliki sifat-sifat perilaku yang tidak baik atau negatif. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang baik anak maupun remaja rawan terhadap hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba.

Kontribusi relatif variabel "x2" yaitu ketahanan keluarga secara psikis terhadap variabel "y" (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberi sumbangan sebesar 2,046 persen. Dalam variabel ini di lapangan dilihat dari aspek: (a) Aspirasi dan harapan orangtua seperti menghendaki anak mengikuti kegiatan sosial 56,67 persen. Data di atas dapat dimaknai bahwa untuk dapat membangun keluarga yang berketahanan, keluarga harus mampu menghidupkan fungsi-fungsi keluarga melalui intervensi, dalam aspek sosial yaitu keluarga harus dapat mengenalkan anak pada lingkungan sosial, norma sosial, agama, susila, etika dan moral serta sistem nilai yang berlaku di masyarakat (Sri Handayani, 2011). Aspek sosial tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dalam orangtua menghendaki anak untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat, dengan harapan dapat mencegah tidak menyalahgunakan narkoba.

Orangtua mengharapkan anak masuk ranking prestasi di sekolah ada 53,33 persen. Aspek

sosial lain sebagai intervensi keluarga (Sri Handayani, 2011), antara lain mengharapkan anak masuk ranking di sekolah, adapun maksud tujuan orangtua tersebut waktu yang digunakan anak sebaiknya untuk belajar, agar dapat mencapai ranking di sekolah. Kondisi ini tentunya dapat mencegah terjerumusnya anak dalam penyalahgunaan narkoba. Orangtua berharap anak menjadi orang yang berguna ada 73,33 persen.

Data di atas dapat dimaknai intervensi keluarga agar dapat mencapai keluarga yang berketahanan, harus mampu menghidupkan fungsi-fungsi keluarga (Sri Handayani, 2011) antara lain dapat dilihat dalam tabel di atas, yaitu orangtua berharap anak menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negara. Harapan orangtua tersebut tentunya mengharapkan anak menjadi yang baik, anak akan mematuhi keinginan orangtua, sehingga anak dapat mencegah dalam perilaku-perilaku negatif, seperti dalam penyalahgunaan narkoba

Orangtua memberi kebebasan memilih jurusan dengan harapan dapat berhasil dalam studi ada 20 persen. Kondisi frustrasi menyebabkan anak rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Singgih Gunarso 1993), kondisi ini menurut Hikmat (Sri Handayani, 2011) dapat menyebabkan kondisi yang tidak tenang, kegelisahan selalu muncul sehingga individu mempunyai keinginan besar untuk mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya seperti terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. (b) Bantuan dan perhatian kepada anak seperti ada perasaan tenang setelah membicarakan masalah dengan orangtua ada 33,33 persen. Data tersebut diperkuat dengan pendapat Alit (1995), karakteristik keluarga dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba antara lain pola komunikasi yang tidak baik dan kebutuhan psikologis yang kurang. Orangtua memberi perhatian ketika anak gelisah ada 30 persen. Kedekatan anak dan orangtua dapat mencegah anak melakukan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan NAPZA (Alit, 1995).

Orangtua memberi dorongan ketika anak putus asa ada 40 persen. Adanya kedekatan, maka

ada kehangatan antara anak dengan orangtua, sehingga membuat anak patuh yang dikatakan orangtuanya, seperti memberikan dorongan ketika anak putus sekolah. Kondisi ini dapat mencegah anak dalam perbuatan-perbuatan yang negatif, seperti dalam penyalahgunaan narkoba (Willis, 2008). Orangtua memberi saran yang berarti pada ada sebanyak 50 persen. Data tersebut dapat dimaknai bahwa ternyata responden mau diberi saran yang berguna oleh orangtuanya, artinya antara responden ada kedekatan hubungan, saling perhatian sehingga terjadi hubungan yang harmonis di antara keduanya. Kondisi ini menurut Sarwono (1992), dapat mencegah anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Orangtua selalu memberi solusi untuk permasalahan yang dihadapi anak ada 50 persen. Temuan tersebut diperkuat pendapat dari Rakhmat (1988), bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka akan memberikan supor, rasa percaya yang menumbuhkan dialog sehingga tercapai pengertian yang baik di antara keduanya, pada konteks ini orangtua dan responden yang hubungannya baik maka solusi yang diberikan kepada anak akan diterima dengan baik. (c) Komunikasi verbal antara orangtua dan anak, seperti orangtua tidak menanggapi pembicaraan anak dengan acuh ada 20 persen. Biasanya kondisi ini terjadi apabila ada hubungan yang baik antara anak dan orangtua, apabila sudah terjadi seperti ini maka anak akan merasa nyaman apabila berbicara tentang segala hal dengan orangtua dan tidak harus menanyakan kepada kelompok sebaya atau orang lain yang belum tentu dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kondisi ini dapat mencegah anak dalam penyalahgunaan narkoba (Rakhmat, 1988).

Orangtua memberi kesempatan kepada anak berdialog ada 46,67 persen. Menurut Djaelani (1995), apabila dalam suatu keluarga terdapat komunikasi yang baik, banyak yang didiskusikan dengan terbuka dan saling percaya termasuk dalam penyalahgunaan narkoba, dapat mencegah anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Orangtua selalu menanyakan kepada

anak tentang perkembangan studinya ada 50 persen. orangtua sangat perhatian terhadap apa yang dilakukan anak terutama studinya, kontrol orangtua melalui pola hubungan ini dapat mencegah anak terkontrol, aktivitasnya terutama studinya, agar tercapai cita-citanya (Hurlock, 1991).

Perbedaan pendapat antara anak dan orangtua diselesaikan secara musyawarah ada 40 persen. Menurut Zumbardo (Rakhmat, 1988) dalam hasil penelitiannya, menemukan kegagalan komunikasi antara orangtua dan anak dapat menyebabkan seseorang menjadi berperilaku negatif. Musyawarah akan dapat membantu menyelesaikan tugas dan problemnya sehingga terjadi keseimbangan pribadi dan menjauhkan dari ketidakseimbangan pribadi yang mengarah pada perilaku-perilaku negatif. Orangtua dapat diajak berbicara secara terbuka ada 40 persen. Keterbukaan antara orangtua dan anak dapat mencegah terjadinya konflik dalam keluarga dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi anak, seperti problem hubungan dengan teman sebaya, sekolah, penggunaan waktu luang, problem seksual dan moral (Schumeldt dalam Hariyanti, 1992). Orangtua memperhatikan kesulitan anak ada 40 persen. Tidak adanya komunikasi, perhatian, pengertian yang ditunjukkan orangtuanya dalam keluarga memungkinkan remaja mengalami jalan buntu dengan melarikan diri kepada kelompok baru teman sebaya, hal ini rentan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Schumeldt, dalam Hariyanti 1992). Orangtua selalu membimbing anak dalam menerapkan nilai-nilai moral di masyarakat ada 53,33 persen.

Menurut Hurlock (1991), salah satu yang dapat menimbulkan kesulitan bagi anak atau remaja untuk melakukan penyesuaian diri adalah apabila rumah kurang memberikan model perilaku untuk ditiru, anak akan mengalami hambatan serius dalam penyesuaian diri baik di rumah maupun di luar rumah. Penyesuaian diri pada remaja yang mengalami hambatan dapat menyebabkan anak mempunyai perilaku menyimpang yang rentan

terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Orangtua selalu memberi teguran apabila anak membuat kesalahan ada 73,33 persen.

Menurut Hasan Basri (1995), usaha preventive orangtua agar anaknya tidak melakukan kenakalan remaja salah satunya adalah membina kualitas keluarga, sehingga kedua orangtua berkesempatan membina dan mengembangkan kepribadian dan akhlak anak-anak mereka dengan baik dan membahagiakan melalui pengajaran, kasih sayang dan perhatian. Orangtua memberi perhatian dalam hal belajar agar anak semangat ada sebanyak 43,33 persen. Kondisi ini tentunya dapat tercipta apabila ada hubungan yang baik diantara orangtua dan anak yang harmonis (Hawari, 2006). Orangtua selalu memperhatikan aktivitas dan pergaulan anak ada 40 persen.

Menurut Hawari (2006), pengaruh teman sebaya dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri, terlebih kalau keluarga tidak bersahabat, dengan demikian diharapkan keluarga dapat menjadi figur yang dipercaya sekaligus mengayomi, sehingga remaja tidak akan mencari tempat sandaran lain berupa kelompok remaja yang terlibat narkoba. (d) Kedekatan antar anggota dalam keluarga seperti adanya keakraban antara anak dan orangtua ada 46,67 persen. Suasana keluarga yang tidak kondusif bagi perkembangan jiwa anak adalah apabila terjadi ketidakakraban antara ayah, ibu, anak dan anggota keluarga yang lain (Hawari, 2006). Sekeluarga sering makan bersama di luar rumah ada 46,67 persen.

Menurut Stinnet dan John Defron (Gusti K Alit, 1995), untuk mengurangi resiko anak terlibat penyalahgunaan obat salah satunya dengan mempunyai waktu bersama-sama anggota keluarga, seperti makan bersama-sama di luar rumah (kadang-kadang sampai dengan makan bersama sebanyak 86,67 persen). Sekeluarga sering nonton televisi bersama ada 40 persen. Menurut Stinnet dan John Defron (Gusti K Alit, 1995), untuk mengurangi resiko anak terlibat penyalahgunaan obat salah satunya dengan mempunyai

waktu bersama-sama anggota keluarga, seperti sekeluarga nonton televisi bersama.

Orangtua walaupun sibuk selalu menyempatkan untuk keluarga ada 40 persen. Menurut Zumbardo (Rakhmat, 1988), fungsi komunikasi sangat besar bagi perkembangan remaja, juga akan berakibat terhadap hal yang ditimbulkan, komunikasi harus dilakukan secara terus menerus/ dalam intensitas cukup tinggi. Apabila dalam keluarga karena kesibukannya, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka dapat menyebabkan remaja lebih aman berada di luar rumah sehingga rentan dalam penyalahgunaan narkoba. (e) Konflik keluarga yang timbul seperti perselisihan dalam keluarga selalu terselesaikan dengan baik ada sebanyak 46,67 persen.

Menurut Ikawati (2010), orangtua merupakan titik sentral dalam usaha terciptanya suasana rumah yang aman bagi anak, hal ini merupakan aspek yang fundamental dalam perkembangan anak. Ketegangan psikologis dan pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, mempengaruhi kasih sayang dan perhatian orangtua, yang pada akhirnya anak akan lebih aman dan nyaman berada di luar rumah yang rentan anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Jarang terjadi pertengkaran dalam keluarga ada 30 persen. Sering terjadi pertengaran dalam keluarga memberikan petunjuk adanya disfungsi keluarga yang merupakan kontribusi bagi anak tidak betah atau bosan berada di rumah, sehingga anak akan lebih nyaman berada di luar rumah seperti dengan kelompok teman sebaya, sehingga rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Rutter dalam I Gusti K Alit, 1995).

Perselisihan selalu dapat dituntaskan dengan baik ada 40 persen. Menurut hasil penelitian Stinnet dan John Defron (Gusti K Alit, 1995), keluarga yang sehat dan bahagia salah satunya ditandai dengan permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan secara baik, positif dan konstruktif. Data di atas dapat dimaknai bahwa pertengkaran dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka terjadi disfungsi keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan anak

remaja rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Perselisihan biasanya diselesaikan dengan saling memaafkan ada 46,67 persen, dalam keluarga apabila ada pertengkaran diselesaikan dengan saling memaafkan, maka akan terjadi suasana yang menyenangkan, sehingga anak merasa aman dan nyaman berada di tengah-tengah keluarga. Suasana seperti ini dapat mencegah anak remaja dalam penyalahgunaan narkoba (Gusti K. Alit, 1995). Persoalan yang kecil dalam keluarga tidak akan menyebabkan pertengkaran ada 40 persen. Data tersebut diperkuat oleh penelitian Goedman (Retno Indaryati, 1992), yang menemukan bahwa suasana yang dapat mencegah anak ke dalam perilaku negatif apabila dalam rumah tersebut tidak ada cinta, penerimaan, rasa aman, perlindungan dan kebebasan, bimbingan, kontrol atau disiplin dan keyakinan.

Sumbangan relatif variabel "x3", yaitu ketahanan keluarga secara sosial terhadap variabel "y" (sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba) memberikan sumbangan sebesar 90,413 persen. Dalam variabel ini di lapangan dilihat antara lain: (a) Keterlibatan dalam kegiatan pendidikan seperti orangtua mengharuskan anaknya mempunyai pendidikan minimal sarjana ada 60 persen. Data tersebut diperkuat oleh Fishben dan Ajzen (Mohammad Ziedni, 1994) yang menyatakan, usaha mendasar pencegahan penyalahgunaan NAPZA adalah melalui penyebaran pengetahuan yang benar tentang NAPZA, berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Orangtua memberi keleluasaan mengikuti kursus sesuai minat dan bakatnya ada 46,67 persen, kesempatan yang diberikan orangtua kepada anak atau remaja dalam menggunakan waktu luang dengan kegiatan positif yang dapat mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba (Hurlock, 1991). Orangtua memberi kebebasan memilih pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya ada 76,67 persen.

Kesempatan untuk memilih jurusan sesuai minatnya, artinya dengan diberi kesempatan anak akan mempunyai motivasi belajar dan diharapkan dapat berprestasi dan berhasil dalam studi dan hidupnya. Apabila anak remaja

tidak diberi kesempatan, dapat berdampak pada frustrasi, menyebabkan anak/remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Andi Mappiare, 1982).

Orangtua memberi kebebasan meneruskan sekolah setinggi-tingginya pada anggota keluarganya ada 50 persen. tingkat pendidikan yang rendah, tentunya sangat berpengaruh terhadap kepemilikan pengetahuan terutama dalam masalah narkoba, sehingga peran pendidikan sangat strategis dan dapat mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Djaelani, 1988). (b) Orangtua dan keluarga selalu menengok bila ada kerabat yang sakit ada 43,33 persen.

Menengok salah satu kerabat yang sakit dapat menumbuhkan anak remaja dapat empati terhadap segala sesuatu yang berdampak bagi kesehatan, salah satunya dampak penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu pembelajaran bagi anak remaja untuk berusaha mencegah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (Gusti K Alit, 1995).Orangtua dan keluarga ikut terlibat dalam kerja bakti atau gotong royong di lingkungannya ada 43,33 persen. Kebiasaan gotong-royong yang dilakukan orangtua di kampungnya akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kondisi ini sekaligus dapat mengontrol sosial apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan gotong-royong, seperti apabila ada masalah narkoba disekitarnya perlu gotong-royong diantara warga dalam penyelesaiannya. (c) orangtua dan keluarga terlibat dalam kepengurusan lembaga sosial ada 53,33 persen, orangtua dan keluarga dalam beberapa kegiatan lembaga sosial ada s 66,67 persen. Menurut Sri Handayani (2011), apabila masa remaja diisi dengan penuh keberhasilan atau kegiatan yang bermanfaat atau positif, maka dimungkinkan remaja akan mendapat keberhasilan dalam perjalanan hidupnya, sehingga terhindar dari perilaku negatif.

Sumbangan relatif variabel "x4", yaitu ketahanan keluarga secara spiritual terhadap variabel "y" (sikap remaja dalam penyalahgunaan

narkoba) memberikan sumbangan sebesar 1,811 pesen. Dalam variabel ini di lapangan dilihat antara lain: (a) Konsistensi dalam melakukan ibadah, seperti adanya rutinitas dalam melakukan ibadah ada 66,67 pesen. Data di atas dapat dimaknai bahwa suri tauladan dari orangtua terutama dalam melakukan ibadah secara rutin akan berpengaruh pada perilaku anak dalam mengerjakan ibadahnya. Menurut Sri Handayani (2011), kunci dalam mengarahkan pendidikan dengan membentuk mental anak terletak pada peranan orangtua, sehingga baik buruknya budi pekerti anak tergantung dari budi pekerti orangtuanya. Orangtua menanamkan saling menghargai agama lain ada 66,67 persen. Data di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan agama selalu mengajarkan menghargai agama orang lain, dengan menghargai agama orang lain maka seseorang dapat menerima orang lain dengan apa adanya, terjalin hubungan harmonis di antara sesama manusia. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang merasa aman, terlindungi, penuh cinta kasih dengan lingkungan sekitar, yang pada akhirnya anak akan membentuk perilaku yang baik, positif sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

Keluarga selalu melakukan ibadah bersama-sama ada 66,67 persen. Menurut Gibran (Frans Padak Demon, 1986), remaja harus dibimbing dengan bijaksana oleh orangtuanya, terutama dalam masa transisi melalui kebiasaan yang baik, sehingga remaja tidak menjauhkan diri dari orangtuanya, sekolah dan agama. (b) Orangtua selalu menghargai pendapat anaknya ada sebanyak 66,67 persen. Kondisi ini dapat terjadi apabila dalam keluarga ada hubungan baik, sebaliknya apabila kondisi dalam keluarga tidak baik dapat merupakan faktor yang mendorong anak remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Simanjuntak, 1991).

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ada kontribusi ketahanan keluarga

terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba, untuk itu maka direkomendasikan kepada : Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban mengedepankan program-program ke arah penguatan sumber daya keluarga, seperti ketahanan secara fisik (pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pengetahuan), psikis, sosial dan spiritual. Orangtua melalui pembekalan pengetahuan tentang narkoba, penyebab dan dampaknya bagi kondisi kesehatan, memantau pergaulan dan aktivitas anak, memberi pendidikan yang tinggi pada anak dan memberi kesempatan pada anak untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif sesuai minat dan bakat anak, orangtua agar selalu menciptakan cinta kasih dan perhatian pada anak.

Dukungan keluarga (orangtua) yang berupa perhatian emosi, bantuan finansial, penghargaan pada anak, akan berpengaruh adaya rasa kedekatan, kelekatan, perasaan dihargai, diberi kepercayaan, sehingga akan menimbulkan pengaruh positif bagi kesejahteraan fisik, psikis dan sosial, sehingga ini dapat mencegah anak remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Remaja dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti seminar, diskusi, pelatihan tentang narkoba dan masalahnya, dapat menyeleksi teman sebaya yang dipandang baik dan buruk, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat, hendaknya tanggap terhadap situasi yang memungkinkan dapat terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Pihak Sekolah, perlu mengadakan kurikulum (materi pelajaran) tentang narkoba dan masalahnya, agar remaja dapat tercegah dari penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan seluruh guru bimbingan dan penyuluhan dalam menangani masalah narkoba agar bisa mentransfer pengetahuan kepada muridnya. Sekolah juga harus melakukan jejaring dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai perhatian dan berkompeten dalam masalah narkoba.

Pustaka Acuan

- Abu Ahmadi. (1979). *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Amato, P.R. and Ochiltree, vG.v (1986). *Family Resource and The Development of Child Competence*. Journal of Marriage and the Family, 48, 47-56.
- Andi Mappiare. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bimo Walgito. (1978). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- BNMRI. (2013). *Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Journal Data Pencegahan dan Pemberantasan Data. Edisi Maret, no 4. Tahun 2013
- Eko Budiharjo. (1992). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Frans Padak Demon. (1986). *Remaja Mencari Identitas*. Jakarta: Anda nomor 112 edisi Maret.
- Hariyanti. (1992). *Hubungan antara Intensitas Komunikasi Remaja dan Orangtua dengan Kecenderungan Perilaku Agresif pada Remaja SMA di Kodya Surakarta*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan Basri. (1995). *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hawari, D. (1991). *Penyalahgunaan Narkobadan Zat Adiktif*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- (2006). *Petunjuk Praktis Terapi : Detoksifikasi Narkoba/NAPZA*. Jakarta: FKUI.
- Hurlock, E.B. (1991). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga
- I Gusti K. Alit. (1995). *Perilaku Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945.
- Ikawati. (2001). *Perbedaan Pengaruh Kondisi Rumah terhadap Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Kumuh dan Rumah Susun*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Ikawati dan Akhmad Purnama. (1998). *Penelitian Diagnostik tentang Perbedaan Sikap Orangtua terhadap Tingkahlaku Agresif Pada kelompok Remaja Narkoba dan Kelompok Remaja Bukan Narkoba*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Ikawati dan Siti Aminatun. (2010). *Pengaruh Kondisi Ketertinggalan terhadap Tingkah Laku Negatif Warga Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Djaelani, J. (1988). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- Kartini Kartono. (1986). *Bimbingan bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- (1990). *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Meichati, S. (1978). *Kepribadian mulai Berkembang di Dalam Keluarga*.
- Mohammad Ziedni. (1994). *Pengaruh Pengiriman serta Penyajian Informasi dan Pesan Pencegahan HIV/ Aids terhadap Pengetahuan dan Sikap terhadap HIV/ Aids pada Anggota Komunitas Gay di Yogyakarta dan Surakarta*. Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Muhari. (1983). *Suatu Studi tentang Pengaruh suasana Rumah terhadap Prestasi Belajar SMU Tingkat Pertama di Jawa Timur*. Yogyakarta: UGM.
- Nina Andalina. L. (1989). *Perbedaan sikap Terhadap Hubungan Badan Sebelum Perkawinan Antara Remaja Kota dan Remaja Desa Di Daerah Sumatera Utara*. Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Purwani Trangewesti. (1992). *Sumber Daya Keluarga dan Kompetensi Sosial pada Remaja Penyalahgunaan Narkotika dan Remaja bukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Rachman Hermawan. (1988). *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco.
- Rakhmat, J. (1988). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.
- RetnoIndaryati. (1992). *Hubungan antara Suasana Rumah dengan Perilaku Negatif Remaja di Sekolah*. Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Rozak Abdul dan Sayuti. (2006). *Remaja dan bahaya Narkoba*. Jakarta : Prenada.
- Sarwono, WS. (1992). *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.
- Simanjuntak, B. (1981). *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Singgih D. Gunarso. (1993). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sri Handayani. (2011). *Pengaruh Keluarga, Masyarakat dan Pendidikan terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program studi Pengkajian Ketahanan Nasional.
- Willis, S. (2008). *Remaja dan Masalahnya Mengupas berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.
- Yatim, D.I. (1991). *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika*. Jakarta: Arcan.

Sikap Pembauran Sosial dan Prasangka Etnis dalam Masyarakat Multikultural

Social Attitude Integration and Ethnic Prejudice in Multicultural Society

Trilaksmi Udiati¹ dan Sunit Agus Tri Cahyono²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial,
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telpn (0274) 337265, Fax (0274) 373530.

¹Email: <tudiati@yahoo.com.> HP 081328464707. ²E-mail <sunit_atc62@yahoo.com.> HP 081215173663.

Diterima 18 Maret, diperbaiki 6 April, disetujui 16 Mei 2016.

Abstract

This research to describe social attitude integration and ethnic prejudice in multicultural society. The research took place in Yogyakarta Municipality and Sleman Regency, Yogyakarta Special Province, based on consideration that the location resided by families of multicultures (heterogen), prone to interethnic conflict and brawl. Data gathering technique were interview and observation, respondents were 50 people of each location, whole was 100 respondents. Data analysis was qualitative-descriptive technique. The research showed that 79 percent respondents having social integration attitude, 21 percent having ethnic prejudice. The prevention against widening and deteriorating conflict, flaring up, social brawl are to enhance understanding, consiousness, and benefiting pluralism or various cultures as potensial resources, strength for joint progress. Social dialogue facility and communal activity by government and community need to be done. To the Directorate of Social Protection for Social Disaster Victims (PSKBS), General Directorate of Social Protection and Assurance, The Ministry of Social Affairs, need to hold a program on enhancing communal capacity (family) through socialization, education, and training of social harmony management (social integration) to prevent social conflict, set up interethnic community forum that can fill pluralism value so that families and community resilience can be realized.

Keywords: *social integration; community; multicultures*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap pembauran sosial dan prasangka etnis dalam masyarakat multikultural. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri atas keluarga-keluarga multikultural (heterogen), berpotensi rawan konflik antaretnis dan kerusuhan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, dengan responden di setiap lokasi 50 orang, sehingga semua 100 responden. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa 79 persen responden memiliki sikap pembauran sosial dan 21 persen memiliki prasangka etnis. Pencegahan meluasnya atau berkembangnya prasangka etnis yang memicu konflik, gejala, kerusuhan sosial adalah peningkatan pemahaman, penyadaran dan memanfaatkan kemajemukan atau keanekaragaman budaya sebagai sumber potensi, kekuatan untuk kemajuan bersama. Fasilitasi dialog sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan pembauran sosial oleh pemerintah bersama masyarakat perlu dilakukan. Kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial perlu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas masyarakat (keluarga) melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan manajemen keserasian sosial (pembauran sosial) yang diharapkan dapat mencegah dan mengeliminir konflik sosial, pembentukan forum komunitas antaretnis yang dapat menanamkan nilai keberagaman, sehingga terwujud ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *pembauran sosial; masyarakat; multikultural.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan terdiri dari rangkaian kepulauan yang memiliki banyak kelompok suku, etnis dan kebudayaan

beragam. Keragaman budaya bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi benih konflik sosial dan apabila dikelola dengan baik merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi modal

ketahanan sosial. Oleh karena itu, pluralisme suku, etnis, dan agama perlu dipertahankan. Pada era globalisasi dengan kemajuan bidang transportasi dan teknologi informasi modern menjadikan tidak terbatasnya ruang dan waktu. Kondisi ini berpotensi munculnya komunitas multietnis (masyarakat heterogen) di berbagai daerah. Hubungan antaretnis dan antaragama sering menimbulkan pertentangan antara etnis satu dengan etnis lain, antara penduduk pribumi dan non-pribumi atau pendatang dan penduduk asli, disebabkan faktor persaingan memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan kesempatan politik yang didasari oleh rasa kesukuan atau golongan.

Berdasar data Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terjadi peningkatan eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat. Konflik terjadi akibat benturan dari berbagai kepentingan yang dilakukan antarkelompok masyarakat, yang berdampak langsung pada terganggunya keberlangsungan pembangunan nasional. Kasus konflik tercatat, tahun 2010 terjadi 93 kasus, tahun 2011 terjadi 77 kasus, dan 2012 terjadi 128 kasus, tahun 2013 hingga awal September 53 kasus. Tahun 2010 hingga September 2013, tercatat 351 kasus, baik kasus konflik yang bernuansa SARA, bentrokan warga dengan organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antarmassa pendukung calon kepala daerah, maupun aksi massa terkait sengketa pertanahan.

Beberapa konflik bernuansa suku, agama, ras, golongan, kedaerahan, dan budaya cenderung meningkat seperti konflik antarsuku di Kalimantan Barat dan Tengah merupakan konflik personal yang menyangkut sentimen etnis Dayak dengan etnis Madura. Temuan hasil penelitian Puslitbang PKS tahun 2000, diketahui bahwa untuk kasus konflik Kalimantan Barat faktor budaya lebih besar peranannya sebagai penyebab konflik antarkelompok etnis, baik antara etnis Madura dengan Dayak maupun antara Madura dengan Melayu (dalam M. Nuryana, 2003).

Kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah, ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, dipicu oleh pembakaran sebuah rumah milik penduduk asli Dayak yang dilakukan Orang Madura. Kerusuhan tersebut berakar pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan perusakan besar-besaran sumber alam di provinsi tersebut, menewaskan 500 orang dan menyebabkan 80.000 orang terpaksa meninggalkan rumah.

Konflik sosial antaretnis Jawa (pribumi) dan Tionghoa (Cina) juga di Surakarta, dipicu adanya peristiwa kecil antara pengendara sepeda yang pribumi dengan pejalan kaki beretnis Cina. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi perkeltarian antara etnis Cina dan Pribumi, dan terjadi pembakaran terhadap pertokoan milik etnis Cina. Konflik antaretnis Jawa dan Cina di Surakarta berawal pada masa penjajahan kolonial, etnis Cina dimasukkan secara paksa ke dalam masyarakat Jawa, sehingga benturan kebudayaan antara Cina dan Jawa tidak dapat dihindarkan. Secara ekonomi etnis Cina lebih berhasil dibandingkan etnis pribumi, sehingga mereka menjadi sasaran sentimen primordial oleh etnis pribumi. Bentuk dari manifestasi konflik ini adalah perusakan, pembakaran, dan konflik fisik yang dilakukan oleh etnis pribumi kepada etnis Cina. Perusakan dan pembakaran dilakukan pada toko dan fasilitas pribadi milik etnis Cina.

Dampak konflik sosial, secara nyata langsung dialami masyarakat terutama kaum wanita, anak-anak ikut mengalami traumatik kehilangan orang yang dicintai, cacatan, musnahnya harta benda masyarakat dan aset publik serta rusaknya tatanan pranata sosial yang mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsian sejumlah warga. Data kerugian kerusuhan Mei 1998 di Kota Surakarta sebagai berikut. Perkantoran (56 unit), dan swalayan (27 unit), toko (217 unit), rumah makan (12 unit), showroom motor dan mobil (24 unit), tempat pendidikan (1 unit), pabrik (8 unit), mobil dan truk (287 unit), sepeda motor (570 unit), bus (10 unit), gedung bioskop (2 unit), dan hotel (1 unit). Keseluruhan kerugian konflik mencapai 457 milyar (Wibowo, 1999, Kompilasi

data Korem dan Pemerintah Daerah Solo).

Dalam mengatasi konflik tersebut, salah satu upaya pendekatan preventif melalui pembauran sosial semua struktur dan lapisan masyarakat di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah berperan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan pascakonflik. Peran masyarakat dalam pembauran sosial diawali dari keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil yang merupakan lingkungan hidup pertama dan utama bagi anggota keluarga, serta sebagai embrio keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masyarakat multikultural, keluarga terjadi proses sosialisasi pertama, berupa proses penanaman nilai, norma keluarga, dan masyarakat yang melembaga. Nilai dan norma tersebut berpengaruh langsung terhadap perkembangan kepribadian, pikiran, sikap, dan perilaku anggota keluarga sebagai individu sebelum terjun ke masyarakat. Penanaman nilai multikultural dalam keluarga dan menghasilkan pandangan bahwa terdapat variasi budaya dalam kehidupan masyarakat. Hasilnya adalah terjadinya kesadaran adanya kesetaraan (equalitas) budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan entitas budaya lain tidaklah dalam suasana bertanding untuk memenangkan pertarungan (Nur Syam, 2009).

MC. Keachie dan Dayle (dalam Rohmiati, 2011) mendiskripsikan, perilaku manusia tidak lepas dari kebudayaan tempat dia dibesarkan. Manusia dengan kebudayaan yang berbeda akan menanggapi lingkungan dengan cara berbeda pula. Oleh karena itu, kebudayaan dan adat istiadat yang terdapat pada suatu etnik tertentu akan mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota keluarga. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi secara efektif efisien dalam menumbuhkan, menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat (kesetiakawanan sosial, solidaritas, toleransi, keguyuban atau kebersamaan). Selain itu, keluarga membentuk sikap perilaku anggotanya untuk mendukung terwujudnya pembauran sosial. Keluarga memiliki peran sangat penting dan berfungsi sebagai pencegahan prasangka antar-

etnis dalam upaya mewujudkan integritas sosial dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur. Penanaman nilai multikulturalisme pada keluarga dapat menghasilkan sikap dan pandangan, bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat.

Realitas menunjukkan bahwa, keluarga yang hidup dalam komunitas masyarakat multikultur dan multi-etnis masyarakat heterogen terutama mereka yang tinggal di perkotaan dan atau dalam suatu kompleks perumahan. Mereka mempunyai cara hidup, tradisi, adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mencerminkan adanya perbedaan satu dengan yang lainnya antarsuku bangsa terutama golongan sosial luar Indonesia. Yogyakarta sebagai kota pariwisata, pelajar, industri dan perdagangan berdampak pada mobilitas geografis penduduk yang berakibat semakin intensif komunikasi dan interaksi sosial sesama warga kota tanpa mengenal asal usul suku dan etnis. Berdasar pemikiran tersebut, dilakukan penelitian tentang sikap pembauran sosial dan prasangka etnis keluarga dalam masyarakat multikultural dengan rumusan masalah, bagaimanakah sikap pembauran sosial dan prasangka etnis keluarga dalam masyarakat multikultural? Tujuan penelitian mendeskripsikan sikap pembauran sosial dan prasangka etnis dalam masyarakat multikultural.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan sikap pembauran sosial dan prasangka etnis dalam masyarakat. Untuk memperjelas pengertian dan membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka yang dimaksudkan dengan sikap pembauran keluarga adalah kesediaan anggota keluarga (ayah atau ibu) menerima etnis lain dalam lingkungan keluarga, ketetanggaaan, pergaulan, organisasi, pekerjaan, pemilihan teman hidup, dan perkawinan. Prasangka etnis adalah prasangka negatif (*prejudice*) individu terhadap etnis lain yang meliputi aspek kepribadian, konflik kompetisi, kecemburuan sosial, etnosentrisme norma kultural, frustrasi, dan penilaian

terlalu ekstrim. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena merupakan daerah yang memiliki masyarakat heterogen.

Populasi penelitian ini adalah keluarga (ayah atau ibu) yang tinggal di daerah multietnis dan multikultur yang potensi rawan konflik dan kerusuhan. Di setiap lokasi penelitian, responden dipilih 50 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 100 orang. Responden dipilih dengan pertimbangan individu dari keluarga yang dapat mewakili masing-masing etnis seperti: Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Dayak, Banjar, Bugis, Minahasa, Ambon, Papua, Cina Tionghoa, di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data terhadap responden menggunakan wawancara dengan panduan wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran sikap pembauran sosial dan prasangka etnis keluarga dalam masyarakat multikultura (Suharsimi Arikunto, 2000). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan mendeskripsikan data yang terkumpul sesuai fakta yang ada di lapangan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dimaknai melalui persentase dan disimpulkan untuk dipakai sebagai bahan penyusunan saran dan tindakan (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996).

Aspek kajian pada penelitian ini meliputi: Pertama, sikap pembauran sosial keluarga yang dilihat dari aspek kesediaan anggota keluarga: Menerima etnis lain sebagai kenalan biasa dalam lingkungan tetangga; Menerima etnis lain sebagai teman, sahabat dalam lingkungan pergaulan; Menerima etnis lain sebagai sesama anggota dalam organisasi; Menerima etnis lain sebagai teman bekerja dalam lingkungan pekerjaan; Menerima etnis lain sebagai teman hidup dari anggota keluarga; Menerima etnis lain sebagai ipar, saudara dalam hubungan perkawin. Kedua, prasangka etnis yang dilihat dari aspek: Kepribadian otoriter; Dogmatis yang ditandai prasangka negatif, tidak toleran, loyalitas terhadap kelompok tinggi, rentan terhadap perubahan, mendukung figur otoriter, dan tindakan agresif.

Prasangka negatif yang disebabkan oleh frustrasi sehingga mencari objek lain sebagai kambing hitam atas kegagalan yang dialami. Prasangka negatif karena adanya konflik, kompetisi memperebutkan suatu pemuas kebutuhan (akses sumber) yang terbatas. Prasangka karena adanya anggapan bahwa salah satu kelompok memiliki status sosial yang lebih rendah atau lebih tinggi dibanding kelompok lain, dan merasa perlakuan yang diberikan padanya bersifat diskriminatif (kecemburuan sosial). Prasangka timbul karena adanya kategorisasi seseorang menempatkan dan mengidentifikasi diri dalam kelompok etnis tertentu (etnosentrisme). Prasangka timbul karena norma atau budaya kelompok yang mengajarkan individu untuk berprasangka kepada kelompok lain (norma kultural). Prasangka timbul akibat penilaian yang terlalu ekstrim dan menggeneralisasi atau kesan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang dan seluruh anggota dari etnis tertentu (Cicin Ruh Winedar dalam Taufik, 2003).

C. Sikap Pembauran Sosial Keluarga dan Prasangka Etnis di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang paling dasar, utama dan pertama dalam proses tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, sosial, psikologis dan mental spiritual. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group* atau *nuclear family* (keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak mereka) yang melahirkan individu dalam berbagai macam bentuk kepribadian di masyarakat (Hendra Priatna, 2012). Dalam keluarga, anak-anak (anggota keluarga) mendapatkan segi utama dari kepribadian, perilaku, budi pekerti, sikap, dan reaksi emosional. Oleh karena itu, keluarga merupakan perantara diantara masyarakat luas dengan individu. Berkait hal tersebut, sikap perilaku pembauran sosial keluarga tercermin dari sikap perilaku individu (anggota keluarga)

terhadap pencegahan prasangka etnis. Strickland menjelaskan, bahwa sikap adalah predisposisi atau kecenderungan untuk memberikan respon secara kognitif (pemikiran, keyakinan, ide), afektif (perasaan, emosi) dan konatif (perilaku, kecenderungan bertindak) yang diarahkan pada suatu obyek, pribadi dan situasi khusus dalam cara-cara tertentu. Komponen tersebut secara bersama merupakan penentu bagi jumlah keseluruhan sikap seseorang (Fattah Hanurawan, 2010).

Berkait hal tersebut menurut Eagly dan Chaiken, bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk puas atau tidak puas, positif atau negatif, suka atau tidak suka terhadap suatu obyek sikap (Fattah Hanurawan, 2010). Mednick, Higgins dan Kirschanbavon (dalam Gabriella Aniwaty, 1989) mengatakan, bahwa sikap dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: pengaruh seseorang seperti norma kebudayaan, karakter kepribadian individu seperti keyakinan, minat, perhatian, pengalaman pribadi dan informasi yang selama ini diterima oleh individu, interaksi sosial. Sikap perilaku tersebut merupakan produk dari proses sosialisasi atau pendidikan dari fungsi keluarga. Menurut Horton dan Hunt (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011), mendeskripsikan tujuh fungsi keluarga yaitu fungsi: pengaturan keturunan, sosialisasi atau pendidikan, ekonomi (unit produksi), pelindung, penentuan status, pemeliharaan dan fungsi afeksi.

Dalam konteks penelitian ini, keluarga memiliki fungsi sosialisasi atau pendidikan bagi anak, dalam arti menanamkan nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat dan mematuhi norma yang senyatanya baik dan memiliki standar tentang nilai yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Proses penanaman nilai, norma keluarga dan masyarakat membentuk pola hidup dan perilaku yang mempengaruhi kepribadian untuk melakukan hubungan sosial (jaringan sosial) dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam keluarga perlu transformasi nilai budaya antargenerasi sehingga mampu melestarikan nilai sosial budaya yang positif (kesetiakawanan sosial, toleransi, solidaritas, non

diskriminasi, menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati, persamaan hak, tolong menolong, saling menyayangi, gotong royong, pembauran dengan etnis lain, persatuan dan kesatuan), perlu ditanamkan ketaatan mematuhi norma agama, hukum, sosial termasuk pemahaman dan penerapan asimilasi budaya atau pembauran sosial. Dalam konteks penelitian ini, pembauran (asimilasi) adalah proses penyatu gabungan golongan atau asimilasi (pembauran) merupakan salah satu dari pola antarmubungan kelompok masyarakat. Asimilasi merupakan proses pemersatu kelompok dimana kelompok yang dipersatukan memiliki perbedaan kultur terdorong untuk saling menyesuaikan (dalam Carolina Nitimiharja dkk, 2007). Asimilasi atau pembauran dilaksanakan dalam lima bidang kehidupan, yaitu ekonomi, politik, kultural, sosial (pergaulan), keluarga (perkawinan). Soerdjono Soekanto mendefinisikan asimilasi (pembauran) sebagai suatu proses yang mencakup berbagai golongan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda, untuk waktu lama secara kontinyu dan intensif saling bergaul, sehingga kebudayaan golongan-golongan manusia berubah wujud dan menjadi suatu kebudayaan campuran, disebut pembauran atau asimilasi. Dalam proses tersebut ada golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Pembauran hanya akan terjadi jika diantara golongan tadi mayoritas dan minoritas, terpancar keluar sikap toleransi dan simpati satu terhadap yang lain (Soekanto, 2011).

Milton Gordon (dalam Wirawan, IB, 2012) menguraikan konsep asimilasi menjadi tujuh model proses sosial yang menyangkut kelompok masyarakat setempat (mayoritas) dan pendatang (minoritas) dalam interaksinya satu dengan yang lain: Pertama, asimilasi kebudayaan atau perilaku (akulturasi), yaitu pendatang atau golongan minoritas mengubah pola kebudayaannya dan menyesuaikan dengan budaya setempat. Kedua, asimilasi struktural, yaitu masuknya golongan minoritas secara besar-besaran ke dalam kelompok, perkumpulan, dan lembaga dalam masyarakat pada tingkat kelompok primer golongan mayoritas. Ketiga, asimilasi perkawinan

(amalgasi), pendatang mengadakan perkawinan campuran secara besar besaran. Keempat, asimilasi identifikasi, pendatang mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dengan penduduk asli. Kelima, asimilasi sikap, antara kelompok pendatang dengan penduduk asli tidak mempunyai sikap prasangka. Keenam, asimilasi penerimaan perilaku, tidak ada diskriminasi. Ketujuh, asimilasi warga negara (*civic*), apabila kelompok pendatang tidak mengalami konflik nilai, status sosial, ekonomi dan kekuasaan.

Mengacu beberapa pendapat di atas, yang dimaksud pembauran (asimilasi) adalah suatu proses peleburan (penyatuan) dari kemajemukan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) atau dari kebudayaan yang berbeda berubah wujud menjadi kebudayaan campuran. Pembauran sosial terjadi melalui proses hubungan sosial yang intensif dan kontinyu dalam waktu yang cukup lama yang terpancar dalam wujud pikiran, perasaan, rasa kebangsaan yang sama, sikap toleransi, simpati, saling menghargai antargolongan sehingga tidak ada diskriminatif dan prasangka antaretnis. Dalam pola hubungan antarkelompok masyarakat, pembauran sosial terdapat diberbagai bidang kehidupan antara lain: ekonomi, politik, kultural, sosial (kekeluargaan perkawinan). Pembauran sosial yang tidak terjadi konflik nilai, status sosial, ekonomi dan kekuasaan, dapat mewujudkan integrasi sosial dan tercipta ketahanan sosial masyarakat. Pembauran sosial sebagai salah satu alternatif terwujudnya integrasi sosial dalam upaya penanganan konflik sosial (bencana sosial) antar kelompok masyarakat, baik dalam skala lokal maupun nasional, perlu pemantapan sikap pembauran sosial, integrasi sosial pada tingkatan unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga yang bersifat majemuk.

Kenyataan menunjukkan, bahwa pembauran sosial tidak selalu berjalan dengan mulus, terdapat faktor-faktor penghambat, antara lain: Perbedaan ciri-ciri badaniah; Perasaan kelompok (*in group feeling*) yang sangat kuat; Ekonomi yang tinggi menyebabkan timbulnya sikap tinggi hati; Terisolirnya kehidupan suatu kelompok dalam

masyarakat; Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan. Perasaan takut terhadap kekuatan serta kebudayaan yang dihadapi; Perasaan lebih tinggi pada kebudayaan sendiri dari orang lain. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa; Adanya perbedaan kepentingan (Soekanto, 2011).

Menurut Umar Hasyim terhambatnya proses pembauran pada etnis Cina di Indonesia dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Sikap eksklusif orang-orang Cina, adanya superioritas yang tinggi, semangat materialisme yang serakah, enggan berasimilasi (M. Rajab Lubis. dalam Soekanto, 2011). Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan eksplosifnya hubungan etnis Cina (keluarga Tionghoa dengan keluarga pribumi), tempat tinggal orang Cina di banyak tempat selalu bergerombol disatu tempat tersendiri, yang disebut Pecinan sehingga memberi kesan eksklusif, sehingga ada suatu kesan mereka enggan menerima kehadiran orang lain di tempat tinggalnya, memicu terjadinya prasangka antaretnis dengan masih adanya peristiwa-peristiwa anti Cina di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembauran sosial kedua pihak, pada etnis Cina dihilangkan sikap eksklusif, superioritas dan kesediaan berasimilasi, sedangkan golongan pribumi (mayoritas) bersedia menerima etnis Cina menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Masalah pembauran bukan hanya masalah WNI keturunan Tionghoa melainkan masalah pembauran bangsa (*nation-building*), membina suku-suku bangsa Indonesia baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat yang bhineka ini menjadi bangsa Indonesia yang bersatu bulat dan homogen, tidak lagi mempertentangkan asalnya tetapi memperkaya nasionalisme Indonesia dengan berbagai kelebihan unsur-unsur budaya yang sejak dulu dimiliki bangsa Indonesia. Faktor pendukung terjadinya pembauran sosial seperti yang dikemukakan Soekanto adalah sebagai berikut. Toleransi antarkelompok manusia (keluarga) dengan kebudayaan yang berbeda. Kesempatan dibidang ekonomi yang seimbang. Sikap menghargai orang asing atau kebudayaan-

nya. Sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Perkawinan campuran (*amalgamation*). Adanya musuh bersama dari luar (Soekanto, 2011).

Pengenalan nilai luhur yang positif seperti pembauran sosial yang ditanamkan didalam keluarga memungkinkan seorang anak untuk mengenal dunia sekelilingnya dengan baik. Keluarga merupakan tempat untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri, bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungan sosial, serta mengembangkan potensi secara optimal, dengan demikian keluarga dapat berperan sebagai pencegahan prasangka etnis, mencegah terjadinya konflik antaretnis dan mencegah terjadinya kerusuhan sosial. Keluarga sebagai unsur yang aktif partisipatif dalam upaya pembinaan lingkungan sosial yang tenteram dan sejahtera, sehingga dapat terwujud ketahanan sosial keluarga serta masyarakat pada umumnya.

Ketahanan sosial masyarakat adalah suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik (Kementerian Sosial RI, 2006), ketahanan sosial masyarakat diawali dari ketahanan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga dalam penyadaran sosial tentang pembauran sosial, prasangka antaretnis, sikap keluarga dalam pembauran sosial dalam rangka pemantapan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat. Ketahanan keluarga akan terwujud apabila keluarga mampu melindungi anggotanya (individu) dari gelombang-gelombang perubahan sosial, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ketahanan keluarga dapat menumbuhkan pranata sosial, institusi sosial dan jaringan sosial (pola kebudayaan keluarga, masyarakat) sebagai sistem yang dapat mengatur keseimbangan yang dapat menciptakan kehidupan sosial masyarakat harmonis, damai, tenteram, aman dan nyaman.

Proses sosialisasi dalam keluarga dapat membentuk identitas etnik dalam diri individu, menganggap identitas yang sama sebagai *kami* (*in group*) dan mereka (*out group*). Dalam proses pembentukan identitas etnis maka *in group* adalah kelompok etnisnya, sedangkan *out group* adalah kelompok etnis lain. Individu dalam perkembangannya disadarkan bahwa ia masuk dalam kelompok etnik tertentu, ia juga akan belajar sikap etnik sendiri dan belajar sikap terhadap kelompok etnik lain. Hal ini akan memberi suatu persepsi terhadap kelompok etnik lain dan kemungkinan bisa terjadi salah penilaian yang berkembang menjadi prasangka, merupakan potensi konflik antar sukubangsa. Prasangka merupakan sikap individu yang tidak baik dan dapat dianggap sebagai suatu predisposisi untuk mempersepsi, berpikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara yang menentang atau menjauhi kepada anggota kelompok lain. New Comb, dkk (dalam Rohmiati, 2011) menyatakan, bahwa individu yang berprasangka memiliki sikap tertentu terhadap individu yang lain bukan karena karakteristik kepribadian individu tersebut yang unik, melainkan lebih berdasar keanggotaan individu yang menjadi sasaran prasangka dalam kelompok tertentu. Prasangka etnis adalah penilaian negatif yang tidak adil, tidak rasional, dan stereotip yang ditujukan kepada etnis lain di luar kelompok etnisnya, keluarga memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan prasangka antaretnis.

Beberapa ahli antara lain: Cicin Ruruh Winular (1999), berdasarkan atas teori-teori Tajfel dan Turner (1997), Baron dan Byrne (2000), Brehar dan Kassin (1990) Watson dan Trigerthan (1984) serta Backman dan Second (1974), (dalam Rohmiati, 2011) mengklasifikasi aspek-aspek prasangka, sebagai berikut. Aspek kepribadian, otoriter, tidak toleran (*dogmatis*), dan kekakuan terhadap nilai yang konvensional, selalu berprasangka. Aspek frustrasi dan *Scapegoating*. Prasangka yang disebabkan oleh frustrasi, mencari objek lain sebagai kambing hitam yang disalahkan atas kegagalan yang dialami. Aspek konflik, disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan

pemuas kebutuhan yang terbatas yang berlanjut pada pikiran negatif terhadap kelompok lain. Aspek kecemburuan sosial, disebabkan adanya anggapan bahwa salah satu kelompok memiliki status sosial yang lebih rendah atau tinggi dibanding kelompok lain. Aspek etnosentrisme, berdasar kategori sosial seseorang menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dalam kelompok etnis tertentu dan menilai unsur kebudayaan lain dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri. Aspek norma kultural, prasangka timbul karena norma atau budaya kelompok yang mengajarkan individu untuk berprasangka kepada orang atau kelompok lain. Aspek penilaian yang terlalu ekstrim dan menggeneralisir. Prasangka terjadi akibat penilaian terlalu ekstrim menggeneralisasikan suatu pengalaman yang menyakitkan dan kesan tidak menyenangkan terhadap seseorang dari etnis tertentu kepada seluruh anggota dari etnis tersebut.

Menurut Mar'at, dalam keterlibatannya (interaksi sosial) prasangka dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Pengaruh pendidikan anak oleh orangtua, yaitu pengaruh nilai dan norma yang diajarkan orangtua terhadap perilaku anak yang nantinya menentukan konsep prasangka dan stereotif pada anak atau keluarga. Pengaruh kepribadian. Pembentukan prasangka juga dipengaruhi oleh lingkungan dalam masa perkembangan. Pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan dan status semakin baik dalam meredusir prasangka. Peranan kelompok dan nama-nama kelompok akan mempengaruhi. Peranan komunikasi. Komponen kognitif, afektif dan sikap banyak dipengaruhi oleh media komunikasi. Komunikasi *face to face* mempertinggi perubahan dalam pembentukan konsep prasangka dan *stereotype*. Peranan hubungan, merupakan media meredusir atau mempertinggi pembentukan prasangka (Rohmiati, 2011).

Dalam penelitian ini sikap pembauran sosial keluarga meliputi aspek kesediaan anggota keluarga menerima etnis lain dalam lingkungan (keluarga, ketetanggaan, pergaulan, organisasi, pekerjaan, pemilihan teman hidup, perkawinan). Prasangka antaretnis (meliputi aspek kepriba-

dian, frustrasi, konflik kompetisi, kecemburuan sosial, etnosentrisme norma kultural, dan penilaian terlalu ekstrim. Hasil penelitian diperoleh data tentang sikap pembauran sosial keluarga dan prasangka etnis sebagai berikut.

1. Sikap Pembauran Sosial Keluarga:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar (73 persen) tanpa memperdulikan asal usul etnis dalam bergaul dengan tetangga. Responden menyadari hidup dalam komunitas kemajemukan (keberagaman), hidup berdampingan dengan berbagai etnis atau dengan etnis lain. Sikap responden saling menerima dan menghargai antaretnis dan antarbudaya karena ingin mewujudkan terjadinya hubungan yang serasi, terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bertetangga. Mereka beranggapan bahwa tetangga dianggap sebagai saudara, apabila ada kesusahan tetangga yang lebih dahulu menolong. Mereka tidak memperdulikan asal-usul etnis (suku) dalam bergaul dengan tetangga tetapi lebih melihat dari aspek karakteristik kepribadian individu, sedangkan sisanya sebesar (27 persen) bersikap ragu-ragu bahkan tidak setuju apabila bergaul dengan tetangga tanpa memperdulikan asal-usul etnis (suku) karena khawatir dalam bergaul tidak bisa menerima perbedaan budaya (gaya hidup) etnis lain. Sikap responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju bangga terhadap etnis sendiri daripada etnis lain dalam bergaul dengan tetangga sebesar (68 persen), karena lama berdampingan dalam bertetangga. Mereka merasakan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, berinteraksi sosial secara intensif satu sama lain dan kontinyu, sehingga timbul rasa kebersamaan, sikap toleransi, simpati bahkan timbul rasa empati dan tolong menolong. Hal ini timbul adanya pendidikan tentang nilai-nilai pembauran sosial dalam keluarga yang telah tertanam pada anggota keluarga. Selebihnya, responden yang bersikap ragu-ragu 19 persen, bersikap setuju dan sangat setuju 13 persen merasa bangga terhadap etnis sendiri daripada etnis lain dalam bertetangga. Temuan di lapangan, mereka memiliki perasaan kelompok etnisnya sangat kuat dan ada yang

karena pengetahuan mengenai kebudayaan dan nilai pembauran sosial. Gaya hidup berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dibentuk dalam keluarga melalui proses pendidikan, sosialisasi nilai-nilai sosial budaya, religiusitas dan kemanusiaan. Dalam proses sosialisasi seseorang mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola nilai dan tingkah laku yang diajarkan oleh kedua orang tuanya yang membentuk gaya hidup seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai gaya hidup yang merupakan pencerminan dari budaya etnis (suku) yang dianut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar tidak setuju bahkan sangat tidak setuju 72 persen malas bergaul dengan tetangga dari etnis lain karena perbedaan gaya hidup. Mereka menyadari masing-masing etnis (suku) memiliki gaya hidup sendiri dan atau berlainan satu sama lain. Adanya sikap toleransi dan menerima perbedaan gaya hidup etnis lain yang dianggap sebagai keanekaragaman budaya dalam bertetangga, 22 persen menyatakan ragu-ragu dan 6 persen menyatakan setuju malas bergaul dengan tetangga etnis lain, karena perbedaan gaya hidup.

Pembauran sosial dapat dilakukan dengan menerima etnis lain sebagai teman *ngobrol* (egaliter). Kesiediaan menerima etnis lain tersebut karena kedua pihak memiliki sikap toleransi, simpati dan empati terhadap orang lain tanpa memandang asal-usul etnis. Data lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sebesar (71 persen) mengatakan setuju dan sangat setuju menerima etnis lain sebagai teman *ngobrol*. Hal ini ditunjukkan adanya saling men-curahkan isi hati, sumbang saran, saling tolong menolong dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di antara mereka. Hasil wawancara, mengungkapkan bahwa kesiediaan menerima etnis lain sebagai teman *ngobrol* terwujud karena melembaganya nilai pembauran sosial tersebut di atas ke dalam individu (anggota keluarga) yang selalu ditanamkan oleh keluarga responden. Sisanya 21 persen menyatakan ragu-ragu dan 8 persen, mengatakan tidak setuju menerima etnis lain sebagai teman *ngobrol* karena ada perbedaan pandangan dan gaya hidup yang tidak bisa

ditolerir. Pandangan hidup merupakan aspek kognitif (pemahaman) adalah komponen yang terdiri dari keyakinan individu terhadap obyek tertentu. Pandangan hidup tentang pembauran sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma yang diyakini berlaku dalam keluarga, dan masyarakat. Sikap responden enggan bergaul dengan etnis tertentu (eksklusif) karena perbedaan pandangan hidup terungkap, yaitu sebagian besar (72 persen) mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Mereka mengemukakan perbedaan pandangan hidup tidak mengurangi jalinan interaksi sosial dengan etnis lain. Masing-masing pihak bersikap toleran, saling menghargai dan saling menghormati kebudayaan etnis lain. Selebihnya, responden mengatakan ragu-ragu (13 persen) dan menyatakan setuju enggan bergaul dengan etnis lain karena perbedaan pandangan hidup (15 persen) karena merasa tidak nyaman apabila dilakukan. Kesiediaan anggota keluarga menerima etnis lain dalam pergaulan hidup, dapat dilihat melalui sikap responden tidak mau bergaul dengan etnis lain karena ada pengalaman tidak menyenangkan, menunjukkan sebagian besar responden, yaitu sebesar (73 persen) mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak mau bergaul dengan etnis lain karena ada pengalaman tidak menyenangkan. Responden mengatakan tidak trauma dengan pengalaman tidak menyenangkan yang dialami dan tidak berprasangka negatif dengan etnis lain. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa sikap pembauran sosial keluarga cukup baik. Selebihnya, responden (21 persen) mengemukakan ragu-ragu dan sebesar (6 persen) mengatakan setuju, bahkan sangat setuju tidak mau bergaul dengan etnis lain karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti adanya sikap eksklusif dan superioritas yang tinggi dari etnis lain.

Pembauran sosial keluarga, melalui kesiediaan anggota keluarga menerima etnis lain sebagai sesama anggota dalam organisasi. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan, bahwa sebagian besar responden (71 persen) berpendapat tidak setuju sampai sangat tidak setuju, akan mengundurkan diri apabila mayoritas anggota or-

ganisasi dari etnis tertentu. Mereka beranggapan bahwa dalam berorganisasi terdapat kesamaan tujuan, visi, misi organisasi tanpa melihat asal-usul etnis lain atau etnis tertentu. Selebihnya, responden (17 persen), menyatakan ragu-ragu dan sebesar (12 persen) mengemukakan setuju akan mengundurkan diri apabila mayoritas anggota organisasi berasal dari etnis tertentu karena khawatir mendapat perlakuan diskriminatif dalam memperoleh haknya. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan, bahwa sebagian besar (71 persen), mengemukakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju tidak memasukkan anak pada sekolah apabila siswanya mayoritas dari etnis tertentu. Responden menyadari masalah pembauran bukan hanya masalah etnis tertentu, melainkan masalah pembauran bangsa dan mereka bagian dari suatu bangsa, sehingga tidak menjadi masalah memasuki sekolah yang siswanya mayoritas dari etnis tertentu. Pengalaman pribadi dapat mempengaruhi sikap individu terhadap orang lain. Dalam konteks ini, pengalaman pribadi tidak menyenangkan yang dialami dari etnis lain menyebabkan responden menyetujui tidak mau masuk suatu sekolah apabila siswanya mayoritas dari etnis tertentu yaitu sebesar (10 persen), dan selebihnya (19 persen) bersikap ragu-ragu atau tidak bisa menentukan karena anggota keluarga belum pernah mengalami sekolah di tempat-tempat yang terdapat mayoritas etnis tertentu.

Kesediaan anggota keluarga menerima etnis lain sebagai teman bekerja di ungkap sikap responden merasa tidak senang apabila ditempatkan kerja mayoritas dari etnis tertentu. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan, bahwa sebagian besar (69 persen) menyatakan tidak setuju hingga tidak setuju, ragu-ragu (22 persen) dan sebesar (9 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju, merasa tidak senang apabila di tempat kerja mayoritas dari etnis tertentu. Dengan adanya mayoritas dari etnis tertentu responden khawatir ada kecenderungan kebijakan di tempat kerja yang diambil akan lebih menguntungkan kelompok tertentu, responden akan mendapat perlakuan tidak adil dan dis-

kriminatif. Terbentuknya sikap tidak mendukung pembauran sosial tersebut dipengaruhi oleh adanya pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyakitkan sehingga membentuk sikap anti terhadap etnis tertentu mayoritas di tempat kerja. Hal ini terlihat, bahwa sebagian besar responden (71 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju mengenai ketidaksukaan bekerja sama dengan etnis lain. Seperti halnya penjelasan terdahulu, responden dalam bekerjasama dalam suatu kegiatan tidak memandang asal-usul etnis lain tetapi lebih melihat dari aspek kepribadian individu. Didukung adanya persamaan budaya dan sikap toleransi serta penyesuaian diri dari etnis lain, kerjasama bisa berlangsung kontinyu. Responden yang menyatakan ragu-ragu (22 persen) dalam bersikap ketidaksukaan bekerjasama dengan etnis lain karena belum pernah bekerjasama dalam waktu lama dengan etnis lain. Selebihnya, (7 persen) responden yang menyatakan ketidaksukaan dengan etnis lain karena didasari adanya perbedaan budaya dan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami.

Kesediaan anggota keluarga menerima etnis lain sebagai sahabat karib atau pacar terungkap pada sikap responden melarang anaknya berpacaran dengan etnis lain. Hal ini terlihat bahwa lebih dari setengah responden (71 persen) mengemukakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju anaknya berpacaran dengan etnis lain. Responden menyadari hidup di Indonesia ada keanekaragaman atau kemajemukan budaya dan etnis, sehingga wajar dalam bergaul atau berpacaran dengan etnis lain. Mereka melihat perbedaan budaya sebagai kekayaan budaya bangsa tidak perlu dipertajam, tetapi perlu perwujudan sikap toleransi dan penyesuaian di antara kedua pihak karena merasa masih satu bangsa Indonesia. Selebihnya, responden (21 persen) yang menyatakan ragu-ragu dan (8 persen) yang menyatakan setuju hingga sangat setuju, melarang anaknya berpacaran dengan etnis lain karena perbedaan budaya dan khawatir tidak adanya penyesuaian diri di antara kedua pihak. Sikap anggota keluarga terhadap pembauran sosial

dapat dilihat melalui kesediaan anggota keluarga menerima etnis lain sebagai sahabat karib atau pacar, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (79 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju apabila anaknya berpacaran dengan etnis lain berarti merendahkan martabat keluarga. Responden memahami dan menyadari sebagai bangsa Indonesia memiliki kesamaan harkat dan martabat serta harga diri, sehingga tidak ada etnis yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari etnis lain. Selebihnya, ada tujuh belas responden (17 persen) yang menyatakan ragu-ragu dan (4 persen) yang menyatakan setuju apabila anak mempunyai pacar dengan etnis lain berarti merendahkan martabat keluarga. Mereka memiliki perasaan lebih tinggi pada kebudayaan sendiri daripada orang lain, di samping karena kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan.

Kesediaan anggota keluarga menerima etnis lain sebagai menantu digali melalui sikap responden apabila anaknya akan menikah dengan etnis lain. Sehubungan dengan hal tersebut, terungkap bahwa lebih dari setengah responden (78 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju apabila anaknya menikah dengan etnis lain. Hal ini terbukti dalam komunitas masyarakat yang terkecil yaitu keluarga lebih mewujudkan nilai-nilai pembauran sosial (asimilasi perkawinan) yaitu melakukan proses penyatuan dari kemajemukan antar etnis atau dari kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan campuran. Selebihnya, responden (19 persen) mengemukakan ragu-ragu dan sebesar (3 persen) menyatakan tidak setuju apabila anaknya menikah dengan etnis lain. Mereka khawatir adanya perbedaan budaya dapat mengakibatkan hubungan suami-istri tidak langgeng atau sering terjadi konflik (ketidakharmonisan keluarga). Kesiapan responden dikucilkan oleh keluarga apabila memiliki menantu dari etnis lain, menunjukkan jawaban yang beragam. Hal ini terungkap, yaitu (41 persen) mengemukakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju siap dikucilkan oleh keluarga bila memiliki menantu dari etnis lain, selanjutnya (49 persen) menyatakan ragu-ragu dan sisanya sebesar (10

persen) mengemukakan setuju siap dikucilkan oleh keluarga apabila memiliki menantu dari etnis lain. Dari data lapangan, terlihat responden memiliki rasa khawatir dikucilkan oleh keluarga besar termasuk orang tua responden, selain itu juga ada budaya tradisi keluarga besar ikut menentukan calon saudara dan menantu ipar.

2. Sikap Prasangka Etnis Keluarga: Prasangka antar etnis dapat dipengaruhi oleh kepribadian individu. Dalam hal ini mengungkap kepribadian individu dilihat dari aspek perbedaan adalah hal yang menarik. Data lapangan menunjukkan, bahwa lebih dari setengah responden (64 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju bahwa perbedaan adalah hal yang menarik dan tidak berprasangka terhadap etnis lain. Berikutnya, (22 persen) responden menyatakan ragu-ragu atau tidak bisa menentukan sikap bahwa perbedaan adalah hal yang menarik. Sisanya, (14 persen) menyatakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut dan mempunyai prasangka terhadap etnis lain yang dipengaruhi oleh aspek kepribadian otoriter, tidak toleran, selalu berprasangka sebagai akibat proses sosialisasi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya yang mengajarkan individu untuk berprasangka kepada etnis lain. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan dalam upaya penegakan prasangka antar etnis. Sikap responden tidak menyukai perubahan kebudayaan di sekitarnya menunjukkan pendapat yang bervariasi. Hal ini terungkap, bahwa (42 persen) responden menyatakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju tidak menyukai perubahan budaya di sekitarnya. Responden (38 persen) menyatakan ragu-ragu dan selebihnya, (20 persen) menyatakan setuju dan sangat setuju tidak menyukai perubahan kebudayaan di sekitarnya. Hal ini dapat dikarenakan mereka memiliki kepribadian kekakuan terhadap nilai-nilai yang konvensional, sangat menghargai tradisi adat istiadat kebudayaannya, bersifat etnosentrisme (mengidentifikasi dirinya ke dalam kelompok etnisnya dan menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan tolak ukur kebudayaannya sendiri)

sehingga sulit untuk melakukan perubahan kebudayaan di sekitarnya. Sikap prasangka antaretnis yang lain yaitu sikap anggota keluarga menghindari bergaul dengan etnis lain karena mengandung resiko. Data lapangan menunjukkan, bahwa lebih dari setengah responden (77 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju menghindari bergaul dengan etnis lain karena mengandung resiko. Mereka tidak berprasangka pada etnis lain karena belum mengenal dan bergaul dalam jangka waktu lama. Selebihnya, (21 persen) responden menyatakan ragu-ragu dan (12 persen) menyatakan setuju, bahkan sangat setuju menghindari etnis lain karena mengandung resiko. Mereka beranggapan lebih baik mencegah daripada mengalami permasalahan dalam bergaul dengan etnis lain, walaupun belum tentu terjadi.

Aspek frustrasi dapat menimbulkan prasangka antaretnis, salah satunya adanya perasaan diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu atau etnis tertentu. Terungkap, bahwa lebih dari setengah jumlah responden (65 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju memiliki perasaan diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu. Selebihnya, (19 persen) responden menyatakan ragu-ragu dan (16 persen) menyatakan setuju dan sangat setuju memiliki perasaan diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu. Perasaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami seseorang sehingga timbul prasangka diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu.

Prasangka etnis di ungkap dari aspek frustrasi dengan melihat sikap anggota keluarga dalam menerima kritik dari etnis lain dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaiki. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan pendapat yang beragam, (61 persen) setuju hingga sangat setuju menerima kritik dari etnis lain dengan lapang dada karena memiliki sikap toleransi dan merasa tidak selalu benar pendapatnya. Selebihnya, (11 persen) menyatakan ragu-ragu dan sebesar (28 persen) menyatakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju menerima

kritik dari etnis lain dengan lapang dada. Mereka beranggapan dirinya paling benar sehingga sulit menerima kritikan dari sekelompok lain dan tidak menolerir tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Hal ini senada dengan pendapat Byrne dan Kasin, Watson dan Trigerthan serta Bachman dan Secord (dalam Cicin Winular, 1999), bahwa seseorang yang mempunyai kepribadian otoriter selalu mempunyai prasangka dan tidak toleran terhadap orang lain terutama etnis lain.

Prasangka antar etnis dilihat dari aspek konflik yang mengungkap perasaan anggota keluarga tidak nyaman tinggal bersama mayoritas etnis tertentu. Dari data lapangan menunjukkan variasi perasaan responden tidak nyaman tinggal bersama mayoritas etnis tertentu, terlihat (59 persen), menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju tidak nyaman tinggal bersama dengan mayoritas etnis tertentu. Mereka menyadari dalam bermasyarakat berhadapan, bergaul dengan etnis lain. Oleh karena itu, harus dapat menyesuaikan diri dengan mayoritas etnis tertentu dalam suatu komunitas bersama. Sedangkan selebihnya, (33 persen) menyatakan ragu-ragu atau bersifat netral dan (8 persen) responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan mayoritas etnis tertentu karena merasa khawatir akan dikucilkan, mendapat perlakuan tidak adil (diskriminasi). Aspek konflik yang mengungkap perasaan anggota keluarga tidak senang apabila etnis tertentu berprestasi tinggi dapat diungkap yaitu lebih dari setengah responden (58 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju merasa tidak senang apabila etnis tertentu berprestasi tinggi, (31 persen) menyatakan ragu-ragu dan (11 persen) responden menyatakan setuju bahkan sangat setuju mereka tidak senang apabila etnis tertentu berprestasi tinggi. Di antara mereka ada yang menyatakan etnis tertentu berprestasi tinggi karena mendapat fasilitas yang lebih baik.

Prasangka antaretnis dilihat dari aspek kecemburuan sosial yang mengungkap sikap ketidaksukaan anggota keluarga pada etnis ter-

tentu karena memperoleh fasilitas yang lebih baik. Dari data lapangan menunjukkan, bahwa responden (56 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju ketidaksukaan pada etnis tertentu karena memperoleh fasilitas yang lebih baik. Selebihnya, responden (32 persen) menyatakan ragu-ragu dan sebesar (12 persen) responden menyatakan setuju, bahkan sangat setuju ketidaksukaan pada etnis tertentu karena memperoleh fasilitas yang lebih baik. Dalam konteks ini, adanya perlakuan tidak adil dan diskriminatif dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Aspek kecemburuan sosial yang diungkap dengan sikap ketidaksukaan anggota keluarga pada etnis tertentu yang memiliki perkumpulan eksklusif yang dapat menghambat pembauran sosial. Perkumpulan eksklusif yang mencerminkan sikap eksklusif etnis tertentu yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada etnis lain. Data mengenai kecemburuan sosial menunjukkan, bahwa sikap ketidaksukaan responden pada etnis tertentu yang memiliki perkumpulan eksklusif cukup bervariasi. Responden (48 persen) menyatakan tidak setuju sampai sangat tidak setuju. Selebihnya, responden (33 persen) menyatakan ragu-ragu dan responden (19 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju sikap ketidaksukaan pada etnis tertentu yang memiliki perkumpulan eksklusif.

Sikap etnosentrisme apabila seseorang menempatkan dan mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok etnis tertentu dan menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan tolok ukur kebudayaannya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan prasangka antaretnis karena beranggapan bahwa etnisnya lebih baik dari etnis lain. Sikap etnosentrisme dilihat dari aspek perkawinan antaretnis yang berbeda tidak akan membawa kebahagiaan. Data perkawinan antaretnis (perkawinan campuran) menunjukkan jawaban responden bervariasi. Hampir setengah responden (60 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju bahwa perkawinan antaretnis yang berbeda tidak akan membawa kebahagiaan. Mereka menerima perkawinan campuran karena tidak berprasangka negatif terhadap etnis lain

dan lebih mengutamakan karakter kepribadian dalam menentukan perjodohan perkawinan dalam keluarga, karena mereka sebelumnya telah mengakui pertemanan dalam waktu yang cukup lama di sekolah. Selebihnya, responden sebesar (19 persen) menyatakan ragu-ragu dan sebesar (21 persen) menyatakan setuju bahkan sangat setuju bahwa perkawinan antaretnis yang berbeda tidak akan membawa kebahagiaan.

Mereka beranggapan perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menimbulkan perceraian. Oleh karena itu, sebisa mungkin menghindari perkawinan perbedaan etnis, apalagi juga perbedaan kewarganegaraan. Etnosentrisme terhadap kebudayaan sendiri merupakan salah satu bagian dari prasangka antaretnis yang dapat dilaksanakan pengaruh nilai dan norma yang diajarkan orang tua terhadap perilaku anak. Untuk melihat sikap etnosentrisme keluarga dilihat dari sikap responden (orang tua) dalam menghormati dan menghargai keanekaragaman kebudayaan. Data sikap etnosentrisme keluarga menunjukkan bahwa sebagian besar (78 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju menghormati dan menghargai keanekaragaman kebudayaan, berarti sebagian responden tidak mempunyai prasangka etnis kepada etnis lain. Dari hasil wawancara, dalam keluarga mereka selalu ditanamkan nilai dan norma untuk saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang etnis tertentu. Responden menyadari bahwa mereka hidup dalam komunitas masyarakat heterogen, maka harus saling menghargai dan menghormati keanekaragaman kebudayaan agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam bergaul, dalam bermasyarakat yang memiliki kompleksitas budaya plural. Responden menyadari bahwa hidup dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Responden (12 persen) menyatakan ragu-ragu dan terdapat (10 persen) responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan tidak setuju menghormati dan menghargai keanekaragaman kebudayaan beranggapan bahwa kebudayaan etnis sendiri adalah yang paling baik, sehingga memiliki kecenderungan berprasangka

terhadap etnis lain. Sikap prasangka antaretnis, dapat dilihat dari sikap tidak mau bergaul dengan etnis lain karena keyakinan yang berbeda. Data prasangka etnis lain dapat diungkap, yaitu sebagian besar keluarga tidak memiliki prasangka antaretnis. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar responden yang mewakili keluarga, dalam hal ini orang tua (ayah atau ibu) (72 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju tidak mau bergaul dengan etnis lain karena keyakinan yang berbeda. Responden beranggapan keyakinan merupakan urusan pribadi antara individu dengan pencipta-Nya, manusia sebagai makhluk sosial saling interdependensi dan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, bersikap toleransi terhadap keyakinan yang berbeda dalam bergaul dengan orang lain. Responden yang menyatakan ragu-ragu bersikap netral (21 persen) tidak bisa menentukan sikap bergaul dengan etnis lain karena perbedaan keyakinan, selebihnya (7 persen) bersikap ekstrim, tidak mau bergaul dengan etnis lain karena perbedaan keyakinan. Mereka menyatakan lebih baik memberi jarak daripada bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan karena tidak merasa nyaman dan menimbulkan permusuhan.

Sikap etnosentrisme yang dilihat dari aspek norma dan kultural yang diyakini keluarga secara ekstra dapat menimbulkan prasangka etnis di dalam kehidupan masyarakat. Sikap etnosentrisme keluarga terhadap norma kultural yang diungkap melalui sikap responden menyukai falsafah hidup etnis sendiri daripada etnis lain. Data sikap etnosentrisme keluarga menunjukkan, bahwa (54 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju menyukai falsafah hidup etnis sendiri daripada etnis lain. Responden menyatakan bahwa memang harus menyukai falsafah hidup etnis sendiri yang sejak kecil telah ditanamkan nilai falsafah hidup budaya dari orang tua (leluhur) yang perlu dilestarikan dan diturunkan ke generasi berikutnya (anaknya). Falsafah hidup tersebut telah diyakini kebenarannya dan dianggap baik, sehingga falsafah hidup etnis sendiri perlu dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya. Selebihnya, responden menyatakan ragu-

ragu (24 persen) dan (22 persen) menyatakan tidak setuju hingga sangat tidak setuju terhadap sikap tersebut di atas. Mereka berpendapat sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dan menyadari hidup dalam masyarakat heterogen (keanekaragaman budaya) yang masing-masing memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, seharusnya sebagai anggota keluarga yang baik tidak bersikap etnosentrisme yang ekstrim (yang menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya etnis lain).

Kebiasaan merupakan aspek kultural yang dimiliki individu terwujud dari hasil proses belajar sejak lahir yang diajar oleh orang tua kepada anak. Dari proses belajar tersebut menjadi kebiasaan dilakukan oleh anggota keluarga menunjukkan identitas keluarga etnis tertentu yang membedakan dengan etnis lain. Koentjaraningrat (1986) berpendapat, dalam proses belajar individu akan melakukan internalisasi terhadap adat istiadat, norma atau aturan dan kebudayaan yang ada di dalamnya sehingga terbentuk identitas etnis dalam diri individu. Dengan terbentuknya identitas etnis, individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam etnisnya dan kadang-kadang tidak memperhatikan atau bahkan merendahkan identitas etnis lain. Data di lokasi penelitian ditemukan (64 persen) responden menyatakan, tidak setuju hingga sangat tidak setuju enggan bergaul dengan etnis lain karena memiliki kebiasaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya toleransi responden terhadap perbedaan kultural (kebiasaan) dalam bergaul dengan etnis lain, selama tidak merugikan dirinya. Perbedaan kebiasaan dalam bergaul perlu dikembangkan agar tidak terjadi prasangka antaretnis. Selebihnya (17 persen), menyatakan ragu-ragu atau tidak bisa menentukan sikap tersebut dan (19 persen) menyatakan setuju hingga sangat setuju enggan bergaul dengan etnis lain karena memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka merasa menjunjung tinggi norma, adat istiadat, kebiasaan budaya etnisnya dan merasa tidak nyaman bisa bergaul dengan etnis lain dengan kebiasaan yang berbeda.

D. Penutup

Berdasar hasil analisis data temuan dilapangan disimpulkan, bahwa sikap pembauran sosial keluarga dapat merupakan salah satu alternatif pencegahan prasangka terhadap etnis lain dan atau etnis tertentu. Terbukti dilokasi penelitian (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman), tidak terjadi konflik sosial yang mengarah pada gejala sosial, walaupun masyarakatnya terdiri dari keluarga berlatar belakang budaya yang berbeda atau heterogen (plural). Sikap pembauran sosial keluarga terlihat dari 100 responden yang diteliti, sebagian besar (79 persen) menunjukkan sikap pembauran sosial keluarga terhadap etnis lain. Responden dalam bersosialisasi dengan tetangga, teman bergaul, teman kantor tidak memperdulikan asal usul etnis lain, terbukti responden memiliki sahabat atau teman *ngobrol*, memiliki teman dekat atau pacar memiliki menantu berasal dari etnis lain.

Dalam bergaul responden tidak membanggakan etnis sendiri bahkan menghargai perbedaan gaya hidup, budaya etnis lain dan saling menghormati antarsesama etnis. Responden tidak mempermasalahkan asal usul dan mayoritas etnis lain apabila terlibat dalam suatu organisasi, sekolah atau masuk dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini dilakukan karena memang harus dihadapi, tetapi bukan keterpaksaan, melainkan orang hidup memang harus dapat menyesuaikan diri dan bekerjasama apalagi berhubungan atau berkomunikasi dalam kurun waktu lama secara kontinyu dan intensif dengan etnis lain. Responden menyadari hidup dalam suatu masyarakat yang heterogen karena Yogyakarta merupakan kota pendidikan, pariwisata, dan industri yang mendukung pariwisata sehingga terjadi migrasi penduduk untuk memenuhi berbagai kepentingan. Kepemilikan sikap pembauran sosial dalam keluarga, diperoleh responden dari orang tua dan keluarga besar mereka yang selalu menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembauran sosial kepada anggota keluarganya, di samping dari media sosial, kehidupan bertetangga, bermasyarakat melalui kegiatan sosial yang mendukung terjadinya sikap pembauran sosial.

Dengan memiliki sikap pembauran sosial dalam keluarga dapat mengembangkan karier dan potensi diri anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai cita-cita yang diharapkan.

Hasil pengumpulan data menunjukkan, bahwa dari 100 responden ditemukan 21 persen memiliki prasangka terhadap etnis lain. Timbulnya prasangka terhadap etnis lain pada keluarga responden dipengaruhi oleh norma kultural dan etnosentrisme dari etnis mereka yang diwariskan atau diturunkan dari nenek moyangnya sehingga masih melembaga di dalam dirinya. Faktor norma kultural seperti tidak menyukai bergaul dengan etnis lain karena perbedaan budaya dan gaya hidup yang mengandung resiko, membanggakan falsafah etnis sendiri (menganggap falsafah etnis sendiri terbaik) sehingga sulit menerima etnis lain masuk dalam lingkungan keluarganya. Mereka beranggapan, bahwa perkawinan antar-etnis tidak akan membawa kebahagiaan, selain faktor norma kultural, faktor pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan responden (konflik, frustrasi, kecemburuan sosial, kompetisi) yang memicu prasangka terhadap etnis lain. Mereka membatasi dalam bergaul dengan etnis lain dan merasa tidak suka tinggal atau berada dalam lingkungan mayoritas tertentu, tidak suka apabila etnis tertentu berprestasi karena mendapat fasilitas yang lebih baik dan pernah diperlakukan tidak adil oleh kelompok tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat majemuk, mengingat responden hidup di Yogyakarta yang berpenduduk multikultural (terdiri dari berbagai etnis) yang rentan terjadi konflik sosial antarsesama warga.

Berkait hal tersebut, agar tidak terjadi gejala, huru-hara, dan konflik sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia direkomendasikan, kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial sebagai berikut. Pertama, perlu program peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana sosial melalui peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat

untuk mengelola keserasian sosial (pembauran sosial) bekerjasama dengan pihak terkait sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan dialog sosial antaretnis. Kedua, perlu penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan manajemen keserasian sosial sehingga masyarakat memiliki kapasitas mengelola keserasian sosial dalam rangka mencegah dan mengeliminir konflik sosial. Ketiga, perlu dibentuk forum komunikasi antaretnis di setiap desa atau kelurahan untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan menanamkan nilai keberagaman yang inklusif antaretnis sehingga diharapkan terwujud ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

Pustaka Acuan

- A. Ramlan Surbakti. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carolina Nitimihardjo dkk. (2007). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial.
- Fattah Hanurawan. (2012). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gabriella Aniwati. (1989). *Perbedaan Sikap Antara Remaja Desa Pribumi di Kabupaten Sleman dengan Remaja Pribumi di Kota Yogyakarta Terhadap Asimilasi WNI Keturunan Cina*, Yogyakarta: Psikologi UGM.
- Hadari nawawi dan Mimi Martini. (1996). *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hendra Priyatna. (2012). *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Universitas Balai Bandung (UNIBBA)
- Kementerian Sosial RI. (2006). *Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial*, Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- M.Nuryana dkk. (2003). *Pola Rekonsiliasi Masyarakat Antaretnis Di Daerah Konflik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial.
- Nur Syam. (2008). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rohmiyati. (2011). *Stereotipe dan Prasangka Dalam Komunikasi Antar Etnis (Suatu Tinjauan Teoritis Komunikasi Antar Budaya)*, Jakarta: Jurnal ISIP, ISSN 1693-9506/Vol. X, Nomor 1 Januari-Juni 2011.
- Sayekti. (1989). *Bimbingan Keluarga*, Yogyakarta: IKIP.
- Suharsimi Arikunto. (1989). *Managemen Penelitian*, Yogyakarta: UGM.
- Soekanto Soerjono. (2011), *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Setyo Sumarno dan Haryati Roebiyanto. (2013), *Evaluasi Program Keserasian Sosial Dalam Penanganan Konflik Sosial*, Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial Press.
- Taufik. (2003). *Prasangka Sosial dan Kecenderungan Agresi pada Etnis Madura Dengan latar Belakang Pengalaman Yang Berbeda*, Yogyakarta: Pasca Saryana UGM
- Wirawan IB. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Pranata Media.

Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan

House Rehabilitation as Poverty Elimination Form

Eny Hikmawati¹ dan Tri Gutomo²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl. Kesejahteraan Sosial 1 Yogyakarta. Telpon (0274) 377265. ¹E-mail: <enyhikmawati59@gmail.com.>
HP +6281227930092. ²E-mail: <trigutomo61@gmail.com.> HP +6281227178474.

Diterima 21 Maret, diperbaiki 4 Mei, disetujui 18 Mei 2016.

Abstract

This research was done to know Kulonprogo Regency government policy on poverty elimination through houses rehabilitation (PBR). The research used qualitative-descriptive approach, using informants (program commitees, poor families beneficiaries, public figures), observation as data resources. Data was analysed through qualitative-descriptive technique. The research showed that houses rehabilitation program implemented in Kulonprogo Regency proved successfully on eliminating poverty, especially in providing houses for poor families. Houses rehabilitation implemented transparantly through submitting proposal, verification agreement for program beneficiary. The success of home rehabilitation could not be rid off regent commitment on his decree to cut 2.5 percent of each moslem local civil servant salary to fund the rehabilitation (managed by Bazda), and whole and active participation and synergy support from related agencies, subdistrict leaders, entrepreneur, funding institution, and community mutual cooperation as social capital. It recommended that home rehabilitation can be diseminated in other regions committed on poverty elimination.

Keywords: *Poverty elimination; home rehabilitation; social capital*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah (PBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, menggunakan informan panitia program, keluarga miskin penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi bebas. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Pelaksanaan PBR dilaksanakan secara transparan melalui pengajuan proposal, verifikasi dan penetapan bagi penerima program. Keberhasilan PBR ini tidak lepas dari adanya komitmen dari bupati yang menetapkan setiap PNS di Kabupaten Kulonprogo yang beragama Islam dipotong 2.5 persen dari gaji bulanan (dikelola Bazda), adanya dukungan partisipasi dan sinergitas secara aktif seluruh instansi terkait, Camat, pengusaha, lembaga keuangan, dan gotong-royong masyarakat sebagai modal sosial. Keberhasilan PBR ini dapat dikembangkan di daerah lain yang berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: **Pengentasan Kemiskinan; PBR; Modal Sosial**

A. Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap orang, ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan ketunaan sosial. Keberadaan rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal,

tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan panas sinar matahari dan hujan, ancaman penyakit, serta serangan binatang. Rumah juga berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak, bimbingan dan pendidikan serta tempat bersosialisasi, berinteraksi sebagai penyaluran rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Rumah sebagai tempat berlindung harus memenuhi unsur atau syarat fisik yang kuat, aman dan sehat, secara psikis harus dapat memenuhi

rasa kenyamanan dan harga diri, sedangkan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat atau sering disebut layak huni, yang harus diupayakan keberadaannya. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan keluarga, sebaliknya jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan, seperti keterlantaraan ataupun permasalahan kesejahteraan sosial keluarga.

Untuk mewujudkan sebuah rumah yang baik atau layak huni tidak mudah, karena membutuhkan biaya tidak sedikit sehingga harus benar-benar direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah pada umumnya memiliki keterbatasan untuk mewujudkan kebutuhan rumah yang layak huni, terlebih masyarakat yang tergolong miskin memiliki rumah hanya sebuah impian indah yang mungkin sulit diwujudkan apabila tidak ada intervensi dari pihak lain. Fungsi rumah bagi keluarga fakir miskin yang utama sebagai tempat berteduh atau tempat tinggal, tanpa memperhatikan kelayakan atau persyaratan fisik, psikis dan sosial karena berbagai keterbatasan, seperti penghasilan rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak.

Keterbatasan pengetahuan tentang fungsi rumah bukan hal penting bagi fakir miskin tetapi kendala utama adalah ketiadaan biaya dikarenakan miskin sehingga tidak berdaya untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Karakteristik rumah tidak layak huni merupakan salah satu indikator keluarga miskin, meliputi luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang; Jenis bangunan lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu kualitas rendah; Jenis dinding terbuat dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah atau tembok tanpa plester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama dengan rumah tangga lain; Sumber air berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi

(sungai, air hujan); Sumber penerangan tidak menggunakan listrik; Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging, ayam dan susu sekali dalam seminggu; Hanya sanggup makan satu atau dua sehari; Hanya sanggup membeli pakaian baru sekali per tahun; Hanya sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau poliklinik; Pendapatan kepala keluarga tidak lebih dari Rp 600.000,-; Pendidikan kepala keluarga tertinggi hanya tamat SD atau tidak tamat; Tidak memiliki tabungan atau aset yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- (Kementerian Sosial 2010).

Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi (Suradi dkk., 2012). Kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan perumahan berkaitan langsung dengan status sosial ekonomi rumah tangga dimaksud, artinya apabila rumah tangga dalam kondisi ekonomi lemah atau miskin maka rumah tangga itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Dalam kondisi miskin keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan rumah tinggal layak. Salah satu ciri yang menonjol dari masyarakat miskin adalah tidak adanya akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan, yang ditandai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, seperti sanitasi yang buruk dan akses kesehatan (Muslim Sabarisman, 2011). Namun demikian setiap orang mempunyai hak konstitusi untuk dapat menempati rumah layak huni dalam kawasan sehat dan aman.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan menegaskan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memiliki rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hak konstitusi tersebut mestinya juga melekat pada mereka yang tergolong fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata-pencaharian atau mempunyai sumber mata-

pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarganya (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011). Hak konstitusi dimaksud apabila secara individu tidak dapat terpenuhi maka berubah menjadi hak moral dan menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin diperlukan kepedulian dari semua pihak, baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, *stakeholder* maupun (pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan lembaga keuangan).

Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pengalokasian kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni memadukan pembuatan sarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program ini dapat diakses secara umum. Pada level pemerintah daerah salah satu diantaranya pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2012 telah merespons program RTLH dari Kementerian Sosial dengan melaksanakan program bedah rumah untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Program bedah rumah dimaksud menggunakan sumber APBD dan APBN serta swadaya masyarakat, baik dana yang dikelola BAZDA didukung CSR maupun partisipasi masyarakat lingkungan.

Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo sampai tahun 2014 telah berhasil merehabilitasi rumah keluarga fakir miskin 223 unit. Bedah rumah tersebut menggunakan sumber APBN melalui anggaran Kementerian Sosial sebanyak 50 unit rumah, sumber APBD 173 unit dan 177 unit sejak tahun 2012-2014 melalui sumber BAZDA, CSR dan partisipasi masyarakat (non-APBD). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo 68.040 jiwa pada tahun 2014 (BPS Kulonprogo), dari jumlah penduduk miskin tersebut menempati rumah tidak layak huni 43.021 KK. Jumlah rumah tidak layak huni 14.896 unit tersebar di 12 kecamatan, terbanyak

di Kecamatan Kokap 2.846 unit dan paling sedikit di Kecamatan Galur sebanyak 324 unit.

Dana bedah rumah diberikan Rp 10.000.000,- tunai kepada penerima manfaat sebagai modal awal rehabilitasi rumah. Kegiatan rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong, melibatkan masyarakat di lingkungan dan SKPD terkait sampai pembangunan dianggap selesai. Program bedah rumah dilaksanakan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Kulonprogo (Dinas Sotakertrans Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini memfokuskan program bedah rumah yang didanai non-APBD.

Keberadaan rumah tidak layak huni mencerminkan bahwa keluarga termasuk kelompok fakir miskin atau prasejahtera yang selayaknya mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten. Suatu rumah disebut tidak layak huni apabila rumah tersebut tidak permanen atau setengah permanen, luas bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang, lantai dari tanah atau ubin tidak diplester, dinding dari bambu, kayu berkualitas rendah, atap terbuat dari rumbia atau seng dan tidak berventilasi atau berjendela, serta tidak menggunakan sarana MCK yang sehat. Sebaliknya, keberadaan rumah layak huni dapat mencerminkan keluarga sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan strategi pelaksanaan program bedah rumah sebagai salah satu solusi percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo melakukan solusi pengentasan kemiskinan, mekanisme dan sinergitas SKPD terkait, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan bedah rumah dimaksud.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo yang didanai melalui swadaya masyarakat atau non-APBD. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan Kabupaten Kulonprogo berpen-

galaman melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni sejak tahun 2012. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti satuan kerja aparat daerah (SKPD) terkait, Bazda, dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman mereka dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan bedah rumah baik menyangkut kebijakan, proses dan mekanisme maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Informan penelitian ini 23 orang, terdiri dari 10 orang penerima manfaat, lima orang panitia penyelenggara, empat orang aparat pemerintah, dua orang dari dunia usaha dan dua orang tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, pertama wawancara untuk menggali informasi dari pelaksana program, penerima manfaat dan tokoh masyarakat, menggunakan panduan wawancara. Kedua, observasi dilaksanakan secara langsung dan bebas untuk mengamati kegiatan bedah rumah di lapangan dan kondisi rumah pasca rehabilitasi. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan dan memaknai data dan informasi yang diperoleh untuk menggambarkan pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo. Langkah analisis data berupa reduksi data, konfirmasi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010).

C. Bedah Rumah sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo

Penanganan kemiskinan menjadi kewenangan Kementerian Sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Penanganan fakir miskin dilakukan secara sinergi dan terpadu, program meliputi rehabilitasi, jaminan sosial, perlindungan dan pemberdayaan. Salah satu solusi penanganan kemiskinan adalah melalui program bedah rumah yang merupakan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH). Kementerian Sosial sejak tahun 2006 meluncurkan program RTLH, tetapi mulai tahun 2012 namanya diganti menjadi Program

Bedah Kampung (PBK) dan pada tahun 2015 disesuaikan menjadi Rehabilitasi Rumah Layak Huni (Rutilahu). Program Rutilahu merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis antar lembaga SKPD terkait, meliputi pemerintah pusat (Kementerian sosial), pemerintah daerah (*Stakeholders*), seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan lembaga ekonomi termasuk Badan Amil Zakat. Pelaksanaan program ini mendayagunakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kesetiakawanan dan gotongroyong sehingga dapat mendukung percepatan rehabilitasi rumah.

Sebagai solusi pengentasan kemiskinan program rutilahu bertujuan menyediakan pelayanan perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin; Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan keluarga; Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin; Meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat keluarga fakir miskin, dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong serta nilai kesetiakawanan sosial dalam pelaksanaan kegiatan rutilahu; Meningkatkan kondisi perekonomian keluarga sehingga dapat terentaskan dari masalah kemiskinan (Pedoman RS-RLTH dan Sarana lingkungan Tahun 2014).

Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian atau renovasi sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pelaksanaan rutilahu dipadukan dengan pembangunan sarana lingkungan untuk mendukung tempat tinggal atau hunian yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam operasionalnya kegiatan bedah rumah dilaksanakan oleh instansi sosial di daerah

dengan melibatkan lintas sektor, *stakeholders* dan pendamping sosial.

Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan pendekatan kelompok, yaitu keluarga miskin penerima manfaat membentuk kelompok beranggotakan 5-10 orang. Masing-masing kelompok membentuk kepengurusan, membuka rekening, melakukan penilaian rumah yang dibedah, menetapkan toko bahan bangunan yang digunakan, usulan kebutuhan bahan bangunan, tukang yang mengerjakan, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bedah rumah. Selama proses kegiatan bedah rumah penerima manfaat didampingi pendamping sosial, terutama dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sasaran penerima manfaat program bedah rumah adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam penerima program perlindungan sosial (PPLS) 2011 atau rumah tangga miskin yang tidak termasuk pendataan (PPLS) 2011, tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan Kepmensos Nomor 146 tahun 2013 tentang penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

1. Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2012 melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti SKPD terkait, Bazda, dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat. Penyelenggaraan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo dilandasi adanya komitmen Pemerintah Daerah Kulonprogo dan kepedulian sosial dari berbagai unsur masyarakat untuk membantu sesama masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah. Pelaksanaan kegiatan bedah rumah bekerja sama dengan berbagai SKPD terkait, dunia usaha, dan lembaga keuangan mikro secara terpadu dan sinergis serta didukung partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil wawancara dengan informan pelaksana diketahui, kegiatan bedah rumah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

Tahap Persiapan: Pada tahap persiapan, calon penerima program bedah rumah harus mengajukan permohonan berupa proposal yang diajukan oleh panitia tingkat desa dan diketahui oleh camat setempat. Proposal diajukan ke BAZDA melalui panitia bedah rumah tingkat kabupaten. Proposal dilampiri identitas diri, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan direhab, alamat calon penerima manfaat, susunan kepanitiaan dan surat keterangan kepemilikan tanah. Setelah proposal diterima panitia bedah rumah tingkat kabupaten, selanjutnya tim dari bagian kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi dan mengecek kelokasi untuk memastikan apakah proposal yang diajukan layak atau tidak layak diterima.

Kriteria penerima program bedah rumah adalah keluarga yang tergolong fakir miskin yang berstatus sebagai kepala keluarga, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap, rumah dalam kondisi rusak atau membahayakan keselamatan bagi penghuninya, memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan, dan penduduk di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Jika proposal memenuhi kriteria dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya tim akan menginformasikan kepada panitia tingkat kecamatan dan desa untuk berkoordinasi dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Setelah ada kesepakatan waktu kemudian disusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi kemudian menginformasikan kepada penerima manfaat dan masyarakat setempat agar menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

Tahap Pelaksanaan: Program bedah rumah layak huni di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012, dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau sejak awal mulai dari pengajuan proposal, verifikasi oleh tim sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai. Semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan bersedia menerima masukan

bagi keberhasilan pelaksanaan bedah rumah. Setelah ada penetapan sebagai penerima manfaat, panitia bedah rumah memberitahu pemilik bahwa rumahnya akan divedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta benda dan isi rumahnya sehingga memudahkan pelaksanaan bedah rumah. Sebelum kegiatan rehabilitasi panitia desa melalui kepala dukuh melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan bedah rumah.

Kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan berbagai elemen seperti aparat sipil, TNI, Polri, warga masyarakat terutama disekitar lokasi bedah rumah dan bermitra dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. Keterlibatan masing-masing pihak yang terkait disesuaikan dengan kewenangannya dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai bentuk modal sosial. Hal ini sesuai pendapat Dasgupta dan Ismail Sirajudin dalam Heru Sunato, bahwa modal sosial adalah hubungan antara personal melalui jejaring, norma perilaku bersama, budaya bersama, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, sehingga terjaga kesatuan bersama untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan sosial (Heru Sunato, 2014).

Program bedah rumah di Kulonprogo terlaksana berkat adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, Bazda yang bermitra sehingga terjadi saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan bedah rumah layak huni. Keterlibatan bupati dalam bentuk komitmen secara langsung di lapangan menun-

jukkan kesungguhan untuk membangun penguatan institusi, jejaring dan sinergi. Terbentuknya panitia bedah rumah dari awal sampai akhir, adanya sosialisasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan secara bersama mencari solusi, sehingga terjadi sinergi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pelaksanaan bedah rumah layak huni secara partisipatoris dalam bentuk gotongroyong. Partisipasi merupakan akses dan institusi yang menentukan kualitas partisipasi. Hal yang harus dibangun antara lain, penguatan kelembagaan, penguatan jejaring dan sinergitas (Lumban Gaol, t.t).

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bedah rumah, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif membantu pelaksanaan bedah rumah seperti membantu mengalokasikan sumber potensi yang diperlukan untuk keberhasilan rehabilitasi, membantu kelompok melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui Peraturan Bupati Nomor 269 tahun 2009 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Bupati No 325 tahun 2011 tentang pembentukan badan amil zakat, menetapkan semua PNS yang beragama islam wajib mengiur 2,5 persen dari penghasilan gaji perbulan yang dikelola oleh BAZDA. Pemanfaatan dana zakat yang dikelola BAZDA disalurkan untuk mendanai program bedah rumah sebesar Rp 10.000.000,- Pada saat awal pelaksanaan bedah rumah, secara simbolis bupati menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp 10.000.000,- kepada penerima manfaat untuk keperluan bedah rumah. Aparat dan pejabat yang

Tabel 1
Bentuk Partisipasi Bedah Rumah

Pemberi Bantuan	Bentuk Partisipasi
Bazda Kabupaten Kulonprogo	Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-
TNI/Polri, PNS, Perangkat Desa	Materi atau uang, pemikiran dan tenaga
BRI, BPD dan BPR (Bank Pasar)	Materi atau uang
Dunia Usaha	Materi atau uang, bahan material
Masyarakat	Pemikiran, materi/uang, konsumsi dan tenaga
Perorangan	Materi atau uang, bahan konsumsi dan tenaga

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2014

hadir secara spontan juga melakukan penggalangan dana dan setelah dana terkumpul diserahkan langsung kepada penerima manfaat bedah rumah. Tujuan dari penggalangan dana ini adalah untuk meringankan beban biaya bedah rumah, merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian sosial kepada warga miskin yang membutuhkan pertolongan terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni.

Terlaksananya program bedah rumah tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, kepedulian dan partisipasi semua pihak terkait. Wawancara lebih lanjut kepada informan kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial menyatakan, bahwa program bedah rumah baik yang didanai APBN dan APBD maupun non APBD yakni dana yang berasal dari masyarakat termasuk kalangan dunia usaha menunjukkan partisipasi dan kepedulian yang tinggi dalam program bedah rumah. Bedah rumah yang didanai non-APBD dalam waktu dua tahun (mulai tahun 2012 sampai tahun 2014) terbukti berhasil merehab rumah sebanyak 117 unit yang tersebar di 12 kecamatan, yakni Kecamatan Panjatan, Wates, Temon, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, kecamatan Sentolo, Galur dan Lendah. Menurut penuturan Kasubag Kesra, mulai tahun 2012 bedah rumah yang dibiayai non-APBD dilaksanakan setiap hari minggu, membedah satu unit rumah tetapi kadang bisa dua unit, sehingga sampai tahun 2014 membedah sebanyak 34 unit. Penerima program bedah rumah tersebar di 12 kecamatan meliputi Kecamatan Panjatan empat, Pengasih dua, Wates empat, Kalibawang dua, Girimulyo dua, Kokap empat, Temon tiga, Sentolo dua, Nanggulan tiga, Lendah dua dan Galur empat. Sumber bantuan bedah rumah berasal dari Bazda, BRI Wates, Gapensi Kulonprogo, RSUD Wates, Forum CSR Kabupaten Kulonprogo, dan perorangan. Pelaksanaan bedah rumah dijadwalkan setiap hari minggu dengan susunan penanggungjawab, instansi yang piket (pejabat eselon di lingkungan Pemkab), nama penerima manfaat, alamat penerima sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan bedah rumah selalu dihadiri bupati dan wakil bupati, mereka terlibat langsung bergotongroyong bersama-sama masyarakat membangun, memperbaiki rumah yang dikerjakan. Pengamatan secara langsung di lapangan terlihat bupati, wakil bupati dan jajarannya serta masyarakat terlihat bergotongroyong terlibat langsung mengerjakan pembangunan bedah rumah. Mereka juga memberi bantuan dalam bentuk uang ataupun material seperti semen, kayu, paku atau bata merah. Warga masyarakat lainnya yang tidak terlibat secara langsung ada yang memberi bantuan berupa beras, telur, konsumsi dalam bentuk makanan ringan untuk menjamin yang mengerjakan bedah rumah. Semua itu dimaksudkan untuk meringankan beban penerima program bedah rumah. Pelaksanaan bedah rumah rata-rata menghabiskan biaya Rp 45.000.000,- yang dirasakan berat bagi fakir miskin sehingga memerlukan kepedulian sosial dari berbagai pihak. Salah satu tokoh masyarakat di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo mengungkapkan: “sesama manusia adalah saudara dan wajib membantu terutama bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung.” Tokoh masyarakat tersebut menunjukkan adanya semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi dengan menganggap orang lain (manusia) sebagai saudara sehingga harus dibantu ketika membutuhkan pertolongan. Dalam perspektif pekerjaan sosial hal itu sering disebut *TatTwam Asi* yang berarti engkau adalah aku sehingga ketika orang membutuhkan pertolongan harus dibantu.

Program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulonprogo dapat berjalan lancar karena mendapat dukungan dan kerja sama sinergis dari berbagai unsur serta partisipasi masyarakat secara aktif. Salah satu panitia menuturkan, “bahwa kami menggalang swadaya gotongroyong baik berupa uang tunai maupun bentuk bantuan lain seperti beras, sayuran dan makanan atau *pacitan*. Selain itu, kami juga menggalang tenaga gotongroyong (*tradisi sambatan*) yang sudah mengakar sejak dulu. Dari dana yang dihimpun jika dinilai mencapai Rp 6.840.000,- sedangkan swadaya murni

dari pemilik rumah yang dibedah sebanyak Rp 22.311.000,-. Panitia menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan gotongroyong bedah rumah. Dukungan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dalam pelaksanaan bedah rumah terjalin dengan baik. Menurut Wibisono (2007), pengusaha mempunyai kepedulian sosial, baik di lingkungan usahanya maupun masyarakat miskin sebagai salah satu bentuk implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) karena pemerintah dan masyarakat telah memberikan dukungan positif kepada pengusaha. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait dengan kewajiban melaksanakan CSR bagi pengusaha.

Bentuk kemitraan dengan lembaga terkait antara lain, bagi keluarga miskin yang rumahnya dibedah dan belum menggunakan penerangan listrik oleh PLN disambungkan aliran listrik. Biaya pemasangan instalasi listrik ditanggung oleh pemerintah daerah diambilkan dari dana yang dikelola BAZDA. IMB dicarikan dengan biaya dari camat setempat dan diserahkan saat pelaksanaan bedah rumah. Rumah yang belum memiliki sarana MCK oleh dinas kesehatan diupayakan berdampingan dengan sarana lingkungan.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo dalam kegiatan bedah rumah sangat tinggi sebagaimana tercermin dalam tabel 1. Partisipasi diberikan baik secara kelompok maupun secara individu, kelembagaan termasuk dunia usaha dan lembaga keuangan. Bentuk partisipasinya sangat bervariasi, mulai dari uang, barang, material, pemikiran, tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa program bedah rumah mendapat dukungan yang positif dari seluruh elemen masyarakat, merupakan bukti adanya komitmen, kerja sama dan kepedulian sosial yang tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Tahap Akhir: Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan setiap

hari minggu kecuali di bulan romadlon, dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait yang peduli penanganan fakir miskin. Pengerjaan bedah rumah memerlukan waktu satu bulan dengan biaya Rp 45.000.000,- hasil sumbangan sosial dari berbagai pihak. Setelah selesai pembangunan bedah rumah, panitia tingkat desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban dilampiri foto rumah yang dibedah dari sebelum, proses pengerjaan, dan hasil setelah rumah dibedah. Laporan pertanggungjawaban disertai surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, kepada bupati melalui panitia tingkat kabupaten yaitu kantor kesejahteraan rakyat, dan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo.

Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 berhasil merehabilitasi rumah 223 unit melalui dana APBN dan APBD dengan rincian 50 unit didanai APBN melalui anggaran Kementerian Sosial dan 173 unit sumber dana dari APBD. Mulai 2012 program bedah rumah dikembangkan melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sebagai model pengentasan kemiskinan. Anggaran non-APBN dan Non-APBD tetapi bersumber dari kepedulian sosial berbagai pihak, yaitu SKPD terkait, Bazda, CSR dan masyarakat. Melalui pengembangan pendanaan ini pemerintah Kabupaten Kulonprogo berhasil membedah rumah sebanyak 117 unit yang tersebar di 12 kecamatan. Pelaksanaan bedah rumah dilengkapi pembangunan sanitasi (kamar mandi dan jamban) agar memenuhi rumah sehat. Penerima program sebagian juga mendapat dana dampingan bantuan modal usaha Rp 10.000.000,-. Setelah mendapat manfaat program bedah rumah, diharapkan mereka dapat hidup layak, mandiri baik secara sosial maupun ekonomi, selanjutnya dengan terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar menuju tercapainya keluarga sejahtera.

2. Manfaat Program Bedah Rumah dalam Perspektif Penerima Manfaat

Penerima manfaat bedah rumah adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dibagian atas sehingga perlu diintervensi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dari hasil wawancara informan penerima, diketahui karakteristik dari aspek umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan status kepemilikan tanah sebagai berikut. Penerima manfaat dari aspek umur sebanyak 7 orang berusia antara 21-55 tahun dan yang berusia di atas 56 tahun 23 orang. Penerima manfaat sebagian besar berada dalam usia lanjut tingkat awal (*middle age*), menurut WHO adalah kelompok usia 45-59 tahun sehingga kurang produktif dalam bekerja dan dampaknya terjadinya kemiskinan. Dari aspek jender ada 21 orang 70 persen laki-laki dan sembilan orang 30 persen perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga karena ditinggal mati suami sehingga harus bertanggungjawab menghidupi keluarga. Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo memberi prioritas pada janda miskin terutama yang telah berusia lanjut.

Penerima manfaat dari aspek pendidikan 13 orang 43,33 persen tidak tamat SD, sedangkan 17 orang 56,67 persen tamat SD. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan mereka rendah, sehingga berpengaruh pada pola pikir yang terbatas ketika menghadapi permasalahan baik di dalam peran keluarga maupun di lingkungan sosial. Dari aspek pekerjaan diketahui sebagian besar bekerja di sektor informal seperti tukang, buruh tani, petani gurem, bakul kecil-kecilan dan pekerja serabutan serta buruh tidak tetap. Menurut pengakuan mereka dengan pekerjaan itu penghasilan mereka rata-rata Rp 600.000,- per bulan, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bahkan kadang-kadang tidak cukup. Oleh karena itu, mereka termasuk kriteria miskin yang menjadi persyaratan penerima manfaat program. Kriteria lain adalah status kepemilikan tanah, dari 30

orang penerima program status tanahnya milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat tanah yang disahkan oleh pihak berwenang dan diketahui camat setempat.

Kemiskinan mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya secara layak, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang layak huni. Bedah rumah membuat mereka memiliki rumah layak huni. Hasil penelusuran melalui wawancara dengan salah satu penerima manfaat mengatakan: “Sebelum rumahnya direhab oleh pemerintah dan masyarakat kondisi rumah saya rusak cukup berat, kondisinya sangat tidak layak, atapnya bocor sehingga kalau hujan airnya masuk semua ke dalam rumah. Apalagi kalau hujan disertai angin kencang, saya khawatir rumah saya bisa roboh karena kayu penyangga sudah pada lapuk,” lebih lanjut dia mengatakan kondisi rumahnya yang tidak layak membuat diri dan keluarganya merasa minder sehingga sering membatasi diri dalam pergaulan di masyarakat.

Kepedulian pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan dukungan warga masyarakat khususnya tetangga saya, termasuk dukuh, RT dan panitia. Saya mengucapkan terima kasih, karena rumah saya sudah direhab, rumah saya sekarang sudah layak sebagai tempat tinggal, kalau hujan tidak bocor lagi dan sekarang ada sekatan kamar tidur, ada ventilasi udara sehingga kami merasa nyaman, sekarang saya sudah tidak malu lagi untuk bisa bergaul dengan tetangga maupun dengan masyarakat.” Lebih lanjut secara polos dia menyatakan: “Seandainya saya tidak mendapat bantuan bedah rumah ini, saya tentu tidak mampu memperbaiki rumah saya karena keterbatasan ekonomi saya, saya hanya bekerja sebagai buruh tani, penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini, bahkan kadang-kadang kurang. Selain itu, saya masih punya tanggungan, satu anak masih sekolah di SMK, memang SPP-nya gratis tapi perlu uang saku dan transportasi kesekolah, sehingga saya harus bekerja keras, dibantu istri bekerja apa saja yang penting anak bisa sekolah,

belum lagi untuk kebutuhan sosial seperti kalau ada tetangga atau saudara punya hajatan.”

Penerima bedah rumah lain menegaskan, bahwa “program bedah rumah menurut saya sangat membantu terutama bagi orang kurang mampu seperti saya ini.” Hal ini diperkuat pernyataan seorang kepala desa: “bahwa program bedah rumah perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program bedah rumah mendidik warga masyarakat untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal karena pada hakekatnya harta yang kita miliki itu sebagian terdapat milik orang lain yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin termasuk duafa. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat.”

Pernyataan dan ungkapan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa orang miskin dan tidak mampu memang sangat membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Rahman D (2003) mengemukakan, kemiskinan adalah keadaan saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan standar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, melainkan juga berkaitan dengan dimensi lain dalam kehidupan manusia seperti aspek pendidikan, kesehatan, bahkan aspek kerentanan dan ketidakberdayaan (sesuai Kepmensos No 146 tahun 2013 tentang penetapan kriteria fakir miskin).

Program bedah rumah (PBR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan sarana membangun dan memupuk kepedulian sosial masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan peran aktif berbagai lembaga terkait, dunia usaha dan elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bedah rumah.

Pelaksanaan pembangunan bedah rumah dapat berjalan dengan baik, adanya kepedulian dan

dukungan kerjasama serta partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat yang memberi sumbangan baik yang berbentuk pemikiran, tenaga maupun materi. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Trilaksmi Udiati dan Tri Gutomo (2006) mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Daud Bahransyaf (yang dikutip Eny Hikmawati 2015), partisipasi mencakup tiga unsur yaitu keikutsertaan secara mental, rasa senang dan rasa tanggungjawab individu dan kelompok dalam memberi sumbangan baik berupa uang maupun barang, dan memberi sumbangan berupa tenaga ataupun pemikiran berupa (ide dan gagasan). Partisipasi seluruh elemen masyarakat, berada dalam taraf rela berkorban memberikan sumbangan baik berupa uang, barang, tenaga, pemikiran dan bertanggung jawab demi terlaksananya program bedah rumah, sebagai bentuk pengentasan kemiskinan.

Bentuk partisipasi tersebut merupakan bukti kepedulian sosial seseorang, bahwa dalam kehidupan di masyarakat saling membutuhkan, tolong menolong, terutama diberikan bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung atau miskin dan ketika sedang dalam kesulitan. Hal ini berarti ada kesadaran masyarakat untuk saling membantu, peduli sebagaimana ungkapan *Tat Twam Asi*, merupakan modal sosial selayaknya terus dikembangkan. Dalam penanganan kemiskinan dibutuhkan komitmen, kerjasama dan keterpaduan dari berbagai elemen masyarakat (pemerintah, lembaga, pengusaha, masyarakat). Sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, secara implisit bahwa penanganan fakir miskin termasuk penerima manfaat PBR harus sinergi dan terpadu antarprogram (Ahmadi Jayaputra, 2014). Bentuk sinergi dan keterpaduan program dalam PBR seperti diuraikan dimuka yakni Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bekerjasama (SKPD terkait), berbagai lembaga seperti Bank, PLN, Bazda, Rumah Sakit, dunia usaha dan masyarakat secara langsung dalam pengentasan kemiskinan sehingga program berjalan lancar.

Terlaksananya bedah rumah ternyata membawa dampak positif pada kondisi sosial psikolo-

gis penerima program, seperti peningkatan peran dan fungsi sosial baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tabel 2 berikut menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah rumahnya direhabilitasi.

Program bedah rumah (PBR) merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya rumah layak huni, perubahan sikap, dan perubahan hubungan sosial baik intern keluarga maupun eksteren dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Herlianto (1986), bahwa rumah sehat sebagai tempat keluarga dapat tumbuh berkembang secara fisik, mental dan sosial. PBR merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam pengentasan keluarga miskin, tujuannya adalah setelah rumah direhabilitasi dan layak diharapkan keluarga mampu meningkatkan peran dalam masyarakat dan mengubah perilaku sosial menjadi lebih baik. Tabel 2 kondisi penerima program bedah rumah di bawah membuktikan terjadi perbedaan yang pada awalnya minder, hubungan sosial kurang baik, berubah menjadi tidak minder, lebih terbuka dan hubungan sosial dalam masyarakat lebih baik.

Kegiatan PBR melibatkan berbagai unsur, pemerintah kabupaten, lembaga perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab, pemegang kebijakan dan komitmen dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui sumber dana non-APBD. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten adalah setiap PNS di Kabupaten Kulonprogo yang beragama Islam wajib membayar zakat yang dikelola Bazda Kulonprogo, dana tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan, salah satunya untuk PBR bagi keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni.

Dana yang diperuntukan untuk PBR dari Bazda Rp 10.000.000,- bagi setiap keluarga miskin penerima manfaat PBR. Namun kenyataan lapangan menunjukkan, bahwa dalam merehabilitasi satu unit rumah menghabiskan biaya Rp.45 000.000,- Berdasarkan temuan lapangan saat PBR berlangsung, pejabat dan aparat yang hadir secara spontan mengadakan iuran berbentuk uang dan diberikan kepada penerima manfaat. Bantuan juga datang dari masyarakat di sekitar lokasi penerima manfaat PBR, bantuan

Tabel 2
Kondisi Penerima Bantuan Bedah Rumah

Sebelum	Sesudah
Kondisi fisik rumah rusak parah, membahayakan keselamatan jiwa bagi penghuni. lingkungan rumah kumuh sehingga tidak layak huni	Kondisi fisik rumah setelah direhabilitasi menjadi baik, kuat, tidak membahayakan dan dilengkapi jamban keluarga, sehat dan layak sebagai tempat tinggal.
Kurang berfungsi sosial di masyarakat atau kurang berperan, merasa rendah diri, minder dan membatasi diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena merasa rumah tempat tinggalnya tidak layak huni.	Terjadi peningkatan peran di masyarakat setelah rumah tempat tinggalnya direhabilitasi dan layak sebagai tempat tinggal baik dari fisik bangunan maupun ukuran luas bangunan mereka tidak merasa rendah diri lagi
Privasi di dalam keluarga kurang terjamin karena rumah yang mereka tempati sempit, tidak bersekat, kamar tidur menjadi satu dengan anaknya	Privasi di dalam keluarga lebih terjamin setelah direhabilitasi rumah mereka lebih luas, bersekat dan kamar tidur terpisah antara kamar tidur orang tua dan anak.
Merasa minder berhubungan sosial dalam masyarakat, membatasi diri karena kondisi rumah mereka tidak layak dan tidak bersedia ketempatan untuk kegiatan RT.	Hubungan sosial dalam masyarakat lebih terbuka setelah rumah tempat tinggalnya direhabilitasi, bersedia ketempatan untuk kegiatan arisan RT.

Sumber: Hasil Wawancara 2014

tersebut antara lain uang, bahan bangunan (kayu, genteng, semen), sembilan kebutuhan pokok dan makanan ringan (*pacitan*) untuk tenaga yang kerja saat pembangunan bedah rumah dilaksanakan. Pemerintah kabupaten juga menjalin kerjasama dengan lembaga dan pengusaha yang ada di wilayah Kulonprogo, seperti PLN memberi penyambungan listrik gratis, perusahaan WIK berpartisipasi memberi bantuan semen. Pada tatanan ini masyarakat termasuk penerima program semata-mata tidak hanya menerima sumbangan, tetapi juga memberi kontribusi dan terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban selesainya bedah rumah. Keterlibatan semua pihak terkait merupakan sinergi yang dibangun dan dioperasikan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Masyarakat Indonesia sejak dulu dikenal dengan kesetiakawanan sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui gotong royong, yang merupakan modal sosial dalam penanganan permasalahan sosial, termasuk penanganan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan semangat gotong royong masyarakat di Kulonprogo mampu merehabilitasi rumah tidak layak huni 34 unit yang tersebar di 12 kecamatan, secara swadaya. Keterlibatan bupati dan wakil bupati secara langsung bersama masyarakat bergotong royong sebagai bentuk komitmen, akses membangun partisipasi, institusi, dan mendorong masyarakat dengan memberi contoh kepada PNS di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan masyarakat umum sesuai teori Lumban Gaol. Semakin meningkat partisipasi masyarakat berarti semakin banyak rumah yang dibedah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.

Keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo didukung tiga faktor utama, pertama komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan di tuangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kulonprogo No 325 tahun 2011 tentang Pembentukan Bazda, setiap PNS dipotong 2,5 persen. SK Bupati No 1 tahun 2015 Tentang peran serta aparatur

daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui SK Bupati ditegaskan semua aparatur daerah wajib melakukan pendampingan sesuai dengan bidang kewenangan, meliputi perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, kesempatan kerja dan usaha, permasalahan disabilitas terutama program bedah rumah bagi keluarga miskin. Kedua adanya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari bupati dan wakil bupati, DPRD, TNI, Polri, sipil, BUMD, BPD, BRI, pengusaha WIK, PLN, perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat, dan perorangan. Ketiga ada jadwal pelaksanaan bedah rumah mulai dari petugas piket dan penanggungjawab saat pelaksanaan, nama dan alamat penerima program bedah rumah serta hari tanggal pelaksanaan tercantum dengan jelas menjadi pedoman kerja.

Pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo kadang kala mengalami hambatan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat penerima program sehingga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat awam. Belum ada SOP yang baku mengenai program bedah rumah dan faktor alam (cuaca) yang kurang mendukung, seperti hujan saat pengerjaan sehingga menghambat dalam mengerjakan bedah rumah.

D. Penutup.

Adanya komitmen dan kepedulian sosial yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah bahwa setiap PNS wajib membayar zakat 2,5 persen dan dikelola Bazda kabupaten, dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya bagi keluarga miskin. Kebijakan dan komitmen pemerintah kabupaten dalam pengentasan kemiskinan melalui PBR merupakan upaya positif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Keberhasilan PBR tidak lepas ada komitmen dan kerjasama yang sinergis serta dukungan dari lembaga, masyarakat termasuk pengusaha. Bentuk dukungan tersebut berupa materi, barang, pemikirandan tenaga. Partisipasi

masyarakat yang berwujud tenaga dalam bentuk gotong royong merupakan modal sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui PBR, perlu dilanjutkan bahkan dilestarikan.

Keberhasilan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo selayaknya menjadi rujukan Kementerian Sosial untuk mengembangkan program rutilahu secara sinergis dan terpadu antar program, sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial perlu membangun komitmen dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai modal sosial, melalui penguatan institusi dan kelembagaan, penguatan jejaring dan kualitas partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program keswadayaan masyarakat dalam memperbaiki rumah tidak layak huni, sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Pustaka Acuan

- Ahmadi Jayaputra. (2014). *Evaluasi Program Bedah Kampung Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.13 No 3.
- Edi Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Eny Hikmawati. (2015). *Membangun Sistem Jaminan Sosial Berbasis Masyarakat*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Volume 39. No.2. Edisi Juni 2015.
- Heriyanto, (1986). *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Heru Sunato, (2014) *Modal Sosial, Definisi Konsep-konsep Utama dari Pemikiran Modal Sosial dan Analisis terhadap Masalah Kesejahteraan Sosial*, Bandung: STKS.
- Kabupaten Kulonprogo, (2013). *Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
- Kementerian Sosial RI, (2013), *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Saranan Prasaranan Lingkungan*, Jakarta.
- Lumban Gaol, tt *Partisipasi Sosial Masihkah Relevan?: Isu isu Tematik Pembangunan Sosial Sari IT=02*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial.
- Moleong, (2010), *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim Sabarisman. (2013). *Perspektif Komitmen Tim Kerja Dalam Pengembangan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso*. Sosiokonsepia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.18. No 01.
- Suradi, dkk. (2012), *Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*, Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
- Trilaksmi Udiyati, Tri Gutomo, (2006), *Partisipasi Pengusaha dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Citra Media.
- Wibisoso Yusuf (2007), *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Faseho Publishing.
- Undang Undang No 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*.
- Undang Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang Undang No 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.
- Keputusan Bupati Kabupaten Kulonprogo No 325 Tahun 2012 *Tentang Pembentukan Bazda di Kabupaten Kulonprogo*.

Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir

Social Attitude and Community Participation on Flood Prevention Natural Disaster

Sri Yuni Murti Widayanti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. E- mail: yunimurti@rocketmail.com.
HP 085747435299. Diterima 31 Maret, diperbaiki 25 april, disetujui 16 Mei 2016.

Abstract

The research on social attitude and community participation on the floods prevention aimed to describe community's knowledge. Social attitude, and participation toward floods victims prevention and also the implementation of post-floods social rehabilitation. The research was conducted in the district of North Lampung, Lampung Province. Data were collected from various sources, such as documentation , in-depth interview, and observation. Through descriptive qualitative analysis, the results revealed that community's knowledge and understanding about floods were quite high, so the floods prevention which was conducted by the social agencies and related social institutions were more effective in reducing the impact of floods. People tried to find social rehabilitation assistance for the flood victims. The proposed recommendation was there should be mitigation efforts towards floods prevention through regional regulation which regulates spacial building, implementation and enforcement of legislation on safety land use, as well as the development of the village disaster alert program that will be used to coordinating participation of community, improving the system of agriculture and socialization to the society about the causes and effects of floods,

Keywords: *social attitude; community's participation; floods prevention.*

Abstrak

Penelitian tentang sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir di Provinsi Lampung bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan dampak terjadinya bencana banjir, serta diketahuinya sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir. Lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana alam banjir sudah tinggi, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh petugas instansi sosial atau yang terkait, lebih efektif mengurangi dampak akibat bencana alam banjir. Masyarakat berusaha mencari bantuan rehabilitasi sosial bagi korban bencana banjir, rekomendasi yang diusulkan adalah perlu kiranya upaya mitigasi terhadap bencana dengan melakukan pencegahan terhadap bencana banjir dengan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penggunaan tata ruang bangunan. Penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, penggunaan tanah dan pengembangan program kampung siaga bencana sebagai wadah partisipasi masyarakat. Memperbaiki sistem pertanian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat banjir.

Kata kunci: *sikap sosial; patisipasi masyaakat; penanggulangan banjir*

A. Pendahuluan

Bencana banjir selalu membawa kerugian, baik materiil maupun moril, bahkan tidak jarang membawa korban jiwa. Secara geografis kondisi sebagian wilayah di Indonesia kedudukannya dilintasi garis khatulistiwa. Posisi ini memiliki implikasi besar dan berpengaruh terhadap cuaca,

iklim, dan musim. Pengertian umum cuaca, iklim, dan musim perlu dipahami oleh masyarakat luas karena bencana banjir tidak lepas dari kondisi cuaca, iklim, dan musim yang terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia. Di samping itu kerusakan dan beralih fungsinya hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Hutan Indonesia berkurang secara drastis, dalam kurun waktu 2009-2013, Indonesia kehilangan hutan seluas 4,6 juta hektar atau seluas Provinsi Sumatra Barat, tujuh kali luas Provinsi DKI Jakarta. *Forest Watch Indonesia* (FWI) mengungkapkan fakta mencekam tersebut dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia periode 2009-2013, yang diluncurkan pada Kamis 11 Desember 2014 di Jakarta. EG Togu Manurung, ketua Perkumpulan FWI mengungkapkan, bahwa dalam kurun waktu tersebut kecepatan hilangnya hutan mengejutkan. "Setiap menit, hutan seluas tiga lapangan bola hilang," katanya. Hutan yang tersisa kini 82 juta hektar, masing-masing 19,4 Juta hektar di Papua, 26,6 juta hektar di Kalimantan, 11,4 juta hektar di Sumatera, 8,9 juta hektar di Sulawesi, 4,3 juta hektar di Maluku, serta 1,1 juta hektar di Bali dan Nusa Tenggara. apabila praktek tata kelola lahan hutan tidak berubah dan pembukaan hutan terus dibiarkan, jumlah hutan akan terus menyusut. Untuk mempertahankan hutan di Indonesia Cristian menuturkan, yang diperlukan adalah perbaikan tata kelola, izin kehutanan, dan pengawasan, juga leadership dari pemerintah. Senada dengan Cristian, ahli kehutanan Insitut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodiharjo, juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola. Undang-undang serta sejumlah rencana dari moratorium hingga program REDD sudah cukup baik. Namun masalahnya pada tata kelola di lapangan.

Semakin luasnya lahan kritis akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, perladangan berpindah, atau pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau, dampaknya adalah terjadinya bencana banjir dan kebakaran hutan. Banjir bandang dapat terjadi sebagai akibat dari *illegal logging* karena menipisnya hutan yang biasanya mampu menyimpan dan menyerap air pada saat musim hujan. Faktor penyebab banjir lainnya adalah ditutupnya daerah resapan air, yang seharusnya mampu menampung debit air hujan dialihfungsikan menjadi permukiman war-

ga, serta terjadinya perubahan iklim. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan bencana banjir.

Banjir disebabkan meluapnya air sungai, kemudian merendam serta menggenangi daerah sekitarnya. Bencana banjir besar apabila daerah genangannya luas dan airnya tinggi, terjadi pada waktu cukup lama, berjam-jam bahkan dapat sehari-hari. Banjir di Indonesia pada umumnya terjadi sekali dalam setahun, tetapi adakalanya beberapa tahun sekali, dan biasanya terjadi pada musim penghujan. Banjir terjadi pada daerah yang berdekatan dengan sungai, jarang terjadi di bagian hulu sungai. Bagian hulu sungai biasanya sempit, aliran air di bagian hulu sangat cepat, sehingga tidak sampai menggenang. Bagian tengah lebih rendah daripada hulu, di bagian tengah banjir lebih sering terjadi. Bagian hilir berdekatan dengan muara, banjir paling sering terjadi, karena aliran di bagian tengah dan hilir menjadi lebih lambat daripada di hulu (Gifford Clive, 2009: 14)

Setiap bencana banjir datang di wilayah manapun selalu membawa kerugian dan korban. Dari tahun ke tahun jumlah kerugian cenderung terus meningkat, berdampak pada makin tingginya angka kemiskinan di lokasi bencana. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dari tahun 2002 sampai dengan 2007, korban banjir di Provinsi Lampung tercatat keluarga dalam kategori rumah tangga sangat miskin 46.958 Jiwa (22,36 persen) dari 210.026 jiwa rumah tangga sangat miskin, selanjutnya untuk kategori rumah tangga miskin 72.439 jiwa (21,36 persen) dari 339.100 jiwa warga rumah tangga miskin.

Kondisi tersebut menuntut pihak berwenang dan masyarakat luas untuk tanggap dan peduli (memiliki sikap sosial) berpartisipasi mengupayakan secara cepat dan tepat penanggulangan korban banjir. Kepedulian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, terhadap korban banjir perlu terus ditingkatkan. Pihak berwenang dalam hal ini pemerintah perlu terus mendorong potensi sosial dan ekonomi masyarakat, agar masing-masing warga memiliki sikap sosial positif bagi masyarakat yang

sedang menerima musibah banjir. Bencana alam menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian pada kehidupan manusia, baik dari segi moril maupun materiil serta sosial, yang melampaui batas kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengatasi dengan sumberdaya pada diri korban.

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia setiap musim hujan berpotensi banjir, sementara model penanggulangan korban banjir setiap kali diaplikasikan di lapangan mengalami berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia maupun segi teknis lainnya, seperti sulitnya transportasi masuk ke wilayah banjir, tempat pengungsian korban banjir, sehingga evakuasi korban tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan potensi korban tentang bencana banjir, sebab dan akibat, reaksi dan aksi sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam banjir, bagaimana sikap sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menginventarisasi penanggulangan korban bencana banjir, dalam hal pengetahuan masyarakat, sebab dan akibatnya, cara penanggulangan, sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir di lokasi penelitian.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Model pendekatan dalam penelitian ini adalah *eksploratif*. Lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Utara. Penentuan responden dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive*, baik warga yang menjadi korban banjir maupun warga yang tidak menjadi korban banjir, karena mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang sama. Jumlah responden dalam penelitian 50 orang, dengan karakteristik sebagai berikut. Warga masyarakat yang menjadi korban bencana banjir 30 responden dan masyarakat bukan korban banjir yang tinggal di wilayah banjir 20 responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara,

telaah dokumen yaitu mengumpulkan catatan-catatan dari dokumentasi tentang jumlah korban banjir (jiwa, harta benda, dan fasilitas umum), serta observasi terhadap partisipasi masyarakat, 50 warga, baik korban (30 orang) maupun bukan korban (20 orang). Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data, selanjutnya difokuskan pada jawaban permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan memberi makna atau interpretasi terhadap temuan penelitian, analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif (Moleong, 2002).

C. Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Korban Banjir

1. Deskripsi Lampung Utara

Secara geografis Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah seluas 2.756,83 km², sedangkan jumlah penduduknya 828.782 jiwa, kepadatan penduduk 191 jiwa, merupakan daerah yang penduduknya jarang. Daerah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi utama pada periode tahun 1995-2000. Pendapatan asli Kabupaten Lampung Utara adalah perkebunan dan tanaman pangan. Komoditas perkebunan unggulan adalah kopi, rasa kopi Lampung sangat terkenal bagi penikmat kopi di dunia. Provinsi Lampung dinobatkan sebagai produsen kopi terbesar nasional karena menyumbang 50 persen dari seluruh produksi nasional. Produksi kopi dihasilkan dari areal seluas 14.050 hektar, terbatas pada jenis kopi Robusta, karena secara topografi Lampung utara sebagian besar (93 persen) adalah dataran rendah maka tidak cocok untuk kopi jenis arabika.

Budidaya kopi di Kabupaten Lampung Utara masih bersifat tradisional, sehingga sangat berpengaruh pada rendahnya produktivitas tanaman, yaitu hanya 500 kg per hektar. Jumlah tersebut seharusnya dapat meningkat apabila pengelolanya lebih baik. Selain kopi di daerah Lampung Utara terdapat komoditas perkebunan lada hitam, tanaman lada merupakan harta karun bagi petani di Kabupaten Lampung Utara. Tataniaga lada menganut sistem pasar bebas, petani menjual lada ke pedagang pengumpul di tingkat kabu-

paten, diteruskan ke tingkat provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara berusaha memberi pembinaan pada petani, agar memanen lada sesuai dengan masa tanam (tepat waktu) sehingga mampu mendapatkan lada dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berusaha membangun kebun induk lada yang difungsikan sebagai penyuplai bibit lada yang baik, bebas hama dan penyakit. Keunggulan sektor pertanian secara tidak langsung di tunjang oleh hidrologi Lampung Utara yang dianugerahi sungai yang mengalir dari arah barat ke timur. Arah barat merupakan wilayah berbukit-bukit sedangkan arah timur adalah tanah landai.

Ciri-ciri khusus daerah Lampung adalah terdapatnya bukit-bukit sempit, kemiringannya antara 8 persen sampai 15 persen dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran aluvial, vegetasi terdapat tanaman-tanaman perkebunan, seperti kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan, seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran.

Masyarakat Lampung dalam bentuk yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri, berbeda antarkelompok, menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Secara umum masyarakat adat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, masyarakat adat Peminggir yang berkedianan di sepanjang pesisir termasuk adat Krui, Ranau Komeri, sampai Kayu Agung, dan masyarakat adat Pepadun yang berkedianan di daerah pedalaman Lampung, terdiri dari masyarakat adat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala atau Tulang Bawang (Migo Pak) dan Buai Lima.

Dalam banyak hal suatu ciri yang disebut dengan genealogis sangat dominan pada masyarakat Lampung, suatu ikatan masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya berdasarkan atas suatu pertalian keturunan, baik karena ikatan maupun hubungan darah. Prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian masyarakat Lampung, yang dapat di simpulkan dalam prinsip, *Pi'il Pesengiri*, diar-

tikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi dan kelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu, seorang Lampung dapat mempertaruhkan apa saja, termasuk nyawanya demi untuk mempertahankan *Pi'il Persengirinya*, dengan *Pi'il Pesengiri* seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kendati hal itu merugikan dirinya secara materi.

Sakai Sambayan meliputi beberapa pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain, tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran. *Nemui Nyimah*, berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja pihak yang berhubungan dengan mereka. Bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada kepada pihak lain, juga bermurah hati dalam bertutur kata serta sopan santun dan ramah tamah terhadap tamu. *Nengah Nyappur*, tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas. Ikut berpartisipasi terhadap hal yang bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Permasalahan sosial yang menonjol di Kabupaten Lampung Utara adalah kemiskinan, yang selalu melekat pada penduduk di Kabupaten Lampung utara. Apabila ditinjau dari banyaknya korban banjir di Kabupaten Lampung Utara, menurut angka dari Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial pada tahun 2006, tercatat korban banjir untuk rumah tangga sangat miskin 3.173 jiwa, selanjutnya rumah tangga miskin 4.741 jiwa. Dari data tersebut diindikasikan, bahwa seringkali Kabupaten Lampung Utara terjadi bencana banjir, karena kemiskinan di daerah tersebut (Pusdatin Kesos, 2007: 103).

2. Gambaran Umum Responden

Tingkat Pendidikan sebagian besar responden korban bencana 16 orang (53,34 persen) berpendidikan tamat sekolah dasar (SD), sembilan orang (30 persen) berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama (SMP), empat orang (13,33 persen) setingkat sekolah menengah atas (SMA), kemudian satu orang (3,33 persen) berpendidikan sarjana (S1), mereka adalah tokoh masyarakat setempat. Pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperoleh penghidupan layak, tetapi responden korban banjir sebagian besar hanya mampu menamatkan pendidikan SD. Dalam pendalaman lebih lanjut melalui wawancara, ternyata rendahnya pendidikan mereka berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin ketika mereka masih berusia sekolah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Chambers (dalam Korin Bastaman, 2000) yang menyatakan, bahwa pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh lima ketidakberuntungan pada kelompok keluarga miskin: keterbatasan kepemilikan aset (*poor*); kondisi fisik lemah; keterisolasian; kerentanan; dan ketidakberdayaan. Menurut Sumodiningrat (2000:24) kemiskinan ditandai dengan: Pertama, jumlah rata-rata anggota keluarga rumah tangga miskin cenderung lebih besar dibanding keluarga tidak miskin; Kedua, rumah tangga miskin menanggung beban sosial ekonomi lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin; Ketiga, beban rumah tangga miskin di daerah perdesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar daripada rumah tangga miskin di perkotaan; Keempat, tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin rendah; Kelima, penghasilan utama rumah tangga miskin di perdesaan bersumber pada kegiatan sektor pertanian.

Apabila ditinjau dari jenis kelamin, responden laki-laki 72,5 persen, perempuan 27,5 persen. Selanjutnya ditinjau dari mata pencaharian responden cukup bervariasi, pekerjaan sebagai petani menempati urutan teratas yaitu 24 orang atau 80 persen, dan 4 orang 13,33 persen adalah pedagang, selanjutnya dua orang 6,67 persen adalah PNS/TNI/Polri. Status mereka 90 persen

sudah menikah dan sebagian besar responden masih berusia produktif, sehingga masih bersemangat untuk bekerja dan memiliki motivasi untuk hidup lebih baik.

Responden bukan korban, sebagian besar yakni 8 orang 40 persen, berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama (SMP), berpendidikan tamat sekolah dasar (SD) enam orang (30 persen), berpendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) empat orang (20 persen), kemudian dua orang (10 persen) berpendidikan sarjana (S1). Apabila ditinjau dari jenis kelamin, responden laki-laki 80 persen dan perempuan 20 persen. Status mereka 14 orang (70 persen) sudah menikah, dan keseluruhan responden dalam usia produktif. Dilihat dari mata pencaharian bukan korban banjir 13 orang (65 persen) sebagai petani, pedagang empat orang (20 persen), dan tiga orang (15 persen) sebagai PNS/TNI/Polri. Dari mata pencaharian responden sebagian besar sebagai petani, setelah dilakukan wawancara lebih lanjut terungkap bahwa sebagian besar mata pencaharian responden sebagai petani merupakan warisan dari orangtua mereka secara turun temurun.

3. Sikap Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

Banjir merupakan bentuk bahaya alam yang sangat meresahkan dan mengancam ketenteraman masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Penyebab terjadinya banjir amat penting dalam upaya pencegahan terjadinya banjir, sebab banyak kasus bencana alam merupakan dampak ulah manusia. Banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air yang besar dari sebuah badan air, sehingga menggenangi daerah sekitarnya yang pada hari biasa kering. Badan air adalah tempat air berada, baik air yang bersifat diam, bergerak maupun mengalir, sehingga yang dimaksud dengan badan air adalah sungai, selokan, saluran, kanal, ataupun bendungan (Purwanto, 2007: 4).

Pemahaman masyarakat Lampung tentang penyebab banjir dari hasil wawancara terungkap, sebagian besar responden korban banjir 21 orang (70 persen) menyatakan, banjir

disebabkan oleh pendangkalan sungai, kondisi tersebut terjadi karena dampak penggundulan hutan atau intensifikasi pertanian di daerah aliran sungai. Lampung secara geografis memiliki ciri-ciri khusus, terdapat bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8 persen sampai 15 persen, daerah tersebut merupakan daerah intensifikasi perkebunan kopi, cengkeh, padi, jagung dan sayur-sayuran, sehingga terjadi pendangkalan sungai. Responden lainnya, 6 orang (20 persen) menyatakan karena saluran yang tersumbat, tiga responden (10 persen) menyatakan karena penggundulan hutan.

Pemahaman masyarakat tentang penyebab dan akibat banjir sangat diperlukan mengingat banjir sering melanda di wilayah Lampung Utara, sehingga masyarakat memiliki sikap sosial yang baik terhadap penanggulangan banjir. Secara organisatoris untuk dapat mencapai hasil yang optimal, penanggulangan bencana banjir diperlukan rencana (perencanaan) dan koordinasi dalam suatu sistem manajemen. W. Nick Carter (1991: 50-60) menyatakan, bahwa manajemen penanggulangan korban bencana alam mencakup lima tahapan. Tahap pertama, persiapan menghadapi bencana, Tahap kedua, penanganan saat terjadi bencana. Apabila bencana benar terjadi ketika bencana sedang terjadi. Tahap ketiga perbaikan kembali (rekonstruksi), merupakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat, membenahi kembali kerusakan akibat bencana. Tahap keempat, tahap rehabilitasi merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Tahap keempat, tahap rehabilitasi merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Tahap kelima, mitigasi atau penjinakan, kegiatan ini biasanya dijadikan program khusus, untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, yang mungkin menimpa sekelompok orang tertentu.

Data hasil penelitian 90 persen responden menyatakan pendangkalan sungai dan saluran yang tidak lancar karena pembuangan sampah di sepanjang aliran sungai merupakan penyebab banjir. Pernyataan dari warga tersebut mengindikasikan, bahwa sebagian responden memiliki

pemahaman yang cukup akan terjadinya bencana banjir di daerahnya. Walaupun tingkat pendidikan responden rendah, tetapi karena sosialisasi mengenai bencana seringkali dilaksanakan oleh pihak instansi sosial, maupun instansi lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka pengetahuan responden tentang bencana banjir cukup memadai. Setiap kali datang bencana banjir, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain, memukul kentongan tanda bahaya banjir, berteriak minta tolong, upaya mengungsikan keluarga untuk mencari tempat yang lebih aman, tetapi ada juga yang tetap tinggal di rumah.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa sebagian besar masyarakat sangat memahami penyebab terjadinya banjir di Lampung Utara. Pendapat responden sejalan dengan Sunit (2011), bahwa faktor penyebab banjir di antaranya hujan lebat, menurunnya resistensi daerah aliran sungai (DAS) terhadap banjir akibat adanya perubahan tata guna lahan, kesalahan pembangunan alur aliran sungai seperti pelurusan sungai, pembe-tonan dinding sungai dan faktor pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai disebabkan oleh sedimentasi yang terjadi secara terus menerus akibat erosi yang intensif di bagian hulu sungai. Banjir dapat juga disebabkan oleh semakin meluasnya lahan kritis akibat pembakaran hutan secara besar-besaran, perladangan berpindah, atau pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin meluasnya padang ilalang dan semak belukar. Lahan ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang. Dampaknya adalah terjadinya bencana banjir. Penyebab banjir juga karena pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang besar dan penumpukan sampah di sungai.

Tanggapan dan sikap warga masyarakat terhadap korban pada saat terjadi banjir ternyata menunjukkan sikap bervariasi, 17 responden (56,67 persen) berteriak minta bantuan, 7 orang (23,33 persen) menyatakan, mengungsikan keluarganya, mendirikan tenda umum 4 orang (13,33 persen), dan sisanya mendirikan dapur umum. Setiap datang banjir, masyarakat masih

berperilaku konvensional, yakni berteriak atau memukul kentongan guna memberi peringatan dan meminta pertolongan warga masyarakat yang lain. Sikap masyarakat korban dalam menghadapi banjir sangat bervariasi karena setiap orang atau keluarga memiliki pengalaman dan situasi yang berbeda, sehingga dalam menghadapi banjir masing-masing memiliki perilaku yang berbeda pula. Seringkali perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh nilai budaya serta kearifan lokal setempat.

Terbentuknya sikap sosial masyarakat yang didasari kesadaran dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap kegiatan penanggulangan korban bencana banjir di manapun dan kapanpun mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Jika sikap sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam penanggulangan korban bencana banjir dapat dicapai, pemerintah akan lebih berperan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan aktualisasi segenap potensi masyarakat. Partisipasi menurut Moeljarto Tjokrowinoto (Moelyarto Tjokrowinoto, 1974: 23) adalah penyertaan mental dan energi seseorang dalam situasi kelompok. Partisipasi mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan bagi tercapainya tujuan bersama serta bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban banjir sangat diperlukan dan diharapkan tidak hanya pada saat tanggap darurat untuk memperlancar dan mempercepat evakuasi korban, penyaluran bantuan pangan, sandang pantas pakai, dan obat-obatan. Selain pada saat tanggap darurat, masyarakat secara simultan diharapkan mengupayakan tempat pengungsian yang layak dan pemerataan bantuan bagi korban. Kepedulian masyarakat diharapkan sampai pascabanjir, karena relatif masih rawan sosial ekonomi dan psikologis. Permasalahan yang sering muncul dipermukaan, antara lain korban bencana banjir membutuhkan segera bantuan pangan dan obat-obatan, tetapi kenyataan bantuan diharapkan dari instansi maupun masyarakat masih sering terlambat diterima

para korban karena transportasi sulit menjangkau wilayah korban, data korban belum lengkap dan kurangnya koordinasi antartugas dan tidak transparansinya penggunaan dana rehabilitasi banjir, bahkan bantuan bencana tertunda karena dana APBD belum turun.

Sikap responden bukan korban pada saat terjadi banjir yakni dengan membantu evakuasi dinyatan 9 orang (45 persen), membantu mendirikan tenda dinyatakan 6 orang (30 persen), dan yang menyatakan membantu mendirikan dapur umum sebanyak 5 orang (25 persen). Sikap yang ditunjukkan responden merupakan manifestasi partisipasi yang dilakukan. Sikap responden merupakan perilaku prososial yang memberikan konsekuensi positif bagi si penerima baik dalam bentuk materi, fisik ataupun psikologis, tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi si pemberi. Perilaku personal yang dilakukan responden pada saat terjadi bencana sesuai dengan pendapat Sampson (dalam Sri Dewiyanti, R. 2004) menyatakan perilaku prososial meliputi tindakan menolong dan menyelamatkan suatu objek yang menyangkut tindakan menyumbang (*donating*), berbagi (*sharing*), bekerja sama (*cooperating*), memberi (*giving*), peduli (*caring*), dan memberi fasilitas bagi kesejahteraan orang lain.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mussen dkk. (dalam Dayakini dan Hudaniah, 2003) memandang bahwa perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan menolong, bekerja sama, berbagi perasaan, bertindak jujur, dan bertindak dermawan terhadap orang lain. Terkait dengan sikap yang ditunjukkan responden baik oleh korban banjir maupun responden bukan korban Hari Purwanto (2007: 59) membedakan sikap menjadi sikap individu dan sikap sosial. Sikap sosial secara umum diartikan sebagai “pendidikan” tetapi secara spesifik dapat dikemukakan ada beberapa pendapat tentang sikap. Menurut Zimbarga dan E.B Bensen dalam Abu Ahmadi (1990:163) menyatakan, bahwa sikap adalah predisposisi (keadaan mudah pengaruh) terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen; *cognitif, efektif dan behavior*. Da-

lam sikap disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tertentu. Sikap sosial adalah ke arah mana pendirian seseorang dalam kesiapan merespons objek yang bersifat positif terhadap objek sosial secara konsisten, dalam konteks penelitian ini adalah kesiapan warga masyarakat dalam merespons upaya penanggulangan korban banjir. Sikap memiliki peranan penting dalam interaksi manusia. Sosialisasi merupakan upaya penanggulangan korban banjir menjadi bagian penting, karena sosialisasi dimaksudkan untuk pembentukan sikap sosial.

Kepedulian dan solidaritas setiap warga perlu ditumbuh-kembangkan agar terbentuk sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana banjir, karena bencana banjir tidak mudah diprediksi bahkan sulit dihindari. Di berbagai wilayah Indonesia bencana banjir sering kali membawa korban, baik materiil maupun moril, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu ada pameo bahwa wilayah tertentu seperti Jakarta, berbagai wilayah di Indonesia merupakan wilayah langganan banjir. Simpati dan kepedulian setiap warga terhadap warga yang lain, yang sedang menderita karena sesuatu hal, termasuk seperti para korban bencana banjir, merupakan sikap sosial setiap warga negara Indonesia. Sikap sosial masyarakat tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat kegotongroyongan bangsa Indonesia.

Langkah yang dilakukan responden merupakan tahap penanganan saat terjadi bencana seperti yang dikemukakan Nick Carter (1991: 50-60) yakni pada tahap kedua, penanganan saat terjadi bencana. Apabila bencana benar terjadi ketika bencana sedang terjadi, kemudian dilaksanakan pengelolaan kegiatan penanganan terhadap korban bencana. Kegiatan pada tahap ini utamanya ditujukan pada penyelamatan kehidupan dan perlindungan harta benda, membahas tentang perbaikan kerusakan dan dampak lain yang diakibatkan oleh bencana banjir, melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya, mengaktifkan sistem peralatan penanggulangan bencana, melakukan identifikasi masalah dan

upaya penyelamatan, mencukupi persediaan makanan, sandang dan bantuan kesehatan. Menyusun perencanaan anggaran, melakukan pengumpulan dana, pembuatan lokasi penampungan tanggap darurat, karena kegiatannya hanya dua sampai tiga minggu sesudah bencana terjadi. Keadaan darurat diumumkan oleh pihak pemerintah.

Dari hasil wawancara dapat diindikasikan bahwa sikap tanggap masyarakat dalam penanggulangan banjir persentase tertinggi 13 orang (65 persen) menyatakan bahwa masyarakat “cepat tanggap” mengevakuasi korban, terdapat pula responden sebanyak 3 orang (15 persen) menyatakan masyarakat “sangat cepat tanggap” dari pernyataan tersebut 80 persen responden menyatakan positif. Namun, terdapat pula responden yang menyatakan tanggapan masyarakat “biasa saja”. Hal itu terjadi karena bencana banjir dianggap sebagian masyarakat sudah biasa terjadi. Sikap tanggap tersebut adalah bentuk dari kesadaran untuk saling tolong menolong antarwarga. Dari tingginya persentase responden yang menyatakan positif 80 persen, mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat terhadap bencana banjir di Lampung Utara cukup tinggi. Wujud kepedulian tampak dari sikap tanggap dan aktivitas masyarakat dengan cepat mengevakuasi korban banjir. Memang dewasa ini banyak pendapat di masyarakat bahwa sikap kepedulian dan nilai-nilai kegotongroyongan mengalami erosi, tergerus oleh arus globalisasi, bahkan nilai kegotongroyongan masyarakat cenderung menurun, sebab terkikis oleh arus nilai materialisme atau pasar global yang dikembangkan oleh kapitalisme barat.

Dari hasil penelitian di atas terbukti sikap sosial masyarakat menanggapi penanggulangan banjir, menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan sikap sosial tersebut tidak terlepas dari motivasi seseorang, motivasi tersebut berkaitan dengan kesadaran masyarakat, pengetahuan, serta keterampilan juga pemahaman tentang dampak dari bencana banjir yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, juga keterampilan ataupun pengalaman dari seseorang. Dari data di atas mengindikasikan, bahwa nilai

pi'il pesengiri dan *sakai sambayan* yang menghormati hak azasi manusia dan selalu hidup bergotong royong kepada sesama, termasuk pula warga yang menjadi korban bencana banjir, masing dipegang warga masyarakat. Dari hasil penelitian terungkap, bahwa tradisi dan kearifan lokal masih lekat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Berkembangnya teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat, meningkatkan pengetahuan agar memiliki sikap tanggap sosial dan bertanggung jawab pada lingkungannya. Kesadaran dan pemahaman tentang usaha penanggulangan bencana banjir yang terencana dan terkoordinir perlu dimiliki oleh masyarakat dan pada gilirannya masyarakat merasa memiliki sikap yang sama (sikap sosial) antara warga yang satu dengan yang lain.

Kepedulian dan solidaritas setiap warga perlu ditumbuhkembangkan agar terbentuk sikap sosial masyarakat dalam penanggulangan korban bencana banjir, karena bencana banjir tidak mudah diprediksi bahkan sulit dihindari. Di berbagai wilayah Indonesia bencana banjir sering kali membawa korban, baik materil maupun moril, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu ada pameo bahwa wilayah tertentu merupakan wilayah langganan banjir. Simpati dan kepedulian setiap warga terhadap warga yang lain, yang sedang menderita karena sesuatu hal, termasuk seperti para korban bencana banjir, merupakan sikap sosial setiap warga negara Indonesia. Sikap sosial masyarakat tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat kegotongroyongan bangsa Indonesia.

Menurut Graham Richards, pada hakekatnya sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang kemudian diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek serta situasi yang berkaitan dengannya. Sikap terutama digambarkan sebagai kesiapan untuk selalu menanggapi dengan cara tertentu, serta menekankan implikasi perilakunya. Relevansi sikap terhadap perilaku, semakin besar relevansi spesifik sikap terhadap perilaku, semakin tinggi pula korelasi

antara kedua hal tersebut semakin tinggi pula seseorang melakukan perilaku yang nyata. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi baik oleh sikap seseorang maupun oleh suatu situasi. Apabila tekanan situasi sangat kuat, kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku, tetapi apabila tekanan situasi lemah, perilaku akan menjadi lemah. Mengacu pada teori keseimbangan tekanan atas konsistensi di antara akibat dalam suatu sistem kognitif yang sederhana. Pada sistem tersebut ada dua objek terdapat dua penilaian untuk mencapai keseimbangan, penilaian individu tentang setiap objek dan hubungan tentang objek satu sama lain. Hubungan yang seimbang membuat gambaran yang pantas dan masuk akal, hubungan yang seimbang merupakan motif utama mendorong seseorang ke arah keseimbangan, sehingga dapat dicapai dan dipelihara bentuk hubungan sosial yang selaras dan seimbang (Graham Richards, 2010: 38).

Sikap sosial yang ditunjukkan masyarakat terhadap korban banjir di lokasi penelitian perlu dikembangkan karena sikap tersebut dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap segala keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. oleh karena itu, kesetiakawanan sosial perlu dikembangkan pada diri pribadi dan setiap warga masyarakat bahkan setiap warga negara Indonesia. Sugeng Bayu Wahyono menyatakan kepekaan terhadap nasib orang lain sesungguhnya menjadi kadar solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Semakin dalam dan semakin nyata kepekaan sosial seseorang terhadap nasib warga masyarakat yang terkena bencana, semakin tinggi pula kadar kesetiakawanan sosial yang mereka miliki (Ikawati dan Chatarina Rusmiyati, 2009:23).

Ciri nilai kesetiakawanan sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi antarpara anggotanya dan diturunkan dari generasi ke generasi (Abdul Syani, 1995:51). Kandungan nilai utama kesetiakawanan sosial menurut Haryati Soebandio, Soedjito Sosrodiharjo (Gunanto Surjono, dkk. 1998: 27-31) mengandung beberapa aspek antara lain: Kepedulian sosial, gotong royong, ikhlas berkorban, dan

kebersamaan. Lebih lanjut menurut Gunanto (1998) indikator Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) merupakan penjabaran dari nilai utama yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial nasional.

Nilai-nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Lampung dalam menanggulangi banjir ditunjukkan dalam bentuk partisipasi. Dalam teori sosial, pendekatan yang digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Moelyarto Tjokrowinoto (1974: 23) mendefinisikan, partisipasi sebagai penyertaan mental dan energi seseorang dalam situasi kelompok. Partisipasi mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan bagi tercapainya tujuan bersama serta bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Holil Soeliman (1985:6) menyatakan, partisipasi masyarakat mencerminkan kehidupan demokratis, ditandai dengan adanya penentuan kebutuhan dan usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang didasari tanggung jawab. Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk uang, barang, pikiran, tenaga, keterampilan dan kemahiran.

Berbagai konsep partisipasi pada dasarnya dapat diimplementasi pada satu mata rantai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi dalam penanggulangan banjir. Manifestasi masyarakat dalam penanggulangan banjir tersaji pada tabel 1.

Manifestasi masyarakat diwujudkan dalam partisipasi yang dilakukan dalam penanggulangan banjir, baik pada saat terjadi banjir, tahap rehabilitasi, rekonstruksi maupun tahap mitigasi. Bentuk partisipasi yang dilakukan sebagian besar, terutama korban banjir, pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, sedangkan partisipasi yang dilakukan masyarakat bukan korban 45 persen berpartisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga dan 25 persen dalam bentuk tenaga. Partisipasi dilakukan masyarakat baik oleh korban maupun bukan korban.

Ciri khas partisipasi yang dilakukan masyarakat Lampung secara keseluruhan merupakan adalah *Sakai Sambayan*, dilakukan dalam bentuk gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan pihak lain, tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran dalam memberi bantuan penanggulangan banjir. Masyarakat secara bersama-sama membantu korban banjir, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. Masyarakat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama untuk memberikan pertolongan kepada korban banjir. Masyarakat juga selalu hadir dalam kegiatan rapat untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, bahkan masyarakat terutama bukan korban secara sukarela menghimpun dana dari masyarakat sekitar,

Tabel 1
Manifestasi Partisipasi Masyarakat

No	Partisipasi Masyarakat	Korban		Bukan		Total	
		F	%	f	%	f	%
1	Pikiran	2	7	-	-	2	4
2	Tenaga	7	23	5	25	9	18
3	Harta benda	1	3	-	-	2	4
4	Keterampilan	2	7	2	10	3	6
5	Sosial	2	7	-	-	3	6
6	Tenaga dan harta	2	7	-	-	4	13
7	Pikiran dan tenaga	12	40	9	45	21	42
8	Pikiran dan harta	2	7	4	20	6	12
Jumlah		30	100	20	100	50	100

Sumber: Jawaban Responden (N=50)

menyediakan konsumsi untuk membantu korban banjir.

Prinsip lain yang dimiliki masyarakat Lampung adalah *Nemui Nyimah*, berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap pihak yang berhubungan dengan mereka. Masyarakat saling bahu membahu dalam meng-evakuasi korban banjir tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Masyarakat dengan penuh kesadaran bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada kepada pihak lain, dengan memberi bantuan baik berupa tenaga pada saat terjadi banjir dengan menggunakan perahu karet agar masyarakat yang terjebak dalam banjir dapat segera ditolong. Partisipasi masyarakat pada tahap evakuasi tidak selamanya berjalan lancar, mengingat tidak semua korban mau diajak untuk mengungsi. Masyarakat sebagian tetap berkeinginan untuk bertahan di rumahnya, walaupun rumah sudah tergenang banjir selama sehari-hari, meskipun beberapa korban tetap bersikukuh untuk bertahan, masyarakat tetap bermurah hati dalam bertutur kata, sopan santun, dan ramah tamah terhadap korban banjir. Masyarakat, baik korban maupun bukan korban tetap mempertahankan prinsipnya dalam penanggulangan banjir, yakni *Nengah Nyappur*, ditunjukkan dalam berpartisipasi secara aktif bersama-sama masyarakat dan elemen yang ada saling bekerja sama terutama pada saat terjadi banjir sehingga korban segera mendapat pertolongan.

Gambaran tentang manifestasi partisipasi yang dilakukan responden, baik oleh korban maupun bukan korban, sejalan dengan pendapat Soelaiman dalam Iskandar (1993:74), secara konseptual partisipasi sosial merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial; demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berazaskan pemerataan keadilan sosial; pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan; pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat

dan pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa sikap masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana diaktualisasikan dalam nilai-nilai kegotongroyongan. Partisipasi yang dilakukan dalam bentuk kegotongroyongan masyarakat, menurut korban berada pada kriteria “baik”, terbukti 14 orang (46,67 persen) menyatakan bahwa nilai kegotongroyongan dalam penanggulangan banjir dalam arti memadai, kemudian 9 orang (30 persen) menyatakan “cukup”, terdapat pula 3 orang (10 persen) yang menyatakan “sangat baik”. Dari 20 bukan korban banjir, 16 orang (80 persen) menyatakan “baik” 4 orang (20 persen) menyatakan “sangat baik”. Jika dikaji lebih lanjut, ternyata 92 persen dari keseluruhan responden, 50 orang menyatakan positif, dalam arti warga masyarakat masih menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan dalam penanggulangan banjir.

Sikap tersebut tampak dari perilaku dan tindakan dalam penanggulangan korban banjir, terutama pada saat mengevakuasi korban, dibutuhkan kecepatan sikap tanggap masyarakat untuk menanggulangi banjir. Kegotongroyongan yang dilakukan masyarakat Lampung merupakan bentuk kebersamaan masyarakat, meskipun bentuk gotong royong sudah berbeda manifestasinya, seperti diwujudkan dalam pemberian bantuan, baik dalam wujud uang, tenaga, maupun pikiran, tetapi pada prinsipnya masyarakat berupaya membantu korban banjir untuk meringankan penderitaannya.

Terbentuknya sikap sosial masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam penanggulangan korban bencana banjir diperlukan dan diciptakan motivasi serta prakondisi yang memungkinkan tumbuhnya sikap sosial masyarakat. Untuk berpartisipasi dapat dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan pengetahuan tentang bencana alam banjir, sebab akibatnya, memiliki sikap sosial terhadap korban bencana banjir dan aksi sosial dalam mewujudkan partisipasinya terhadap upaya-upaya penanggulangan korban

bencana banjir. Guna menghindari buruknya penderitaan korban bencana alam khususnya korban bencana banjir, diperlukan prakondisi bagi masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan secukupnya tentang hal ihwal bencana alam pada umumnya dan bencana banjir pada khususnya, baik masyarakat yang sering tertimpa bencana maupun masyarakat luas, khususnya masyarakat di lingkungan korban bencana banjir.

Sikap sosial yang ditunjukkan responden menurut Staub (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2003), dipengaruhi salah satu perilaku personal yakni adanya empati yaitu kemampuan individu untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati erat kaitannya dengan pengambilalihan peran dalam hal ini berbagai peran responden dalam berpartisipasi penanggulangan banjir.

Pihak yang memperhatikan korban banjir, menurut hasil wawancara terungkap bahwa pihak yang memperhatikan korban banjir sebagian besar responden 18 orang (60 persen) menyatakan, bahwa pemerintah merupakan pihak yang banyak memperhatikan dan aktif dalam penanggulangan bencana banjir, disusul oleh organisasi sosial sebanyak 8 orang (27 persen). Masing-masing terdapat 4 warga (13 persen) masyarakat di sekitar kawasan bencana dan tetangga korban peduli dalam menanggulangi bencana banjir. Dari data tersebut terindikasi, bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penanggulangan banjir. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Provinsi Lampung, pada hakekatnya sudah memiliki sistem mekanisme kerja dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini instansi sosial dan badan penanggulangan bencana alam (banjir) daerah, yang terjadinya hampir setiap tiga sampai lima tahun sekali.

Ife, J. dan Tesoriero, F. (2006:312-313) mengemukakan, bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu proses yang membutuhkan keterampilan, dan melibatkan pemantauan terus menerus tentang dampaknya terhadap rakyat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran

positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi, kontrol terhadap lingkungan seseorang, dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan memberi dampak pada kehidupan orang, sebagai tujuan partisipasi sosial merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

4. Rehabilitasi Sosial dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Banjir

Pada saat rekonstruksi masyarakat berbekal tekad serta sikap sosial yang dimiliki, berusaha mencari dan menyalurkan bantuan yang diperoleh. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial, masyarakat berpartisipasi secara aktif, dibuktikan dengan pernyataan dari berbagai pihak, bahwa sikap dan tindakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi sosial dalam bentuk mencari bantuan sosial guna merekonstruksi kerusakan akibat banjir. Hal ini dibuktikan dari pernyataan responden yang terdiri dari 50 orang, mereka adalah masyarakat korban banjir dan warga yang bukan korban banjir, 29 orang (58 persen) menyatakan “sangat aktif”, 15 orang (30 persen) menyatakan “aktif”, sedang yang menyatakan “cukup aktif” sebanyak 4 orang (8 persen).

Partisipasi masyarakat baik oleh korban maupun bukan korban sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, penanggulangan bencana banjir diperlukan rencana (perencanaan) dan koordinasi dalam suatu sistem manajemen. W. Nick Carter (1991: 50-60) menyatakan, bahwa manajemen penanggulangan korban bencana pada tahap ketiga, perbaikan kembali (rekonstruksi), merupakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat, membenahi kembali kerusakan akibat bencana. Proses ini dapat memakan waktu lebih panjang, mungkin lima sampai 10 tahun, merupakan tahap pemulihan bentuk fisik seperti semula sebelum terjadi bencana banjir. Pada tahap ini dilakukan perbaikan agar semua infrastruktur dapat berfungsi kembali, meliputi kegiatan perbaikan kembali fasilitas pelayanan yang penting bagi warga, perbaikan kembali ba-

ngunan umum serta rumah penduduk, juga diupayakan adanya rumah darurat, dan penanganan dan penyembuhan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang menderita karena bencana banjir.

Akibat banjir sangat merugikan kehidupan masyarakat, sering terjadi korban jiwa, biasanya korban meninggal karena terbawa aliran air yang sangat kencang, atau tenggelam dalam air banjir yang diam karena tidak memiliki keterampilan berenang. Banjir juga mengakibatkan kerugian harta benda, berupa rusaknya rumah, harta benda yang terbawa oleh air. Di sektor pertanian dan perkebunan, banjir yang merendam persawahan dan perkebunan, menyebabkan tanaman padi yang hampir panen menjadi puso (Purwanto, 2007: 6-18).

Partisipasi masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara korban maupun masyarakat bukan korban, baik dalam tahap rekonstruksi maupun rehabilitasi. Pada tahap rekonstruksi pembangunan jembatan, tujuh jembatan, satu jembatan permanen putus, delapan TK/PAUD, tiga SD dan dua bangunan SMP, tempat ibadah rusak berat, ratusan rumah terendam banjir dan satu rumah hanyut terbawa banjir. Partisipasi yang dilakukan masyarakat, baik oleh korban maupun bukan korban, saling bantu membahu untuk memperbaiki berbagai rumah dan fasilitas yang rusak, seperti pembangunan MCK yang merupakan kebutuhan pokok bagi korban. Warga secara sukarela bergotong royong mengumpulkan bahan bangunan untuk membuat jembatan darurat, agar bahan makanan, pakaian, obat-obatan untuk korban dapat segera diterima. Masyarakat bersama PMI dan BNPB daerah mendirikan dapur umum.

Partisipasi juga diberikan dalam bentuk pikiran dan tenaga, terutama oleh mereka yang bukan korban, sebesar 45 persen dalam bentuk tenaga, 25 persen dalam bentuk pikiran, dan harta diberikan 20 responden. Warga masyarakat bukan korban berpartisipasi dalam memberi bantuan, baik berupa makanan maupun obat-obatan, secara sukarela mereka menghimpun dana untuk meringankan beban korban banjir.

Partisipasi masyarakat juga diberikan oleh mereka yang kebetulan sebagai tokoh agama, baik sebagai korban maupun bukan korban, dengan memberi bimbingan spiritual keagamaan, dimaksudkan untuk menguatkan keimanan dan mental seseorang. Bencana merupakan salah satu ujian dari Tuhan yang diberikan sesuai dengan kemampuannya, dengan kekuatan iman korban banjir dapat menerima dengan ikhlas dan sabar sebagai pelajaran hidup, bahwa di balik kesukaran berupa bencana terdapat kemudahan. Selain memberikan bimbingan spiritual, responden memberi pendampingan secara psikologis pada warga lanjut usia dan anak-anak korban banjir, terutama diberikan oleh masyarakat bukan korban yang kebetulan sebagai tokoh masyarakat dan TKSK. Pemberian bantuan psikologis juga diperlukan, mengingat berbagai dampak yang dialami oleh korban, selain berbagai kerugian dalam bentuk perkebunannya rusak, rumah mereka juga terendam sehingga menimbulkan kecemasan bagi korban banjir.

Bimbingan psikologis menurut Faturochman sangat diperlukan, karena adanya perubahan psikis/kejiwaan/mental yang dirasakan seperti perubahan perilaku, marah, panik, kacau, traumatis. Perubahan seperti muncul rasa cemas akan masa depan, sedih, tertekan, putus asa, tidak berdaya, mudah tersinggung. Bencana tidak hanya menimbulkan ketakutan tetapi juga menghilangkan dorongan untuk kerja, untuk maju, dan berkembang bahkan dapat melenyapkan dorongan untuk hidup. Depresi atau kesedihan yang mendalam dapat berkembang menjadi keputusan korban merasa bahwa segala usaha yang dimiliki telah tiada (Faturochman, 2014).

Wujud partisipasi responden pada tahap rekonstruksi, seperti yang dikemukakan dalam teori sosial, menunjuk pada peran masyarakat sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Menurut Davis (1967:128): *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*. Dari pengertian ini terdapat tiga

hal yang penting dalam partisipasi: Pertama, keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar keterlibatan fisik. Kedua, partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya, dalam arti mereka menyumbangkan inisiatifnya untuk mencapai sasaran kelompok. Ketiga, mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas kelompok.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan yang dikemukakan Santoso S. Hamijaya (1974:6) yang menyatakan, partisipasi masyarakat dapat dirinci menurut bentuknya, yaitu partisipasi pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, serta sosial. Secara instrumental Talizidu Ndraha (1990) mengemukakan, bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat dikelompokkan dalam lima bentuk dukungan, yakni partisipasi buah pikiran, keterampilan, tenaga, harta benda.

Dari hasil wawancara terungkap, bahwa 96 persen masyarakat secara aktif melaksanakan merekonstruksi dampak banjir, walaupun masih belum terarah. Berbagai bentuk partisipasi sudah dilakukan oleh responden secara sukarela dan penuh kesadaran. Data di atas mengindikasikan, bahwa sikap kesetiakawanan sosial masyarakat Kabupaten Lampung di lokasi bencana banjir masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa nilai tradisi *nemui nyimah*, yaitu nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi sikap bermurah hati, saling membantu jika terjadi musibah yang menimpa warga di sekitarnya, juga nilai *nengah nyapur* yaitu nilai yang mengatur sikap pergaulan membuka diri, ikut serta berpartisipasi pada suatu perbuatan atau perilaku yang baik, dan membawa kemajuan bagi warga masyarakat di lingkungannya. Walaupun ketergantungan masyarakat pada pemerintah cukup tinggi, tetapi karena berkaitan dengan otonomi, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berusaha menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi setiap anggota masyarakat. Partisipasi tersebut dapat diciptakan melalui prakondisi antara lain, otonomi dan kebebasan untuk berpartisipasi bagi setiap anggota masyarakat,

menumbuhkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam, khususnya banjir yang secara rutin melanda kawasan pemukiman warga.

Hasil observasi tampak bahwa upaya rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan lancar dan mudah, karena kepedulian dan partisipasi masyarakat serta kerja sama yang baik antara masyarakat, orsos, pengusaha juga pemerintah daerah. Upaya penanggulangan banjir merupakan upaya yang berkelanjutan guna mereduksi atau meminimalisir dampak suatu bencana. Tujuan yang ingin dicapai agar masyarakat di daerah bencana berdaya, merasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mengerti dan memahami betul, selalu waspada dengan kondisi lingkungannya. Dari hasil tersebut dapat dimaknai berbagai pihak berpartisipasi dalam tahap rekonstruksi.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Teti Ati Padmi dkk, (2013: 5), bahwa keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang studi kebijakan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat, yang merupakan studi kasus kampung siaga bencana dalam mengurangi risiko bencana alam di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sleman, DIY, disebutkan bahwa upaya untuk penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara menyeluruh, masyarakat merupakan unsur penting sebagai basis utama dalam penanggulangan bencana (*community based disaster management*). Di satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama selama proses penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya, di sisi lain masyarakat (utamanya yang tinggal di daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana.

Partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi masih sebatas tenaga dan pikiran, pihak yang lebih banyak berpartisipasi pada tahap rehabilitasi terutama dana menurut infoman lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan organisasi sosial. Upaya yang dilakukan pihak

pemerintah dengan meningkatkan kualitas bangunan agar lebih kuat, sehingga apabila terjadi bencana bangunan lebih kuat diterjang derasnya air. Pada tahap ini partisipasi masyarakat lebih banyak pada partisipasi berbentuk tenaga dan pikiran agar bangunan lebih tahan lama terhadap terjang banjir. Hal tersebut sesuai dengan pendapat W Nick Carter (1991), pada tahap keempat penanggulangan bencana yakni tahap rehabilitasi, merupakan tahap untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana, pengalaman yang diperoleh selama menghadapi bencana menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijaksanaan pada masa mendatang. Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan program atau teknologi tertentu, yang memungkinkan bangunan dapat lebih tahan bencana banjir.

5. Penghambat dan Pendukung Rehabilitasi Sosial Korban Banjir

Kendala dalam penyaluran bantuan, menurut responden sering kali menjadi faktor penghambat dalam kegiatan rekonstruksi rehabilitasi sosial pada korban bencana. Kondisi tersebut disebabkan berbagai hal antara lain kurangnya kerja sama berbagai instansi pemerintah daerah, pihak organisasi sosial ataupun lembaga bantuan dari luar negeri. Pada tahap rekonstruksi terungkap dari data hasil penelitian, menurut responden korban 19 (63,33 persen) menyatakan “kadang-kadang ada kendala” 3 orang (10 persen) menyatakan ada kendala, selanjutnya 2 orang (6,67 persen) menyatakan sering kali ada kendala dan 4 orang (13,33 persen) menyatakan selalu ada kendala, sedangkan responden bukan korban menyatakan memang ada kendala bantuan pada saat terjadinya bencana, tetapi kondisi tersebut dapat segera diatasi dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bantuan segera terealisasi.

Dari hasil wawancara terhadap responden bukan korban terungkap bahwa dari 20 orang responden 12 orang (60 persen) menyatakan penyaluran bantuan “cukup terkoordinasi”, sedangkan dua orang (10 persen) menyatakan

“kurang terkoordinasi”. Dari pernyataan tersebut terungkap 70 persen memberi pendapat negatif. Mereka menyatakan adanya koordinasi hanya di tingkat pejabat instansi terkait dan pengurus organisasi sosial, tetapi pada tataran pelaksana operasional di lokasi bencana, ternyata koordinasi sangat kurang. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan bantuan dari pihak pemerintah kurang sesuai dengan yang dibutuhkan korban banjir, tetapi secara umum bantuan dari pemerintah cepat diterima oleh korban banjir.

Data di atas mengindikasikan bahwa kelancaran penyaluran bantuan pelaksanaan rekonstruksi dari pemerintah menurut korban dan bukan korban 28 orang (56 persen) menyatakan “cepat diberikan” dan “cukup cepat diberikan”, tetapi ada juga pendapat lain dari responden 18 orang (36 persen) menyatakan bantuan tidak cepat diberikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, antara lain penyumbang tidak memiliki fasilitas transportasi untuk sampai di lokasi banjir. Kondisi tersebut berakibat banyak bantuan yang menumpuk di satu lokasi, karena rusaknya infrastruktur jalan sebagai dampak dari bencana alam, sehingga bantuan sulit sampai di lokasi penampungan korban banjir.

Penyebab keterlambatan penyaluran bantuan, disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian terungkap, 38 orang (76 persen) menyatakan keterlambatan dan hambatan dalam penyaluran bantuan karena kesulitan transportasi, sulit menjangkau masuk lokasi bencana. Kendaraan besar sulit masuk ke lokasi sehingga banyak bantuan yang lambat diterima oleh korban banjir, hanya kendaraan kecil yang dapat masuk ke lokasi bencana banjir. Responden bukan korban menyatakan pihak pelaksana kesulitan memperoleh bantuan peralatan transportasi untuk mengangkut bantuan. Hal ini membuktikan bahwa petugas di lapangan kurang koordinasi dengan baik. Data hasil wawancara terungkap, 10 responden (20 persen) menyatakan kurang adanya kerja sama dan koordinasi antarpetugas operasional di lokasi bencana, 5 orang (10 persen) menyatakan keterlambatan disebabkan ketidaklengkapan data korban. Hal

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Akhmad Purnama & Murdiyanto (2013: 194) tentang penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam yang merupakan studi kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura, terungkap bahwa dalam pemberian bantuan kepada korban bencana terdapat kendala dan kekurangan disebabkan bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan korban, juga kendala kondisi daerah bencana yang sangat sulit, memungkinkan bantuan yang diberikan tidak tepat waktu diterima korban, walaupun beberapa instansi terkait sudah melaksanakan koordinasi dengan baik

6. Pelaksanaan Mitigasi (penjinakan) Penanggulangan Bencana Banjir

Mitigasi merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan penanggulangan bencana. Data hasil penelitian terungkap, 50 orang responden yang terdiri dari korban dan bukan korban banjir, menunjukan 25 orang (50 persen) menyatakan, bahwa pihak yang berkoordinasi dengan masyarakat adalah pihak pemerintah desa dengan organisasi sosial setempat, dan petugas Dinas Sosial, selanjutnya 15 orang (30 persen) menyatakan koordinasi antara pemerintah desa dengan organisasi sosial lokal. Dari data di atas sebanyak 80 persen responden menyatakan, bahwa mereka bekerja sama dengan berbagai pihak membuktikan bahwa masyarakat dan pejabat pemerintah desa, bersama pengurus organisasi sosial lokal mampu berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan mitigasi (penjinakan) terhadap bencana banjir di daerahnya, tanpa menunggu uluran bantuan dari pihak pemerintah kota/kabupaten bahkan sampai tingkat pemerintah Provinsi Lampung. Walaupun terdapat pula 10 orang (20 persen) yang menyatakan menunggu uluran bantuan dan kebijakan dari pihak pemerintah kabupaten dan kota.

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan berbagai elemen yang ada sebagai wujud dari bentuk partisipasi dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat, baik korban maupun bukan korban, terlibat aktif bergotong

royong dalam pembangunan jembatan dan tanggul serta pengerukan aliran sungai. Masyarakat juga berpartisipasi sosial ikut aktif dalam kegiatan penyuluhan, berupa penyadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Santoso S. Hamijaya (1974:6) yang menyatakan, partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, dengan ikut pertemuan dalam bentuk sasehan, arisan, penyuluhan dan seminar.

Kegiatan mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari bencana. Partisipasi masyarakat dalam tahap penanggulangan bencana yakni mitigasi sesuai dengan yang dikemukakan Anna's Faujah yang menyatakan upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan konstruksi untuk menahan serta untuk memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk nonstruktural, di antaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah (Anna' Faujiah, 2013). Mitigasi dapat dilakukan baik melalui pembangunan dapat dilakukan dalam fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini lebih banyak pada partisipasi tenaga yakni dalam pembangunan jembatan yang rusak berat akibat diterjang banjir. upaya mitigasi yang dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural.

Kegiatan mitigasi merupakan program khusus untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada bencana yang akan datang, pelaksanaan mitigasi mengarah pada upaya pencegahan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Mitigasi lebih diartikan sebagai upaya pencegahan, guna mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana di kemudian hari, juga memberikan pengetahuan pada masyarakat

tentang sistem perlindungan infrastruktur yang vital dan perbaikan sistem pertanian.

Permasalahan yang menghambat pelaksanaan manajemen bencana tidak dapat diprediksi, mengingat setiap wilayah secara geografis dan nilai sosial budayanya memiliki kondisi yang berbeda. Kendala sulitnya transportasi masuk ke wilayah bencana karena infrastruktur yang rusak, juga jauhnya jarak antara ibukota kabupaten atau kecamatan dengan wilayah bencana. Namun demikian sebenarnya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah mengalokasikan dana untuk bencana banjir, terutama dana untuk tanggap darurat. Pos anggaran tersebut administrasinya tidak rumit apabila dibandingkan dengan pembiayaan rekonstruksi setelah bencana. Apabila dikaji dari sering tidaknya bantuan pemerintah daerah mengalami keterlambatan, terungkap dari 50 responden 18 orang (36 persen) menyatakan sangat sering terlambat, tetapi 26 orang (52 persen) tidak tahu. Ketidaktahuan responden terjadi karena korban yang dapat mengakses informasi mengenai keberadaan dana sangat terbatas.

Partisipasi dalam kegiatan mitigasi merupakan suatu kegiatan penanggulangan bencana pada tahap kelima, seperti yang dikemukakan Nick Carter (1991), kegiatan ini biasanya dijadikan program khusus untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, yang mungkin menimpa sekelompok orang tertentu. Tahap penjinakan (mitigasi) pada umumnya diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan yang dilakukan pada saat bencana sedang terjadi, kegiatan ini dimaksudkan guna mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Bentuk kegiatan penjinakan meliputi pemberlakuan undang-undang tentang tata ruang bangunan, serta penerapan peraturan tata guna tanah, juga pemberlakuan peraturan yang difokuskan pada keselamatan penggunaan tanah, lautan serta udara.

Mitigasi juga diartikan sebagai program perbaikan sistem pertanian untuk mengurangi gangguan musim panen, pengenalan sistem perlindungan infrastruktur vital. Upaya membangun prasarana pelengkap, misalnya pembangunan

peralatan pencegahan banjir (pintu air, dan saluran). Nick mengemukakan, mitigasi (penjinakan) merupakan kegiatan yang bertujuan memperkecil kerugian yang timbul akibat peristiwa bencana terutama terhadap jiwa raga manusia, harta benda, dan berbagai bangunan. Kegiatan mitigasi meliputi pembanunan tanggul/terasiring, gerakan penanaman pohon pelindung/penghijauan, dan penataan pemukiman atas dasar kerawanan.

Kelima tahapan manajemen penanggulangan bencana diberikan kepada seluruh warga masyarakat daerah rawan bencana khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Sependapat dengan W Nick Carter, bahwa apabila kesadaran dan pemahaman tentang usaha penanggulangan bencana alam termasuk di dalamnya bencana banjir telah dimiliki oleh masyarakat, pada hakekatnya masyarakat telah memiliki perencanaan untuk peduli atau memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Kepedulian terjadi karena adanya situasi sosial yang mendorong solidaritas setiap individu atau setiap warga, yaitu rasa bersatu dalam kepentingan, kehendak, dan perbuatan dalam bersimpati pada penderitaan orang lain karena adanya bencana alam banjir.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, warga masyarakat Lampung “cukup paham” pengetahuan mereka tentang bencana banjir, sebagian besar responden menyatakan penyebab banjir adalah penggundulan hutan yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai, karena intensifikasi pertanian dan perkebunan kopi dan lada. Secara geografis, Lampung Utara memiliki sungai yang mengalir dari arah barat ke timur. Arah barat merupakan wilayah berbukit-bukit, sedangkan arah timur landai. Aliran sungai sangat potensial untuk pengembangan irigasi, tetapi jika tataguna airnya kurang baik akan terjadi banjir pada daerah yang landai tanahnya.

Sikap sosial masyarakat Lampung dalam upaya penanggulangan banjir “baik”, terutama persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, yakni berteriak dan memukul kentongan,

cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat masih bersifat tradisional, belum memanfaatkan peralatan informasi dan telekomunikasi yang lebih modern dan canggih. Hal tersebut membuktikan bahwa sikap kesetiakawanan sosial dan perilaku kegotongroyongan masyarakat masih cukup tinggi. Pihak yang memperhatikan korban banjir ternyata adalah pihak pemerintah daerah Provinsi Lampung dan berbagai organisasi sosial lokal. Kadang-kadang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan, terhambat karena kurangnya data korban tetapi secara umum bantuan yang diberikan pada korban cukup cepat karena partisipasi dari masyarakat setempat.

Upaya rehabilitasi sosial dilakukan dengan mencari dan menyalurkan bantuan dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan organisasi sosial baik dalam negeri maupun luar negeri, atau dengan pihak pengusaha swasta. Faktor penghambat penanggulangan bencana banjir di Provinsi Lampung 76 persen responden menyatakan kesulitan transportasi, untuk masuk di daerah bencana. Faktor pendukungnya adalah sikap kesetiakawanan sosial dari masyarakat, masih melekatnya sikap gotong royong sehingga mempercepat dan memperlancar bantuan serta pemulihan akibat bencana banjir.

Rekomendasi yang diusulkan adalah perlu kiranya upaya mitigasi terhadap bencana dengan melakukan pencegahan terhadap bencana banjir dengan peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang bangunan. Penerapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, penggunaan tanah, dan perbaikan sistem pertanian. Beberapa upaya antara lain perlunya perbaikan saluran air yang tersumbat atau dangkal, pengorganisasian dan pengurusan bantuan bagi korban, perlu pembagian bantuan secara adil, pembentukan organisasi penanggulangan korban banjir tingkat desa, sosialisasi perihal faktor penyebab banjir dan akibatnya, kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir, penyediaan lumbung (pangan) desa guna menghadapi terjadinya banjir, agar tidak tergantung pada bantuan orang lain.

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang faktor penyebab dan akibat banjir, dari berbagai instansi terkait seperti halnya dinas kehutanan, sosial, dan kantor kimpraswil (Pemukiman dan Prasarana Wilayah). Pengawasan terhadap penggundulan hutan, pemanfaatan hutan dengan tata ruang, menyosialisasikan pelestarian lingkungan dan pemeliharaan aliran sungai. Meminimalisir dampak kerusakan hutan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, dengan meningkatkan keterampilan warga masyarakat jika terjadi banjir. Mempersiapkan peralatan transportasi seperti halnya perahu karet, maupun peralatan komunikasi dan informasi, sehingga secara cepat dapat mengevakuasi korban dan penyaluran bantuan. Mengembangkan program kampung siaga bencana di Kabupaten Lampung Utara secara optimal, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang kampung siaga bencana. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa kampung siaga bencana merupakan wadah formal untuk mewadahi partisipasi atau sikap sosial masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir berbasis masyarakat, dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghimpun dan menggali potensi masyarakat untuk menghadapi bencana banjir yang setiap waktu melanda Kabupaten Lampung Utara.

Melalui wadah program kampung siaga bencana tersebut diharapkan masyarakat memahami akan bahaya dan resiko bencana banjir, juga terbentuknya jaringan siaga bencana berbasis masyarakat, serta memperkuat interaksi sosial dan sikap perilaku sosial masyarakat. Dalam wadah kampung siaga bencana berupaya mengorganisasikan sikap dan partisipasi sosial masyarakat di daerah rawan bencana banjir agar berdaya dan tetap siaga, terlatih menghadapi bencana banjir. Berusaha mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat menghadapi bencana banjir secara berkesinambungan, melakukan motivasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar berperan aktif dalam kegiatan tanggap darurat dan pascabencana, membantu mengarahkan

relawan dan kapasitas yang dimilikinya, terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.

Pustaka Acuan

- Abdul Syani. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Dunia Pustaka
- Akhmad Purnama dan Murdiyanto, *Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam*, Studi kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam Di Kota Jayapura, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial '
- Anna' Faujiah 22 Desember 2013. *Mitigasi Bencana*. faujiahna.blogspot.co.id/2013
- Abu Ahmadi, H. (1990). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta
- Clive Gifford. (2009). *Banjir dan kekeringan* Alih Bahasa Kurniawan Nugroho. Solo: Tiga Serangkai,.
- Davis, K. (1967). *Human Relation at Work, The Dinamics of Organizational Behavior*. Mc Grow Hill Book Company.
- Dayakini, T. Dan Hadaninia. (2003). *Psikologi Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Graham Richards, (2010). *Psikologi; Serial konsep-konsep kunci*, diterjemahkan dari *Psychology* oleh Jamilla, Yogyakarta: Pustaka Baca
- Gunanto Surjono. (1996). *Pengkajian Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS
- Gunawan Sumodiningrat. (2000). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Holil Sulaiman. (1985). *Partisipasi Masyarakat*. Bandung: STKS.
- Hari Poerwanto. (2000). *Kebudayaan dan lingkungan- Dalam perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J., & Tesoriero. F., (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (edisi 3). Judul Asli: *Community Development: Community-Base Alternatives in the Age of Globalization*, Pearson Education Australia, Unit 4, level 3, 14 Aquatic Drive Friends Forest NSW, 2006 (edidi 3).
- Iskandar, J. (1993). *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.
- Ikawati dan Chatarina R. (2009). *Kepedulian Masyarakat terhadap Kepuasan 'Difabel' Korban Gempa dalam Memperoleh Bantuan Aksesibilitas*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Komir Bastaman. (2000). *Pemberdayaan*, Bandung: BDPTS, Makalah Tidak Diterbitkan.
- Moelyarto Tjokrowinoto. (1974). *Beberapa Teknik di dalam Hubungan Kerja*, Bulletin BPA, Yogyakarta: UGM,
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarsa.
- Purwanto. (2007). *Awat Banjir*, Jakarta: Grafiti,
- Teti Ati Padmi Dkk. (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
- W. Nick Carter, (1991), *Managemen Penanggulangan Bencana*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Data CIP,
- _____. (2014). *Lampung dalam Angka*, Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan Badan Pusat Statistik (2007). *Pemetaan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Rawan Bencana Alam*.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), (2006). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Santoso S. Hamijaya. (1974). *Beberapa Catatan tentang Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Pendidikan.
- Sri Dewiyanti. (2004). *Hubungan antara Kemampuan Berempati dengan Perilaku Prosocial*. Yogyakarta: Uniersitas Islam Indonesia.
- Sunit Agus Tri Cahyono. (2011), *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Banjir Bandang di Wasior*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Kompas com. 11 Desember 2014 *Tiap Menit, Indonesia Kehilangan Hutan Seluas Tiga Kali Lapangan Bola*. Sains.kompas.com/read/2014/12/11
- Faturochman. *Dampak Psikologis Bencana Alam* <https://www.google.co.id>, diakses 11 Desember 2014

Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga terhadap Anak Perempuan

Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia, Telp 0274. 377265.

HP 08121584184. Email: tursilarini@gmail.com.

Diterima 29 Februari, diperbaiki 25 Maret, disetujui 4 Mei 2016.

Abstract

Incest is a kind of sexual violence conduct that mostly done by close person or related blood, the victims are girls in domestic areas. Children that should get protection and love to grow normally, but they are suffering from violence in domestic areas. This research is to describe the kinds of violence against children and girls, patriarchal value and culture that contribute to incest, and its settlement. Data resources from local social institution, non-government organization, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC of Bengkulu Social Agency, victims, and victim families. Data were gathered through interview, documentary analysis, and analysed through qualitative-descriptive technique based on incest cases. The result showed that violences against the girls were reflections of patriarchal value system, men domination over girls, and the strong against the weak or subordinated. The settlement were, not all the victims, family and community, having courage to report incest conduct, so the settlement needs serious effort and mindset change to reconstruct community having gender equality. Incest handling needs grand cultural and structural strategy, to combine eight ministries overseeing the case, through law enforcement or any policy and community culture to set up synergy on handling incest, that needs comprehensive and continuity handling, on the perpetrator, family, and incest victims.

Keywords: *incest; violence; patriarchy*

Abstrak

Inses merupakan bentuk tindak kekerasan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau bertalian darah, korbannya adalah anak perempuan di ranah domestik. Beberapa kasus inses dapat dijumpai di setiap kota atau kabupaten di Indonesia, menunjukkan tren meningkat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi anak mengalami kekerasan di ranah domestik. Kajian ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, nilai dan budaya patriarkhis memberi andil terhadap inses dan bentuk penyelesaiannya. Sumber data berasal dari instansi sosial di daerah, lembaga swadaya masyarakat, P2TP2A, WCC Aisyiah, RPTC Dinsos Provinsi Bengkulu dan korban, keluarga korban. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, telaah dokumen, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menampilkan kasus-kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriarkhis, dominasi laki-laki terhadap perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai. Penyelesaian inses, belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak inses, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan perubahan mindset sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Penanganan inses diperlukan adanya *grand* strategi struktural dan kultural, memadukan delapan kementerian yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan perangkat hukum atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses, karena membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan, menyangkut pelaku, keluarga, korban inses.

Kata Kunci: Inses; kekerasan; patriarkhis

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan terhadap anak secara kuantitas dan kualitas semakin tinggi dan beragam bentuk kekerasannya. Pusat Data dan Informasi

Kementerian Sosial (Pusdatin) terdapat 4,1 juta anak mengalami berbagai masalah, termasuk kekerasan dan tindakan seksual. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupa-

kan suatu kejadian luar biasa sehingga Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Anak) menetapkan tahun 2013 sebagai status darurat Nasional kejahatan seksual terhadap anak.

Data kekerasan terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara bulan Januari hingga Juni 2013 ada 1.032 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 290 kasus (28 persen), kekerasan psikis 207 (20 persen), dan kekerasan seksual 535 kasus (52 persen). Jenis kekerasan seksual berupa sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus). Kasus pelaku inses di Indonesia diancam dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun untuk korban satu orang, dan 11–15 tahun jika korbannya di bawah umur dan lebih dari satu orang, hal ini menurut KUHP pasal 291(KPAI, 2014). Segala bentuk kekerasan terhadap anak menurut Haedar Nasir (1997: 58), beragam bentuk, kategori dan operandinya, semuanya akan merugikan dan merusak jiwa anak. Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi akan terekam dalam alam bawah sadar anak hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindak tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Hasil penelitian Malamuth (1986) menemukan, kekerasan seksual berupa permerkosaan dianggap sebagai gabungan antara seks dan agresi, maka motivasi sebenarnya sulit ditentukan secara sekilas dan langsung. Korbanlah yang sebenarnya “terhukum” dalam arti sedalam-dalamnya, karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan

terenggutnya kehormatan yang sebelumnya telah dijaga dengan sebaik-baiknya, justru kini telah dirusak orang, sehingga mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik fisik maupun psikis, ekonomi dan sosial.

Komnas Perempuan Anak tahun 2011 mencatat kekerasan terhadap anak sebesar 2.509 anak, meningkat tahun 2012 sebesar 2.637. Komnas Perempuan dan Anak mencatat kasus inses di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008 lalu, dilihat dari korban sebesar 73 persen anak perempuan, dan 27 persen anak laki-laki.

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual dan pelanggaran HAM. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan di dalam keluarga, dalam kenyataannya keluarga bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa kasus inses yang terjadi disebabkan karena keretakan hubungan antar kedua orang tua, rendahnya moral pelaku, kondisi rumah yang tidak layak huni, adanya peluang dan kesempatan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual. Menurut Weinberg (dalam Afiani Ika Limananti, dkk, 2005), keberadaan inses di tengah-tengah kehidupan masyarakat makin marak, terjadi seiring penurunan moral orang tua atau dapat disebabkan karena retaknya hubungan kedua orang tua yang mengakibatkan anak menjadi korban, ketika kedua hubungan orang tua dalam keadaan normal, inses tidak akan terjadi. Selain faktor hubungan kedua orang tua yang retak, faktor kemiskinan dan lingkungan sekitar (tidak ada kebersamaan antara masyarakat sekitar, atau juga karena jarak antarrumah berjauhan) dapat mendukung perbuatan inses. Disorganisasi kelu-

Tabel 1
Data Kasus Inses Menurut KPAI dan Media Massa

Provinsi/Kota	Tahun	Jumlah	Keterangan
Jambi	2008	1 kasus	Inses antara ibu dengan anak kandung
Bengkulu	2009-2010	5 kasus	Inses
Aceh	2005-2010	3 kasus	Inses adik dengan abang ipar, ayah tiri dengan anak tiri
Sumatera Utara	2010	1 kasus	Inses ayah kandung dengan anak dibawah umur

Sumber: KPAI 2014

arga, mengakibatkan celah yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan inses dengan anggota keluarga lainnya. Posisi anak perempuan dalam keluarga menjadi rentan dalam kondisi disorganisasi keluarga karena hubungannya tidak berjalan mulus baik dengan ayah kandung, ayah tiri, maupun kakak tiri laki-laki, sehingga anak perempuan berada dalam posisi pasif dan rawan menjadi korban kekerasan.

Inses merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, karena korbannya seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Merebaknya beberapa kasus inses menurut psikolog Dadang Hawari (dalam Nursyahbani dan Mumtahanah, 2002: 212) menunjukkan, masyarakat kita sedang sakit. Salah seorang korban inses yang dilakukan ayah dan pamannya ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya dituduh mengada-ada, ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Anak merupakan makhluk yang harus mendapat perlindungan karena mereka belum dapat melindungi dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, dengan demikian orangtua sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberi perlindungan dan memberi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan. Akan tetapi realitanya rumah atau ranah domestik bukan tempat yang aman bagi anak, karena anak justru mengalami tindak kekerasan dari orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan, rasa aman, nyaman bagi kehidupan anaknya. Anak, khususnya perempuan di dalam keluarga berada pada posisi lemah, dibawah kontrol orang dewasa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang menentukan kehidupannya, yaitu ayah dan ibu, saudara yang lebih tua dan kuat, yang seharusnya memberi kasih sayang dan mendidik dengan cara yang bijaksana, tetapi kekuasaan tersebut sering disalahartikan atau dilanggar sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan dalam ranah keluarga. Ditengarai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarkhi atau dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan di ranah domestik dan publik. Di dalam struktur patriarkhi, melahirkan banyak

sistem dan kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga kekerasan terjadi di hampir semua lini kehidupan di masyarakat (Mufidah, dkk, 2006).

Pada struktur dominasi laki-laki kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas, dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Segala bentuk kekerasan seringkali tanpa disadari merupakan refleksi dari sistem patriarkhi tersebut (Dwi Hapsari Retnaningrum, 2009). Beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi anak, khususnya anak perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepedulian dari semua pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak perempuan di ranah domestik

Berpijak dari permasalahan tersebut sangat menarik untuk mengkaji terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah atau saudara yang berada di ranah domestik. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam meliputi: Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak; Apakah sistem nilai dan budaya berperan untuk terjadinya inses terhadap anak; Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan korban, keluarga maupun masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap anak?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan utama menurut Travers (1978) dan Gay (1976) dalam Consuelo G Savila (1993:70) adalah menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Lokasi dilakukan di daerah yang tinggi kasus kekerasan terhadap anak khususnya inses, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Fokus penelitian ini mendeskripsikan tentang kasus berkaitan bentuk kekerasan terhadap anak

perempuan, sistem nilai dan budaya berkait kekerasan seksual terhadap anak, bentuk penyelesaian kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumahtangga. Sumber data terdiri dari korban, keluarga, kepala seksi Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Sosial Provinsi, LSM, ketua Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Bengkulu, lembaga swasta WCC Aisyiah, LBH Bintang Keadilan, P2TP2A, Yayasan Ceria, LKS Peduli Kasih. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan *interview guide*, FGD, telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis data melalui tiga tahap menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), yaitu data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing*, untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

C. Kasus Kekerasan Seksual di Provinsi Bengkulu

1. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Ranah Domestik

Batasan kekerasan terhadap perempuan menurut PBB, adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi. Secara tegas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap anak, termasuk anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terhadap anak berjenis kelamin perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial. Dalam

perspektif gender, dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan bernegara (Mas'udi, 1997:58). Secara keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkhis, pada masyarakat patriarkhis perbedaan norma yang diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan juga terlihat jelas, pihak perempuan umumnya memperoleh rambu-rambu yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, akibatnya kedudukan dan peran laki-laki cenderung lebih dominan. Di lingkungan domestik, ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, isteri terhadap suami dan anak terhadap ayahnya, merupakan salah satu faktor kuat terjadinya ketimpangan kekuasaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan terhadap perempuan (isteri atau anak).

Tindak kekerasan terhadap anak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena berdampak terhadap korban, baik berupa luka fisik, psikis maupun sosial, bahkan menimbulkan trauma bagi korban sehingga mengganggu keberfungsian sosial seseorang dalam menjalankan aktifitas kehidupannya. Kekerasan terhadap anak banyak yang tidak teridentifikasi atau dilaporkan, karena korban merasa malu untuk melaporkan permasalahan yang dialaminya pada lembaga, instansi yang memberi pelayanan terhadap korban tindak kekerasan. Banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap disebabkan budaya masyarakat yang memegang teguh pada pandangan, bahwa permasalahan keluarga merupakan masalah intern, yang tabu untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan permasalahan kekerasan anak sulit tertangani tanpa adanya kesediaan korban, keluarga untuk melaporkan atau meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang, baik instansi, lembaga maupun tenaga ahli.

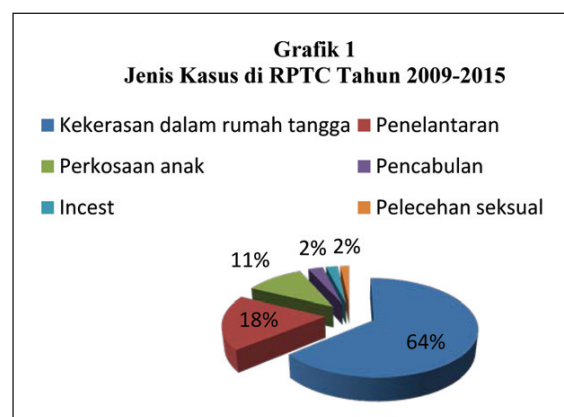
Menurut Kartini Kartono (1989:255), inses adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar perkawinan, sedangkan mereka terkait dalam hubungan ke-

kerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen (2005), inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antarsesama keluarga kandung.

Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus inses seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau dilaporkan, padahal banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat. Belum terbukanya masyarakat tentang kasus inses karena masyarakat berpandangan bahwa inses sesuatu yang tabu, menurut Freud (dalam Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) apabila inses dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga, suku bangsa sendiri.

Data terlupakan tentang kekerasan perempuan dan anak dari instansi pemerintah (Dinas Kesejahteraan Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana), dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Peduli Kasih, Ceria, Women Crisis Center Aisyiah dan LBH Bintang Keadilan mencatat, bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan atau ada kecenderungan meningkat. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dapat dilihat dalam grafik 1 sebagai berikut.

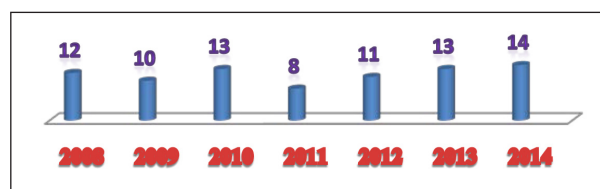
Grafik 1
Jenis Kasus di RPTC Tahun 2009-2015



Sumber: Data RPTC tahun 2015

Masih banyak korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga banyak kasus tersebut tidak teridentifikasi atau terlupakan. Realitanya korban kekerasan masih merupakan fenomena gunung es, data kasus kekerasan inses yang dilaporkan tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus kekerasan inses yang terjadi di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan di lembaga lain, LKS Ceria mencatat jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 meliputi KDRT baik fisik maupun non-fisik, pemerkosaan, inses, pencabulan, penelantaran ekonomi, dapat dilihat dalam grafik 2, sebagai berikut.

Grafik 2
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2008-2014

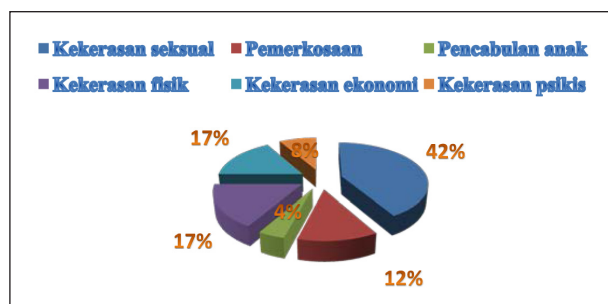


Sumber: Lembaga Ceria, Bengkulu 2015

Data kasus kekerasan perempuan dan anak dari jenisnya meliputi KDRT (fisik, psikis, dan sosial), perkosaan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, penelantaran anak dan keluarga,

dan pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung dan tiri. Pada Tahun 2014 tercatat ada dua kasus inses yang dilaporkan ke Lembaga Ceria. Lembaga lain juga terlibat memberi pendampingan terhadap korban, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Peduli Kasih di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Data tahun 2014-2015, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan di lembaga tersebut digambarkan dalam grafik 3, sebagai berikut.

Grafik 3
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Tahun 2014-2015



Sumber: LKS Peduli Kasih 2015

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan di LKS Peduli Kasih, ada enam jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya yaitu 10 kasus (42 persen), kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi masing-masing empat kasus (17 persen), kemudian diikuti dengan pemerkosaan tiga kasus (12 persen) dan pencabulan anak ada satu kasus (8 persen), sedangkan kasus kekerasan inses tercatat enam kasus.

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang berhasil terungkap, dari laporan kasus P2TP2A Kota Bengkulu tahun 2014 sebagai berikut: Penelantaran lima kasus; pencabulan empat kasus; kekerasan dalam rumah tangga tujuh kasus; jenis kekerasan terhadap perempuan yang lainnya tiga kasus. WCC Aisyiah mencatat kasus inses perempuan dan anak tahun 2006-2015 berjumlah enam kasus yang terungkap dan tertangani, korban tidak hanya berasal dari Kota Bengkulu tetapi dari kabupaten Rejang Lebong,

Kepahiang. Lembaga lain yang melakukan pendampingan hukum yaitu LBH Bintang Keadilan, mencatat dua kasus inses yang telah didampingi untuk mendapat bantuan hukum, korban dari Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jangkauan pendampingan hukum tidak terpusat di kota saja tetapi semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Bengkulu.

Data tersebut menunjukkan, bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, sosial maupun seksual tidak hanya mendominasi di wilayah perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi di wilayah perdesaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diungkap atau dilaporkan sudah sampai ke wilayah-wilayah perdesaan yang jauh dari hingar bingar kehidupan masyarakat perkotaan. Kehidupan masyarakat perkotaan diidentikkan dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan serba mentolerir terhadap perilaku masyarakatnya, tetapi dalam realitanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, baik di wilayah rumah tangga maupun wilayah publik, di perdesaan dan perkotaan.

2. Nilai Budaya Patriarkhis dan Kekerasan Seksual di Ranah Domestik

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat kompleks dan pada umumnya bernuansa ketimpangan gender, selain perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak, karena anak berada dalam posisi yang lemah. Anak dalam keluarga dibawah kontrol orang yang memiliki kewenangan yang menentukan kehidupannya, misal ayah, ibu, saudara lebih tua yang seharusnya memberi perlindungan, kasih sayang, tetapi kekuasaan tersebut disalahartikan sehingga anak rentan mengalami kekerasan.

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, sifat tersebut dapat saling dipertukarkan, berubah dari waktu

ke waktu berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya (Mansour Fakih, 1997). Berbagai tindak kekerasan tersebut adalah perkosaan, inses, penyimpangan seksual, kekerasan di tempat kerja, merendahkan perempuan atau pornografi, dan penghinaan perempuan melalui media massa (Afiani Ika Limananti, 2005: 1), dan yang sangat memprihatinkan korban adalah seorang anak yang akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, karena biasanya penderitaan korban sulit dihilangkan dalam kehidupannya.

Kultur yang patriarkhis mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertegas keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat, yaitu ideologi seksualitas, dimaksudkan identitas seksualitas perempuan dikonstruksikan oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat berlakunya kultur patriarkhis. Sheffield (dalam Hess dan Ferre, 1991:171), mengistilahkan ideologi seksualitas semacam ini sebagai *sexual terrorism*, suatu sistem ideologi laki-laki mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semuanya termanifestasikan melalui kekerasan. Pandangan ideologi ini bahwa perempuan mempunyai beberapa sifat seksual yaitu menggoda, menggairahkan dan karenanya telah memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mengontrol, mengintimidasi dan menghukum perempuan secara seksual. Menurut Coomarawamy (dalam Schuler, 1992), bahwa kelamin perempuan diidentifikasi dengan peranan sosial tertentu dalam masyarakat, karena kelaminnya, perempuan telah menjadi sasaran kekerasan tertentu, misalnya pembunuhan janin perempuan, pemerkosaan, *female-genital mutilation*.

Ideologi patriarkhi sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di Bengkulu, tercermin pada kedudukan ayah (laki-laki) dalam rumah tangga. Laki-laki adalah penentu utama dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan

perempuan dalam rumah tangga sebagai warga kelas dua sehingga perempuan (isteri atau anak) rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dari pihak suami atau ayah. Kasus inses sebagai salah satu kejahatan seksual di abad ini, inses merupakan salah satu bentuk *sexual terrorism*. Inses sebagai manifestasi dari dominasi dan pengontrolan laki-laki atau ayah atau kakak terhadap perempuan atau anak atau adik karena berjenis kelamin perempuan. Beberapa kasus inses yang dilaporkan semua mengalami intimidasi, bujuk rayu, iming-iming akan dibiayai sekolah, dipenuhi segala kebutuhan, anak dalam posisi tidak berdaya serta sikap rasa hormat dan patuh anak kepada ayahnya. Anak sebagai korban selalu berada dalam posisi yang lemah, tidak berdaya, pasrah menerima perlakuan kekerasan dari pelaku atau ayah atau paman atau kakak, sebagai individu yang selalu dipersalahkan karena dianggap membawa aib, menggoda, memancing, tidak berusaha menolak dan berbagai stigma melekat pada korban, anak perempuan.

Korban kekerasan seksual inses mendapatkan kekerasan ganda, selain sebagai korban inses, mereka juga mengalami bentuk kekerasan yang lain, yaitu kekerasan secara sosial berupa diasingkan, dikucilkan, diusir karena penyebab aib di masyarakat istilah masyarakat di Bengkulu *cuci kampung*, tidak boleh sekolah lagi, korban selalu dipersalahkan oleh ibu, keluarga besar ayah karena melapor atau membuka aib keluarga. Kondisi ini menjadikan korban merasa sendiri menghadapi semuanya, sikap pasrah akan muncul dengan sendirinya karena tidak ada pilihan lain. Informasi hasil wawancara dengan korban inses yang dilakukan ayah kandung menceritakan, “Pada akhirnya semua sudah terjadi, yang saya pikirkan sekarang hanya pada anak yang baru berusia 4 bulan tetap akan saya rawat sebaik-baiknya, tetapi masa depan saya suram, putus sekolah yang harusnya bisa ikut ujian dan lulus SLTP. tetapi semua ini sudah terjadi, saya mau bangkit lagi bersama anak saya, meskipun sudah membuat aib keluarga.” (Pj, usia 15 tahun dari Kabupaten Seluma).

Kekerasan terhadap anak berjenis kelamin perempuan khususnya inses yang mengalami kekerasan ganda, terjadinya kekerasan tersebut dapat dihubungkan adanya stigma sosial yang masih ada di masyarakat. Korban dipandang membawa aib sehingga mereka dipersalahkan dan dipandang rendah karena korban dianggap tidak normal dan tentunya berbeda dengan perlakuan terhadap orang yang normal. Stigma sosial tersebut selalu melekat pada perempuan. Menurut E. Goffman, tentang teori stigma sosial, bahwa perempuan adalah salah satu kelompok yang rentan mendapatkan stigma (Poloma, 1979). Pada saat perempuan tidak sesuai dengan identitas sosial yang diharapkan masyarakat maka perempuan dibebani stigma, segala bentuk kekerasan berupa pelecehan, kekerasan fisik, psikis ataupun perilaku subordinasi merupakan konsekuensi dari stigma tersebut. Teori tersebut dapat menjelaskan mengapa ketika perempuan mengalami pemerkosaan atau inses, cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan lainnya, seperti dihina, diasingkan, disalahkan, atau dibuang oleh keluarganya sendiri (Zohra Andi Baso, dkk, 2002).

Fenomena inses terhadap perempuan atau anak adalah suatu realita sosial yang kompleks. Sumber utama kekerasan mengarah pada perbedaan kekuasaan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Inses berdampak luar biasa bagi masa depan korban dan kelangsungan keluarga karena mengakibatkan masa depan korban menjadi tidak pasti, anak hasil hubungan inses tidak jelas masa depannya serta keluarga menjadi tercerai berai baik pelaku, korban maupun keluarga besar. Hasil wawancara dengan wakil ketua LBH Bintang Keadilan menceritakan, "Kekerasan inses merupakan salah satu tindakan yang melanggar HAM, anak seharusnya mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia atau individu untuk mendapatkan hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Kekerasan inses terkait dengan hukum seharusnya ada KUHAP khusus inses tetapi selama ini menggunakan KUHAP perkosaan. Karena masalah inses lebih rumit

dan berdampak luar biasa bagi korban, anak hasil inses, keluarga tercerai berai, keberlangsungan keluarga korban setelah pelaku kembali menjalani hukuman, masalah ini menjadi sangat kompleks" (Krpt, LBH Bintang Keadilan).

Data kasus inses di Provinsi Bengkulu yang dilaporkan dari instansi dan lembaga swadaya masyarakat, menunjukkan gambaran tentang kondisi kekerasan baik di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Data kasus inses yang dilaporkan tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus inses yang terjadi di masyarakat. Sehingga kasus-kasus kekerasan inses hanya terungkap apabila pihak keluarga, masyarakat melaporkan karena korban hamil tidak jelas siapa pelakunya. Seperti kasus inses di Bengkulu Tengah, kasus Jm (14 tahun), Kelas 2 SLTP, alamat Desa Talang Siring, Kabupaten Bengkulu Tengah. "Pemeriksaan yang dilakukan oleh bapak kandung hingga hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, menurut keterangan korban dan ibu korban, korban diperkosa oleh bapaknya pada saat ibu sedang ke kebun dan ke warung beli racun nyamuk. Pada malam hari, karena kondisi tempat tidur korban dan orang tua korban yang hanya satu bilik, terungkapnya kasus tersebut atas kecurigaan tetangga korban yang melihat perut korban yang semakin membesar, hingga akhirnya ibu korban mengetahui anaknya dihamili oleh suaminya sendiri. Pada saat itu juga ibu korban melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib." (Jum, relawan LKS Peduli Kasih).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kesadaran keluarga dan kepedulian masyarakat untuk melapor kasus inses tidak akan terungkap, korban kekerasan akan mengalami penderitaan seumur hidup. Oleh karena itu, pemahaman keluarga, masyarakat sekitar korban kekerasan seksual inses menjadi sangat penting tanpa kepedulian mereka korban merasa sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Pemahaman masyarakat, instansi dan lembaga pemerhati masalah kekerasan perempuan dan anak terkait dengan pengertian inses, menunjukkan yang beragam dalam mengistilahkan dan

mengelompokkan. Semua sependapat bahwa inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah (ayah, kakak, ibu, adik, paman) terhadap anak, adik atau keponakannya. Pemahaman inses dari petugas Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, mengelompokkan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dinamakan inses, sedangkan beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun P2TP2A mengistilahkan atau mengelompokkan kasus kekerasan seksual anak sebagai kasus pemerkosaan, dan pihak Polresta mengistilahkan atau mengelompokkan sebagai tindakan pencabulan anak di bawah umur.

Perbedaan dalam istilah inses pada prinsipnya semua elemen masyarakat memahami dan menyadari bahwa inses merupakan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bisa ditolerir, dan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat keji terhadap anak. Beberapa kasus inses yang tercatat atau dilaporkan merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus yang belum dilaporkan. Kondisi ini disebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang kekerasan seksual terhadap anak, informasi tentang lembaga yang melakukan pelayanan terhadap korban, serta budaya masyarakat yang masih memegang teguh bahwa masalah keluarga tabu untuk diungkapkan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan inses masih sedikit yang dilaporkan dan tertangani.

Di Provinsi Bengkulu, kasus inses yang berhasil terungkap dan ditangani oleh beberapa instansi pemerintah, yaitu RPTC Dinkes Provinsi Bengkulu empat kasus, lembaga swadaya masyarakat kesejahteraan sosial Peduli Kasih enam kasus, dan Ceria dua kasus, P2TP2A empat kasus, LBH Bintang Keadilan mencatat dua kasus inses yang ditangani, dan WCC Asyiah enam kasus. Jumlah kasus inses yang dilaporkan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2009-2015, 24 kasus. Data kasus inses tersebut termasuk tinggi dibanding kasus di provinsi lain di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaan saja atau yang dilaporkan padahal fenomena inses masih banyak yang belum terungkap atau dilaporkan. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terungkap, “Kasus inses tercatat oleh instansi LSM/LKS baru di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga korban mendapat pendampingan sosial dan pendampingan hukum. Ada daerah-daerah lain yang jauh dari Kota Bengkulu belum ada LKS, dan tentunya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak khususnya inses dibiarkan terjadi dan tidak tertangani. Wilayah Provinsi Bengkulu sangat luas, salah satu kabupaten paling jauh yaitu Kabupaten Muko-Muko berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat belum ada LKS yang menangani masalah tersebut, dan tentunya kasus kekerasan perempuan dan anak belum tersentuh atau tertangani, “(Jum, LKS Pelita Harapan).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren meningkat di semua daerah, mengisyaratkan bahwa masalah tersebut harus diangkat menjadi isu darurat kekerasan perempuan dan anak, yang memerlukan perhatian sangat besar dari seluruh elemen masyarakat dari tingkat bawah dan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Inses merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang tidak berperikemanusiaan, karena korban adalah anak yang merupakan amanah dari Allah kepada orangtua untuk dilindungi, diberikan kasih sayang, diberikan hak-haknya dan perhatian. Anak harus mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia yaitu hak hidup dan tumbuh berkembang dalam suasana yang aman, nyaman serta damai jauh dari perilaku kekerasan.

Gambaran dari 24 kasus inses tersebut sebagian besar korban merupakan anak kandung atau tiri atau keponakan pelaku atau kakak kandung. Usia korban pada rentang 10-17 tahun dan satu korban berusia tiga bulan, pendidikan korban sebagian besar masih bersekolah tingkat SD dan SLTP dan ada yang masih menempuh pendidikan SLTA. Pelaku inses adalah ayah

kandung, ayah tiri dan paman korban, kakak kandung, sepupu ibu korban, sepupu kakak ipar. Daerah asal korban dari Kabupaten Bengkulu Tengah sembilan orang, Kota Bengkulu 12 orang dan Kabupaten Seluma satu orang, Kabupaten Kepahiang satu orang, Kabupaten Rejang Lebong satu orang.

Dari hasil FGD terungkap bahwa tingginya kasus inses di Bengkulu menjadi keprihatinan semua masyarakat. Kasus inses menjadi pusat perhatian media massa khususnya Bengkulu Express yang merupakan satu-satunya surat kabar belum lama berdiri di Bengkulu. Pemberitaan media tentang kasus inses terus menerus, menjadikan kasus inses muncul atau dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, tentunya upaya penanganan berupa perlindungan secara hukum dan pendampingan korban dapat dilakukan oleh instansi LSM/LKS yang peduli masalah tersebut. Pemberitaan terus menerus kasus inses menjadi *headline* Bengkulu Express, menjadikan masalah tersebut jadi pusat perhatian semua elemen masyarakat, dan berdampak terhadap upaya penanganan korban dan penegakkan hukum bagi pelaku. Di sisi lain belum semua daerah dapat terjangkau media massa, kabupaten yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung, menyebabkan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang belum terungkap. Peran media dan seluruh elemen masyarakat sangat bermanfaat untuk memberi informasi terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya inses.

3. Bentuk Penyelesaian Kekerasan Seksual di Ranah Domestik

Anak sebagai generasi penerus keluarga menjadi estafet untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, seperti yang tertulis dalam butir c konsideran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

pada masa depan. Anak sebagai tunas bangsa harus mendapat perlindungan terhadap hidup dan penghidupan yang menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Anak menjadi individu yang harus dipersiapkan dan diperhatikan masa depannya, tetapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan sosial yang sangat pesat berdampak terhadap permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual.

Mengatasi kasus kekerasan inses terhadap anak perlu keterlibatan banyak pihak tidak hanya pelaku dan korban saja, akan tetapi lingkungan sosial yang utama membantu korban dalam penyelesaian masalah kekerasan adalah keluarga, kerabat, masyarakat dan aparat termasuk pembela hukum. Dukungan dari keluarga atau kerabat belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kekerasan tersebut, karena minimnya pemahaman keluarga ataupun kerabat tentang masalah inses, serta wawasan keluarga yang sempit sehingga tidak mampu mencari alternatif penyelesaian yang terbaik. Selama ini masih berkembang di masyarakat bahwa masalah inses merupakan sesuatu hal yang masih sangat tabu untuk dibicarakan secara terbuka, menyangkut aib dalam keluarga, sehingga pihak lain atau tetangga jangan sampai mengetahui atau ikut campur masalah rumah tangga, menyebabkan kasus kekerasan inses terpendam sebagai penderitaan dalam keluarga. Penyelesaiannya secara hukum membutuhkan delik aduan dari korban, dan adanya saksi tindak kekerasan tersebut, penyelesaian untuk mendapat keadilan bagi korban masih jauh dari harapan. Kondisi ini menjadikan masalah inses hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan, bahkan dijumpai kasus inses terungkap setelah korban melahirkan seorang anak. Kasus Pj, korban inses pelaku ayah kandung dari Kabupaten Seluma yang diceritakan salah satu pendamping LBH Bintang Keadilan (En) menyatakan “kasus Pj terungkap setelah Pj melahirkan di dekat kandang sapi di rumahnya, keluarga dan masyarakat sekitar menjadi heboh karena peristiwa tersebut. Pada akhirnya kasus

ini ditangani pihak berwajib dan kami diminta untuk mendampingi secara hukum untuk mendampingi selama penyusunan BAP, pelaporan ke kejaksaan dan proses persidangan.”

Respons korban (Pj) dengan tidak segera menceritakan kepada keluarga, disebabkan banyak pertimbangan yang ada dalam pikiran (Pj), pada saat melakukan suatu reaksi terhadap kekerasan yang dialaminya. Reaksi diam korban bukan berarti perempuan menolerir kekerasan, tetapi alasan ini diartikan bahwa sikap individu terhadap suatu obyek di luar dirinya memiliki komponen kognitif (pikiran), afeksi (perasaan), dan perilaku. Pada saat korban bereaksi terhadap stimulus dalam bentuk perilaku, hal itu merupakan aspek empiris penggabungan semua komponen sikap yang ada pada dirinya. Namun ada banyak kejadian yang tidak mendasarkan perilaku pada sikap, kecuali sikap itu kuat, jelas, spesifik dan tanpa tekanan situasi yang bertentangan (Sears, et.al,1985). Dari bukti empiris menunjukkan, bahwa perilaku tidak melawan atau tidak segera menceritakan pada orang lain, sebenarnya bukanlah suatu sikap karena perilaku tersebut adalah pengaruh dari berbagai situasi yang penuh tekanan. Pelaku (ayah kandung) Pj, “kalau kau dak galak, kubunuh galo keluarga kau, biaya sekolah kau dak akan aku bayari, kau jugo dak akan kuanggap anak selamonyo, ndak kau cak itu?” (Kalo kamu tidak mau, akan aku bunuh keluargamu, biaya sekolah tidak akan aku bayar, dan kamu tidak kuanggap sebagai anak selamanya, mau kamu seperti itu). Hal itu membuatnya ketakutan, dan terpikir bagaimana jika Pj dan keluarganya di bunuh pelaku, lalu bagaimana masa depannya jika pelaku berhenti membiayai sekolahnya. Ungkapan korban menunjukkan adanya sikap ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kekerasan, ada kondisi *powerless* korban ketika perempuan mengalami rasa takut untuk melakukan perlawanan. Kondisi faktor psikologis dan emosional korban disebabkan ketakutan dan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pelaku. Korban anak kandung tidak mampu untuk melawan atau menolak perilaku ayahnya, dan di sisi lain korban sangat membu-

tuhkan pelaku dalam hal-hal tertentu misal, biaya sekolah, biaya hidup menyebabkan perempuan ditempatkan pada situasi tidak mampu atau takut untuk melawan.

Banyak kasus incest tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum, karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan untuk menyewa pengacara, menjadikan keluarga korban tidak memiliki alternatif penyelesaian untuk mendapatkan keadilan hukum serta pendampingan sosial bagi korban. Hal ini diakui oleh salah satu wakil ketua LBH Bintang Keadilan, (Krpt), “biaya mahal untuk mendampingi korban khususnya dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semua lembaga bantuan hukum melakukan pendampingan bagi korban dari kalangan kurang mampu untuk mendapatkan keadilan hukum tanpa memungut biaya.”

Masalah eksternal yang dihadapi yaitu keluarga tidak bisa menghadapi aparat yang menerapkan aturan-aturan untuk pembuktian. Selama ini kasus kekerasan seksual/pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah atau kerabat terdekat membutuhkan pembuktian apakah kekerasan tersebut mengandung unsur pemaksaan atau tidak, dan juga kesulitan untuk mendapatkan seorang saksi. Mencari saksi peristiwa tersebut khususnya di dalam keluarga menjadikan kasus kekerasan inses sulit terselesaikan dan terungkap.

Kasus inses yang dijumpai terkait dengan belum berpihaknya aparat penegak hukum terhadap korban adalah kasus inses yang dialami Rn (12), asal Bengkulu Tengah, seperti yang diceritakan pendamping dari WCC Aisyiah Bengkulu ibu (Win), yang menyatakan “belum semua aparat penegak hukum dan kepolisian berpihak pada korban inses, pemeriksaan yang lama, penyusunan BAP yang berulang-ulang, bahkan tidak adanya dukungan biaya untuk mendapatkan visum, korban harus membayar sendiri. Hal ini kadang menjadikan korban tertekan dengan kondisi itu, kami sebagai pendamping kadang hanya bisa bersabar dan terus berikhtiar untuk membantu korban.”

Kekerasan seksual inses tidak semua dilaporkan, masih minimnya informasi tentang lembaga dan instansi yang menangani kasus kekerasan tersebut sehingga banyak kasus inses terungkap setelah korban melahirkan seorang anak, keluarga baru melaporkan kepada aparat setempat yaitu lurah dan kepolisian. Kasus Rn (12), diperkosa oleh bapak tiri, anak hasil hubungan inses tersebut diselesaikan dengan dititipkan di salah satu panti sosial, sedangkan pelaku diputus pengadilan selama enam tahun. Korban (Rn) masih bersekolah di SLTP, tetapi setelah peristiwa tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah karena sekolah tidak dapat menerima. Penyelesaian tindak inses dapat terungkapnya apabila keluarga, masyarakat melaporkan ke pihak berwajib tanpa, informasi tersebut korban menanggung sendiri penderitaan fisik, psikis dan sosial.

D. Kesimpulan

Bentuk kekerasan terhadap anak perempuan di Kota Bengkulu berupa, pemerkosaan, penelantaran, kekerasan inses, kekerasan fisik, kekerasan psikis. Bentuk kekerasan inses di Kota Bengkulu, yang dilaporkan di instansi Dinas Kesejahteraan Sosial, P2TP2A dan lembaga swadaya masyarakat (Peduli Kasih, Ceria, Aisyiah, LBH Bintang Keadilan) ada 24 kasus. Kasus inses sebagian besar korban merupakan anak kandung/tiri, keponakan pelaku, dan adik kandung. Dilihat dari usia korban berada pada rentang usia antara 10-17 tahun dan satu korban berusia tiga bulan, pendidikan korban sebagian besar masih bersekolah tingkat SD dan SLTP dan ada yang masih menempuh pendidikan SLTA. Hubungan pelaku dengan korban adalah ayah kandung, ayah tiri, paman korban, kakak kandung, sepupu ibu korban, sepupu kakak ipar. Usia pelaku berada di rentang usia antara 16-50 tahun, pekerjaan pelaku, mahasiswa, buruh tani/kebun kopi, paranormal, PNS, dan aparat kesehatan. Pelaku mendapatkan hukuman antara 6-13 tahun, dan ada yang belum tertangkap (DPO), serta pelaku dilepas polisi dengan alasan bukti tidak lengkap. Sanksi sosial bagi para pelaku

berupa *cuci kampung*, yaitu di asingkan dari lingkungan masyarakat.

Daerah asal korban dari Kabupaten Bengkulu Tengah ada sembilan orang, Kota Bengkulu 12 orang dan Kabupaten Seluma satu orang, Kabupaten Rejang Lebong satu orang, Kabupaten Kepahiang satu orang. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari sistem nilai patriarkhis, dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai. Sistem patriarkhis tersebut hampir diterapkan di semua lini kehidupan di masyarakat. Bentuk penyelesaian kekerasan inses terhadap perempuan, belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan inses. Permasalahan inilah yang menyebabkan kasus kekerasan inses merupakan masalah tabu untuk diungkap secara terbuka di masyarakat, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius untuk menyelesaikan kasus kekerasan inses.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan inses merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga upaya penanganan tidak hanya melibatkan korban, pelaku saja tetapi semua unsur di dalam masyarakat, kebijakan dan aturan hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya inses tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi yang utama yaitu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural yang sangat patriarkhis.

Direkomendasikan: Perubahan *mindset* sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Upaya penyadaran gender bagi seluruh masyarakat tidak hanya bagi kaum perempuan, keprihatinan terhadap masalah tersebut belum menjadi gerakan bersama, belum semua orang berpihak pada perempuan atau korban; Penyelesaian korban kekerasan seksual inses akan lebih efektif dan tampak hasilnya apabila seluruh elemen masyarakat bekerja secara terpadu, dari mulai instansi pemerintah, lembaga kesejahteraan so-

sial perempuan dan anak, media massa, aparat hukum, masyarakat umum, alim ulama terlibat secara nyata dalam penghapusan tindak kekerasan seksual inses; Diperlukan adanya *grand strategic* struktural dan kultural, memadukan antara struktural delapan kementerian (Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian dengan perangkat hukumnya atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan inses karena masalah inses membutuhkan penyelesaian yang tepat, berkelanjutan bagi pelaku dan keluarga, serta anak hasil inses; Pendekatan budaya dengan ujung tombak MUI (Majelis Ulama Indonesia), Organisasi NU (Nahdatul Ulama), Organisasi Muhammadiyah, Lembaga Anak dan Perempuan. Pencanangan darurat inses dengan pendekatan melalui agama mendesak untuk segera diwujudkan, karena tokoh ulama belum memusatkan perhatian terhadap persoalan inses; Peran organisasi keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia dalam penyadaran semua umat beragama agar moralitas tetap terjaga bahwa melakukan tindakan kejahatan seksual inses merupakan suatu tindakan yang tidak beradab dan fatwa MUI akan memberikan efek jera terhadap pelaku inses karena telah merusak masa depan anak kandungnya sendiri.

Kepada Kementerian Sosial: Di dalam membuat kebijakan tentang penanggulangan kekerasan terhadap anak khususnya inses, intervensi tidak hanya kepada korban akan tetapi keluarga, karena masa depan anak hasil inses membutuhkan perlindungan sosial berupa kejelasan akan identitas anak, serta kelangsungan masa depan keluarga korban; Kasus inses banyak yang tidak dilaporkan, agar Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Anak melakukan penyuluhan tentang kekerasan anak dan perlindungan sosial pada keluarga, sebagai darurat kekerasan seksual inses di semua daerah, dari tingkat kelembagaan masyarakat paling bawah

(RT) hingga tingkat kabupaten, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos), PSM, TKSK, Karang Taruna dan seluruh pendamping program PMKS bersinergi dengan tokoh agama, MUI.

Pustaka Acuan

- Afiani, Ika Limananti, dkk. (2005). *Inses, Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.
- Consuelo G. Sevilla, dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, (2009). Inses sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 1 Tahun 2009, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Hess, Beth B. and Myra Max Ferre (eds). (1991). *Analyzing Gender: a Handbook of Social Science Research*. California: Sage Publications.
- Haedar Nasir, (1997). *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono, (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Katjasungkana, Nursyahbani, dan Mumtahanah. (2002). *Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK.
- Mansour Fakih, (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'udi, Masdar F. (1997). Perempuan dalam Wacana Keislaman". *Dalam Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli*. Jakarta: Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Mufidah, dkk. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Papringan: Pilar Media.
- Malamuth, H.M. (1986). *Predictors Of Naturalistic Sexual Aggression*. *Journal Of Personality and Social Psychology*: 50, 953-962.
- Poloma, Margaret M. (1979). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Radjawali Press.
- Schuler, Margaret (ed). (1992). *Freedom from Violence: Women's Strategies from Around the World*. New York: UNIFEM.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri, (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refina Adhitama.
- Weinberg dalam Afiani, Ika Limananti, dkk. (2005). *Inses, Adakah Celah Hukum Bagi Perempuan?*, Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.
- Zohra Andi Baso. dkk. (2002). *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

KPAI, <http://www.republika.co.id/brita/nasional/umum/13/07/18/nq4ys6-2013-darurat-nasional-kejahatan.seksual-thd-anak>; akses tgl 26 Desember 2013.

Analisis terhadap Hasil Penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Disabel

Analysis on Exploration Result of Ten Disabled-Friendly Cities

Gunanto Surjono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan sosial (B2P3KS),
Jl Kesjahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Telpn (0274) 377 265. HP 0815 685 1144.
E-mail: <gunsuryo@yahoo.com.> Diterima 16 Mei, diperbaiki 25 Mei, disetujui 5 Juni 2016.

Abstract

The research meant to describe an analysis on exploration of disabled friendly cities held in ten cities, namely Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Disabled friendly cities seen from four indicators. First, public space that deliberately built to support disabled existence. Second, building model (offices and shops) to go in and out for disabled. Third, local government regulation to protect and realize disabled friendly city policy. Fourth, disabled power that can be absorbed in government and privat offices. Fifth, the existence of disabled forum as representative of disabled existence. Data were gathered, first through documentary analysis related to local regulation on disabled. Second, through interview with local official agencies and disabled representative, third through direct observation in the cities observed in supporting disabled existence. It was found that 50 percent of cities observed having local regulation that support disabled existence, 70 percent having no friendly public space, and only very low percentage all 10 cities observed have not absorbed yet disabled power in government and privat offices. It can be concluded that in all 10 cities observed, the existence of disabled have not been supported adequately, and there was no associative relation among having local regulation on disabled existence, disabled friendly, and job absorption for disabled in government and privat offices. It is recommended that The Ministry of Social Affairs should promote the understanding and needs of disabled to local government and people, so they can create positive policy for disabled existence.

Keywords: *disabled; existence; friendly city*

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan analisis hasil penjelajahan kota-kota ramah disabel di 10 kota di Indonesia, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak. Kota ramah disabel dianalisis dari indikator, pertama ruang publik yang sudah disengaja bangun untuk mendukung eksistensi disabel, kedua pola bangunan (perkantoran dan pertokoan) untuk memudahkan keluar-masuk disabel, ketiga penyerapan disabel ke dalam pekerjaan (pemerintah dan swasta), keempat ketersediaan perangkat peraturan daerah guna melindungi dan merealisasikan kota ramah disabel, kelima adanya forum komunikasi sebagai wakil kelembagaan disabel. Pengumpulan data dilakukan, pertama dengan telaah dokumen yang berkaitan dengan ketersediaan peraturan daerah, kedua wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan tokoh forum komunikasi disabel (apabila ada), ketiga dengan pengamatan langsung kondisi kota sasaran amatan dalam mendukung eksistensi (mobilitas) disabel. Hasil penelitian menemukan, bahwa baru 50 persen sepuluh kota amatan yang memiliki perangkat peraturan daerah dalam mendukung eksistensi disabel, 70 persen belum memiliki (memiliki tetapi “direnggut” oleh kegiatan usaha masyarakat) infrastruktur ruang publik ramah disabel, dan baru sebagian kecil eksistensi disabel usia produktif yang terserap dalam dunia pekerjaan (pemerintah dan swasta). Kesimpulan, di 10 kota yang diobservasi eksistensi disabel belum terdukung dan terserap dalam dunia pekerjaan sehingga mereka mampu mengurangi ketergantungan pada orang lain, tidak ada hubungan asosiatif antara kepemilikan peraturan daerah, ramah disabel, dan kemampuan kota amatan dalam menyerap tenaga kerja disabel. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial dapat melakukan program promosi tentang pemahaman dan kebutuhan eksistensi kehidupan disabel di daerah-daerah, sehingga pemerintah daerah di kota-kota besar dapat meluangkan kebijakan positif dalam mendukung eksistensi disabel mengurangi ketergantungan hidup pada orang lain.

Kata kunci: *eksistensi; disabel; kota ramah*

A. Pendahuluan

Menjadi disabel di kota-kota negara maju, layaknya sudah seperti warga biasa. Kebutuhan mobilitas di perkantoran, pertokoan, tempat umum, porsi pekerjaan, dan pelayanan kesehatan secara khusus, sudah disediakan. Sarana, prasarana, dan infrastruktur yang disediakan untuk disabel sudah memadai, dalam arti disabel tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas diri dalam menjalani kehidupan mereka dengan sesedikit mungkin bergantung pada bantuan orang lain. Apabila membutuhkan sesuatu yang sulit dijangkau, disabel tinggal menelpon ke agen pelayanan purna waktu (*hotline*) yang disediakan khusus untuk disabel, sehingga dalam sekejap waktu pasti datang pekerja sosial atau orang yang kesehariannya memiliki komitmen dalam menolong orang-orang disabel. Keberadaan pekerja sosial yang khusus memenuhi kelancaran mobilitas disabel, porsi kesempatan kerja, pelayanan kesehatan khusus, oleh pemerintah di negara-negara maju sudah diatur melalui kebijakan dan peraturan sedemikian rupa, sehingga di setiap wilayah ada disabel yang membutuhkan asistensi, pasti terliput dan terpenuhi kebutuhannya.

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang ironisnya sikap sosial menghadapi disabel justru sejak dari nilai dasar kemasyarakatan-nya “konon” sudah dimiliki dalam sanubari bangsa di negara bersangkutan, tertulis dalam gambaran ideal sikap sosial bangsa yang penuh kemanusiaan, kemuliaan, gotong royong, luhur yang apabila dibaca bangsa lain seolah-olah penyikapan terhadap disabel di atas kertas “hanya” merupakan bagian kecil yang dengan sendirinya dilakukan. Namun realitasnya, dalam melihat eksistensi disabel, kondisi penyikapan dan pelayanannya justru kebalikannya dan kadang sangat memprihatinkan, bahkan terhadap warga biasa (normal) sendiri, pengharganya semakin diabaikan oleh ketiadaan ruang publik, alur jalan mobilitas, dan meruyaknya bangunan komersil yang semakin tidak menghargai eksistensi warga umum, apalagi disabel.

Apabila mengamati kondisi tersebut, warga biasa saja sudah tersekat mobilitasnya oleh jejalan kegiatan usaha yang merampas pejalan kaki, bangunan fisik komersil yang angkuh terhadap eksistensi warga umum, dan infrastruktur yang sangat mengabaikan ketersediaan mobilitas masyarakat, lebih-lebih terhadap eksistensi disabel. Apabila direnungkan lebih jauh, sikap yang semakin tidak menghargai eksistensi disabel tersebut sebenarnya semakin menyudutkan disabel ke dalam kondisi yang semakin butuh asistensi orang lain, sehingga keluarga, masyarakat, dan pemerintah justru harus meluangkan pikiran dan kesempatannya secara khusus untuk menolong disabel, semakin diabaikan eksistensi disabel tanpa disadari sebenarnya, justru keluarga, masyarakat, dan pemerintah semakin membutuhkan pemikiran dan anggaran khusus untuk memfasilitasi kehidupan disabel. Di negara maju, karena infrastruktur, jaringan asistensi, dan peraturan daerahnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk mempertimbangkan dan mengikuti eksistensi disabel, kebijakan dan anggaran khusus yang menyita pikiran, anggaran, dan tenaga untuk disabel, justru tidak diperlukan. Disabel dapat bermobilitas dalam masyarakat tanpa butuh skala prioritas pertolongan khusus dari orang lain, karena segala kebijakan pemerintah sudah disusun secara implisit sehingga memudahkan disabel bergaul dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup dengan sesedikit mungkin bergantung pada orang lain.

Di Indonesia, pertumbuhan pemahaman dan kesadaran eksistensi disabel, sebagai warga yang membutuhkan penghargaan sama seperti warga biasa, sudah semakin meningkat, tetapi dalam realitasnya tingkat pemahaman dan kesadaran tersebut kalah cepat berpacu dengan meningkatnya sikap dan kepentingan masyarakat yang berusaha dengan menyita ruang jalan umum, membangun bangunan komersil yang tanpa ampun mempersempit ruang publik, dan lambannya pemerintah dalam menyediakan ruang mobilitas dan infrastruktur khususnya bagi disabel, bahkan ruang dan fasilitas yang semula sudah dibangun ramah disabel pun terdesak oleh kepentingan

masyarakat umum yang termanifestasi dalam “pendudukan” ruang publik ramah disabel, pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan yang tidak memberi akses bagi disabel, dan keabaian pemerintah untuk menjaga ruang dan fasilitas ramah disabel. Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi ruang umum (*public space*), infrastruktur, kesempatan kerja, peraturan daerah di 10 kota amatan, dalam menciptakan kota ramah disabel.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif,¹ dengan maksud menggambarkan kondisi 10 kota-kota amatan dari aspek keramahan terhadap eksistensi disabel. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: Pertama, telaah dokumen terutama dalam melacak ada tidaknya peraturan daerah sebagai pengakuan, pengaturan layanan sesuai dengan kebutuhan disabel, dan kewajiban lembaga (pemerintah dan swasta), infrastruktur, pekerjaan yang disediakan, dalam mendukung eksistensi disabel. Telaah dokumen juga dilakukan dalam melacak eksistensi disabel memperoleh pelayanan kesehatan, sumber data diperoleh dari inventarisasi forum disabel di 10 kota amatan. Kedua, wawancara bebas dengan aparat pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan disabel, ketua forum disabel dalam hal informasi tentang fasilitas yang diterima disabel anggota forum, dan indeks penyerapan disabel dalam pekerjaan di sektor pemerintah atau swasta. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif, terutama dari aspek ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam mendukung mobilitas disabel, peraturan daerah tentang disabel, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, dan lembaga asistensi dalam hal disabel menghadapi permasalahan di suatu saat dan tempat tertentu.

C. Kondisi Sepuluh Kota Amatan dari Aspek Ramah Disabel

Sejarah penyikapan masyarakat terhadap eksistensi disabel telah melalui tiga masa dalam

rentangan abad, yang tiap masa masing-masing masyarakat umum memiliki perbedaan sikap yang sangat signifikan. Diawali sebelum abad pencerahan (*enlightment*, sebelum abad XV), disabel dipandang masyarakat sebagai orang yang menerima karma kehidupan (buruk) yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya, sehingga eksistensi disabel dianggap sebagai orang yang rendah dibandingkan orang yang lahir sempurna (tidak cacat). Pada masa sebelum abad pencerahan, disabel dipandang masyarakat dengan pola pikir yang mistis dan takhayul (Stiker, 2012: 176), sehingga dipandang rendah, hina, dan memerlukan penyikapan khusus dan terisolasi dalam kehidupan masyarakat umum.

Setelah memasuki abad pencerahan (Abad XV-XIX), sejalan dengan semakin banyak varian peristiwa yang menyebabkan orang menjadi disabel, baik bawaan sejak lahir, diperoleh baru ketika lahir dan besar di tengah masyarakat, maupun diperoleh menjelang usia kematian, disabel dipandang oleh masyarakat sebagai ketidaksempurnaan seseorang (daksa atau grahita) yang membutuhkan terapi fisik atau psikis agar tidak tergantung pada orang lain. Pada abad pencerahan yang pola pikir masyarakatnya dipenuhi dengan rasionalitas dan positivistik, disabel dipandang sebagai kekurangsempurnaan seseorang secara fisik yang membutuhkan terapi medis atau alat bantu (*protege*) sehingga mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Pada abad pencerahan, eksistensi disabel dipandang masyarakat dari pola pikir medis (Braddock, 2016: 201; Garden R, 2010: 117), sehingga eksistensi mereka lebih terhormat dibandingkan sebelum abad pencerahan, disabel dipandang sebagai orang biasa yang memiliki kekurangan (*impairment*) dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Semakin rasional dan positivistik perkembangan pola pikir masyarakat, setelah Abad XX, eksistensi disabel dipandang oleh masyarakat lingkungannya dengan nilai yang berbeda-beda, dalam arti kadar disabilitas seseorang oleh masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Disabel dinilai dari

seberapa jauh peran mereka dalam masyarakat, sehingga dalam mengategorikan seseorang disabel atau tidak, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda, menurut nilai yang dianut masyarakat bersangkutan dan kemampuan disabel menjalankan fungsi di tengah masyarakat.

Suatu masyarakat menilai bahwa eksistensi seseorang dikategorikan disabel, tetapi di masyarakat lain dapat dianggap sebagai orang normal, disabel dilihat masyarakat sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya. Seseorang dengan kekurangan fisik, mental, atau netra dapat saja dianggap orang sebagai biasa (normal) apabila mereka mampu bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya tidak ubahnya seperti peran anggota masyarakat yang normal, tetapi seseorang dengan kesempurnaan tubuh, mental, atau netra dapat disebut “disabel” apabila dalam bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya ternyata tidak dapat melakukan dengan normal. Eksistensi disabel dalam perkembangan pola pikir masyarakat dipandang dari aspek kemampuan seseorang berperan secara sosial dalam pergaulan masyarakat di lingkungannya (Linton, 2008: 87; Shakespeare, 2016: 197).

World Health Organization (WHO, 2012) sendiri kemudian mendefinisikan, bahwa disabel sebagai kondisi kekurangsempurnaan (*impairment*) seseorang secara fisik, kognitif, intelektual, mental, sensor, pertumbuhan, atau kombinasi dari sebagian ketidaksempurnaan tersebut, sehingga mengakibatkan seseorang memiliki kendala berpartisipasi secara “normal” dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Kondisi terkendala tersebut dialami seseorang, baik sudah sejak lahir maupun baru ketika masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Mengacu pada sikap masyarakat umum dan definisi tentang disabel tersebut dapat dirangkum sebuah pengertian bahwa seberapa jauh toleransi masyarakat terhadap eksistensi disabel, sebuah kebijakan pemerintah, penyikapan masyarakat umum, dan kemampuan sosialisasi disabel dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, memang

perlu penyikapan dan kebijakan tersendiri dalam rangka menempatkan eksistensi disabel mampu bersosialisasi dalam masyarakat secara normal (Garden, R 2010: 76).

Perkembangan sikap positif masyarakat terhadap eksistensi disabel, dari semula yang menganggap rendah dan hina ke persamaan derajat dengan masyarakat “normal” mendorong disabel sendiri memiliki kelompok solidaritas, komunikasi, advokasi, peran dalam kancah politik, guna memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan sehingga mendapat ruang kehidupan yang memadai sesuai dengan sumber dan potensi yang mereka miliki. Tuntutan disabel yang mengemuka kemudian meliputi, kemudahan dalam mobilitas di lingkungannya, aksesabilitas dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum, seperti transportasi, bangunan, lingkungan fisik, kehidupan mandiri, pekerjaan, pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum dan keterhindaran dari perlakuan salah, kekerasan, pemerasan, penipuan, dan diskriminasi (Sobh, 2012: 176; Samuel, 2015: 978; Kemple, et al, 2011: 363).

Di Indonesia, hak disabel juga dijamin dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998² menyatakan bahwa lembaga penerima tenaga harus mempekerjakan satu disabel diantara 100 tenaga kerja, tetapi meski peraturan pemerintah, bahkan pemerintah daerah telah memiliki peraturan daerah tentang disabilitas, dalam realitas kehidupan sehari-hari yang meliputi hak aksesabilitas disabel, secara ideal masih belum dapat diwujudkan sesuai dengan tuntutan persamaan hak oleh kelompok disabel. Sebuah kota yang bahkan sudah membangun sarana dan prasarana ramah disabel, tidak jarang keberadaannya terdesak oleh kebutuhan eksistensi orang-orang “normal” sehingga kebutuhan disabel, dalam level yang paling sederhana sekalipun (sarana mobilitas umum) menjadi terabaikan. Dari hasil telaah dokumenter terhadap 10 kota yang menjadi sasaran amatan, seperti Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pontianak, terutama yang berkaitan dengan penyikapan

eksistensi disabel, kepemilikan peraturan daerah ramah disabel dapat dideskripsikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Kepemilikan Peraturan Daerah Ramah Disabel

No	Kota Amatan	Kondisi
1	Medan	-
2	Padang	-
3	Jakarta	x
4	Bandung	x
5	Semarang	-
6	Yogyakarta	x
7	Surabaya	x
8	Denpasar	-
9	Balikpapan	x
10	Pontianak.	-

Sumber: Telaah Dokumen dan observasi (2016)

Dari hasil telaah dokumen ketersediaan peraturan daerah dalam mendukung eksistensi disabel, ternyata hanya 5 (50 persen) kota sasaran amatan di Indonesia yang memiliki, 5 (50 persen) belum memiliki. Namun dari hasil amatan dari kondisi kehidupan umum yang berkaitan dengan eksistensi disabel, di antara 10 kota yang memiliki peraturan daerah belum tentu penyikapan umum mereka terhadap eksistensi disabel lebih maju dibandingkan kota yang belum memiliki. Sikap umum masyarakat, dalam bentuk penyediaan kesempatan mobilitas bagi disabel dan membangun prasarana fisik (gedung perkantoran, pertokoan, jalan, tempat umum)

ramah disabel, menjadi fakta fisik umum yang berpengaruh dalam mengkondisikan kota ramah disabel. Mengacu pada teori Meyers (2014: 195), ketersediaan fasilitas tersebut baru dalam taraf kebutuhan pertama disabel, yaitu akses untuk melakukan mobilitas di lingkungannya. Morris (2011: 21-22), masih mengungkapkan kebutuhan ideal lain berupa, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kota dengan pemerintah daerahnya yang ramah disabel dapat diindikasikan dengan kondisi kota yang dapat memenuhi semua tuntutan umum disabel.

Dari hasil observasi di 10 kota amatan, ada kota yang sama sekali belum memberi ruang publik ramah disabel, tetapi ada juga kota yang sudah membangun infrastruktur ramah disabel tetapi kondisinya “direnggut” oleh masyarakat untuk tempat usaha, sehingga tidak dapat digunakan untuk mobilitas disabel, bahkan masyarakat umum sendiri yang tidak memiliki kendala tubuh dalam melakukan mobilitas, sulit melakukan. Ada kota yang memang sudah memiliki fasilitas mobilitas disabel dan menjaga kondisinya secara baik, sehingga mobilitas disabel dapat dilakukan secara baik pula, seperti mobilitas lalu lalang di trotoar, naik-turun gedung bertingkat (perkantoran dan pertokoan), keluar masuk toilet, dan naik angkutan umum, sampai pada pembebasan biaya transportasi umum baik karena anjuran pemerintah maupun kebijakan sosial dari operator angkutan umum.

Tabel 2
Kondisi Infrastruktur Ramah Disabel

No	Kota Amatan	Keberadaan Peraturan Daerah	Kondisi Infrastruktur Ramah disabel		
			Ada/belum	tergusur	terjaga
1	Medan	-	-	-	-
2	Padang	-	x	-	x
3	Jakarta	x	-	x	-
4	Bandung	x	x	-	x
5	Semarang	-	-	-	-
6	Yogyakarta	x	x	-	x
7	Surabaya	x	-	x	-
8	Denpasar	-	x	-	x
9	Balikpapan	x	x	-	x
10	Pontianak	-	x	-	x

Sumber: Hasil Amatan 2016

Dari hasil amatan yang disajikan dalam tabel 2, yang meliputi tempat umum (*public space*), perkantoran dan pertokoan, rumah sakit di 10 kota amatan, dapat diketahui bahwa kepemilikan peraturan daerah suatu kota pada praktek dan realitasnya belum tentu lebih ramah terhadap eksistensi disabel dibandingkan kota yang belum memiliki peraturan daerah disabel. Dari hasil pengamatan, perkembangan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum untuk usaha, pola pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan, serta kemauan administrasi pemerintahan suatu kota untuk memberi perhatian dan perlindungan terhadap eksistensi

disabel, ternyata sangat berpengaruh dalam menciptakan kota ramah disabel.

Salah satu indikator utama kota ramah disabel adalah kemampuan pemerintah setempat dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan umum dan vokasional (keterampilan tepat guna) bagi disabel. Hasil penelusuran dokumen dari forum disabel di 10 kota amatan memberi gambaran tentang kondisi ramah disabel suatu kota dalam menyediakan pendidikan, sebagai bekal disabel bermasyarakat. Tabel 3 berikut merupakan latar belakang disabel dalam memperoleh pendidikan.

Tabel 3
Latar Pendidikan Disabel

No	Kota Amatan	Pendidikan Umum				Vokasional (%)
		SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)	
1	Medan	38,1	33,5	20,3	8,1	47,1
2	Padang	37,1	26,2	25,5	11,2	68,0
3	Jakarta	32,2	28,3	30,1	11,4	49,3
4	Bandung	18,5	29,2	37,3	15,0	70,2
5	Semarang	26,2	25,2	38,3	10,3	51,0
6	Yogyakarta	16,6	30,0	41,2	12,2	71,1
7	Surabaya	28,8	29,0	32,1	10,1	54,3
8	Denpasar	32,1	37,3	22,3	8,3	61,3
9	Balikpapan	46,0	39,5	8,2	6,3	55,0
10	Pontianak	50,1	35,4	10,5	4,0	51,2
Rata-rata		32,6	31,4	22,8	9,7	57,9

Sumber: Dokumentasi Forum Disabel (2016)

Mengacu pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa capaian pendidikan disabel di 10 kota amatan rata-rata rendah, didominasi mereka yang berpendidikan SD dan SMP, begitu juga dalam memperoleh pendidikan keterampilan (*vocational*), baru mencapai rata-rata 57,9 dari seluruh populasi anggota forum disabel. Dari hasil pengamatan yang dilakukan secara random di 10 kota amatan, kendala disabel dalam memperoleh pendidikan memadai, menurut (Olkin, 2012: 226) karena faktor: Rendahnya kemampuan ekonomi keluarga dalam menyekolahkan anak; realitas kemampuan fisik disabel

yang sering menghalangi pencapaian pendidikan maksimal; pendidikan vokasional yang tersedia banyak yang sudah ketinggalan jaman, sehingga tidak diminati disabel.

Indikator kota ramah disabel lain (Hough, 2013: 229), yang juga merupakan salah satu tuntutan hak disabel, adalah kemampuan menyerap disabel usia produktif dalam pekerjaan umum, tabel 3 berikut merupakan gambaran kondisi penyerapan kota amatan terhadap eksistensi disabel ke dalam pekerjaan di kantor pemerintah dan sektor usaha formal.

Tabel 4
Penyerapan Disabel dalam Dunia Kerja

No	Kota Amatan	Peraturan Daerah	Infrastruktur Ramah disabel	Penyerapan Dunia Kerja	
				Pemerintah (%)	Swasta Formal (%)
1	Medan	-	-	1,30	8,90
2	Padang	-	x	2,30	15,00
3	Jakarta	x	-	2,10	9,90
4	Bandung	x	x	5,60	14,30
5	Semarang	-	-	1,90	7,01
6	Yogyakarta	x	x	2,20	16,60
7	Surabaya	x	-	2,10	9,40
8	Denpasar	-	x	2,90	10,70
9	Balikpapan	x	x	3,10	6,90
10	Pontianak	-	x	1,70	9,90
Rata-rata Penyerapan dalam Dunia Kerja				2,50	10,87

Sumber: Jawaban Informan (2016)

Dari data dalam tabel 4, ternyata tidak ada linieritas antara kepemilikan peraturan daerah, kondisi ramah disabel, dan penyerapan tenaga kerja disabel dalam mewujudkan kota ramah disabel, tetapi kondisi infrastruktur ramah disabel suatu kota ternyata memiliki hubungan asosiatif dengan daya serap tenaga kerja disabel. Namun mengacu pada persentase penyerapan tenaga kerja disabel di 10 kota amatan, partisipasi disabel dalam dunia kerja yang berefek pada tingkat ketergantungan hidup mereka pada orang lain, kondisi penyerapan disabel dalam dunia kerja masih belum memadai, rata-rata baru 2,50 persen (dalam sektor pekerjaan pemerintah) dan 10,87 persen (dalam sektor swasta) dari keseluruhan populasi disabel yang ada di masing-masing kota amatan. Mengacu pada pendapat Masala (2013: 199), bahwa idealisasi angkatan kerja dalam suatu negara yang dapat menopang kualitas kesejahteraan hidup suatu negara harus di atas 67 persen, maka penyerapan disabel dalam sektor pekerjaan (pemerintah atau swasta) masih jauh dari memadai.

Kondisi tersebut dapat dianalisis, bahwa perlindungan terhadap eksistensi kehidupan disabel di 10 kota amatan masih belum memadai. Sedikitnya kuantitas penyerapan disabel dalam dunia kerja tersebut menyebabkan mayoritas disabel masih tergantung pada asistensi orang lain, karena mereka tidak terserap dalam dunia

kerja sebagai bekal untuk mengurangi ketergantungan hidup mereka pada orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar diri mereka. Kemampuan kerja disabel dalam melakukan pekerjaan di sektor pekerjaan umum dan persaingan dengan angkatan kerja normal, dan ketersediaan peraturan daerah yang mengatur proporsi angkatan kerja normal dan disabel menjadi faktor sedikitnya disabel terserap dalam dunia pekerjaan (pemerintah atau swasta) umum (Kemple, 2011: 111).

Kendala adanya persaingan di dunia angkatan kerja, khususnya di Indonesia, yang sudah tersedia melimpah dari angkatan kerja tidak disabel (normal) tersebut yang mendorong lembaga penerima pekerja lebih memilih orang yang tidak disabel, sehingga kondisi penyerapan angkatan kerja disabel menjadi dilema tersendiri dalam 10 kota amatan, karena faktanya angkatan kerja tidak disabel memang lebih potensial dibandingkan angkatan kerja disabel, apalagi dibandingkan dengan disabel ganda. Kondisi tersebut sangat dipahami oleh disabel, sehingga rasio penyerapan kerja disabel lebih banyak ke sektor informal, yang secara personal bagi pemilik pekerjaan lebih memahami, bersikap sosial, dan memiliki strategi tersendiri dalam menyerap tenaga disabel. Tabel 5 berikut merupakan gambaran penyerapan tenaga disabel di 10 kota amatan ke dalam berbagai sektor pekerjaan.

Tabel 5
Rasio Penyerapan Angkatan Kerja Disabel dalam Berbagai Pekerjaan

No	Kota Amatan	Jenis Pekerjaan			
		Kantor Pemerintah (%)	Usaha Informal (%)	Wirausaha Mandiri/ Jasa (%)	Menganggur (%)
1	Medan	1,33	8,89	43,64	46,14
2	Padang	2,35	15,11	67,29	15,25
3	Jakarta	2,19	9,94	51,85	36,02
4	Bandung	5,66	14,32	61,15	8,87
5	Semarang	1,99	7,01	55,12	35,88
6	Yogyakarta	2,28	16,69	58,28	22,75
7	Surabaya	2,19	9,44	59,34	29,03
8	Denpasar	2,95	10,72	62,21	24,12
9	Balikpapan	3,17	6,96	47,98	41,89
10	Pontianak	1,79	9,98	42,95	45,28
	Rata-rata	2,59	10,91	54,98	30,52

Sumber: Inventaris Forum Disabel (2016)

Mengacu pada tabel 5, ternyata tingkat pengangguran angkatan kerja disabel masih tinggi (30,52 persen) dari keseluruhan disabel yang mencatatkan diri dalam forum disabel di 10 kota amatan. Dari hasil observasi, disabel yang menganggur ternyata dilatarbelakangi kondisi kendala mobilitas ganda, sehingga secara objektif mereka memang kurang potensial dalam melakukan pekerjaan secara umum. Suatu contoh ekstrim, mereka yang tidak memiliki tangan dan kaki akan sulit melakukan pekerjaan umum seperti yang dapat dilakukan oleh disabel ringan, demikian juga disabel dengan kondisi tunanetra, juga akan mengalami kesulitan apabila dikerjakan di sektor usaha boga, karena dengan karakter disabelnya akan menimbulkan kesan yang kurang ideal terhadap produk makanan

yang dikerjakannya. Kondisi spesifikasi karakter sebagian disabel tersebut yang menurut Khausik (2014: 114) menjadi dilema yang sulit dipecahkan, terutama mengacu pada pandangan yang memiliki prinsip bahwa disabel adalah warga negara dengan asumsi potensi yang sama dengan warga biasa.

Menurut Hough (2013, 111), kesejahteraan hidup disabel juga tidak cukup disikapi dengan kondisi penyerapan di dunia pekerjaan umum yang tinggi, tetapi juga kondisi pelayanan kesehatan apabila disabel sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan. Dari hasil telaah dokumen dalam forum-forum disabel di 10 kota amatan, ternyata juga baru sebagian disabel yang memiliki jaminan kartu kesehatan, seperti yang tersaji dalam tabel 6.

Tabel 6
Kondisi Pelayanan Kesehatan Disabel

No	Kota Amatan	Perolehan Layanan Kesehatan		
		BPJS (%)	Khusus Disabel (%)	Mandiri Umum (%)
1	Medan	8	17	52
2	Padang	14	23	61
3	Jakarta	11	14	66
4	Bandung	18	29	71
5	Semarang	11	17	67
6	Yogyakarta	22	26	49
7	Surabaya	14	21	57
8	Denpasar	17	26	69
9	Balikpapan	12	17	71
10	Pontianak	9	15	55
	Rata-rata	13,6	20,5	61,8

Sumber: Telaah Dokumen Forum Disabel (2016)

Dari hasil telaah dokumen forum disabel di sepuluh kota amatan, ternyata juga baru sebagian kecil disabel anggota forum yang sudah mendapat akses BPJS kesehatan, rata-rata 13,6 persen, sedang disabel yang mendapat akses pelayanan khusus disabel yang diselenggarakan oleh masing-masing forum rata-rata juga masih kecil (20,5 persen), sisanya rata-rata 61,8 persen, disabel datang ke puskesmas atau dokter umum dengan membayar sendiri, tidak ubahnya seperti anggota masyarakat umum. Dari hasil pengamatan terhadap pelayanan pemerintah dalam menyikapi disabel apabila sakit, baru 13,6 persen disabel yang mendapat intervensi apabila mengalami sakit, sisanya terakses melalui layanan khusus yang diselenggarakan oleh forum disabel dan membayar sendiri biaya pengobatan seperti yang dilakukan masyarakat umum. Rendahnya

persentase disabel yang mengikuti layanan kesehatan melalui BPJS karena jenis layanan tersebut mengharuskan peserta membayar iuran bulanan, sebuah syarat yang sulit diikuti oleh disabel dan keluarganya karena rata-rata mereka berada dalam kondisi ekonomi miskin (Koentjorowati, 2016).

Dari kelima indikator tingkat kota ramah disabel tersebut, indikator keenam yang lebih umum adalah penyikapan masyarakat terhadap kehadiran disabel di tempat umum, kerja, dan kegiatan sehari-hari (*daily activities*). Oleh karena disabel kenyataannya merupakan sosok yang membutuhkan alat bantu atau asistensi dari orang lain, kesan disabel terhadap penyikapan masyarakat umum terhadap diri mereka di 10 kota amatan dapat disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7
Kesan Disabel terhadap Penyikapan Masyarakat

No	Kota Amatan	Penyikapan Masyarakat		
		Melayani secara Khusus (%)	Membantu apabila dibutuhkan (%)	Membiarkan Mandiri (%)
1	Medan	20,2	53,1	26,7
2	Padang	31,6	50,3	18,1
3	Jakarta	18,4	46,4	45,2
4	Bandung	26,8	59,1	14,1
5	Semarang	19,3	51,4	29,3
6	Yogyakarta	23,2	54,3	22,5
7	Surabaya	20,5	61,2	18,3
8	Denpasar	27,6	59,3	13,1
9	Balikpapan	22,2	59,1	18,7
10	Pontianak	20,4	49,5	30,1
Rata-rata		23,2	54,4	23,6

Sumber: Dokumentasi Forum Disabel (2016)

Penyikapan masyarakat terhadap kehadiran disabel di lingkungannya dalam bentuk pelayanan khusus dalam kehidupan sehari-hari seperti: Sikap kondektur angkutan umum yang tidak meminta ongkos pada penumpang disabel, memberi uang tanpa diminta, mendahulukan disabel apabila urut (di rumah sakit, bank, toko tempat belanja), polisi yang mengecualikan disabel dari rambu lalu lintas dan operasi pengecekan surat-surat kendaraan, sebagai sikap simpati

masyarakat pada disabel yang memang membutuhkan penyikapan khusus. Sikap membantu disabel apabila membutuhkan termanifestasi dalam sikap, menuntun menyeberangkan jalan dan membetulkan arah jalan, membimbing melewati jalan sulit, mau membeli hasil karya kerajinan ekonomi kreatif disabel. Sikap masyarakat yang membiarkan disabel mandiri, termanifestasi dalam bentuk tidak bereaksi sama sekali apabila melihat kehadiran disabel dalam keadaan

membutuhkan asistensi, karena masyarakat beranggapan bahwa disabel dapat melakukan sendiri meskipun dengan konsekuensi mengalami kesulitan mobilisasi.

Sikap masyarakat yang membiarkan disabel bermobilisasi mandiri, rata-rata di 10 kota amatan masih tinggi (23,6 persen) menunjukkan, bahwa rasa kesetiakawanan khususnya terhadap eksistensi disabel semakin memudar. Penyikapan tersebut apabila mengacu pada kondisi kegotongroyongan di negara-negara berkembang yang menurut literasi semula tinggi, tetapi dalam realitas keseharian ternyata berbeda, bahkan menurut kesan disabel bertolak belakang, memberi indikasi bahwa dukungan masyarakat dalam memandang eksistensi disabel dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, rendah. Sikap masyarakat yang rendah dalam mendukung disabel bermobilisasi dan bermasyarakat tersebut justru lebih tampak di negara berkembang yang lebih mengagung-agungkan kebersamaan, gotong royong, dan tolong-menolong dibandingkan masyarakat di negara maju yang lebih individualistik (Smith, 2012).

D. Penutup

Dari hasil amatan di 10 kota terhadap penyikapan eksistensi kehidupan disabel dapat disimpulkan, bahwa disabel masih belum dianggap sebagai warga negara yang sejajar dengan warga biasa yang tidak memiliki kendala fisik, meskipun undang-undang telah mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di 10 kota amatan, bahwa secara umum kondisi infrastruktur mobilitas disabel masih belum memadai, bahkan yang sudah ada dan disediakan pun “tergusur” oleh sikap masyarakat dalam membangun dunia usaha yang tidak peduli pada eksistensi kebutuhan mobilitas masyarakat umum, apalagi disabel. Eksistensi disabel masih dianggap sebagai kelompok minoritas yang belum menjadi prioritas perhatian dan diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat, bahkan fasilitas infrastruktur yang sudah ada banyak tergusur oleh kepentingan masyarakat umum.

Dari keenam aspek amatan, sarana dan prasarana mobilitas di tempat umum (*public space*), keluar masuk bangunan gedung perkantoran, penyediaan pendidikan umum dan vokasional, penyediaan kesempatan kerja secara proporsional yang dijamin dengan keberadaan peraturan daerah, dan pelayanan kesehatan secara khusus, dan penyikapan masyarakat umum terhadap eksistensi disabel, realisasinya masih belum memadai, terutama apabila dilihat dari indikator eksistensi dan pelibatan disabel dalam keenam aspek penyikapan tersebut. Kondisi ini akan membawa konsekuensi tingkat ketergantungan disabel terhadap orang lain menjadi lebih tinggi, akibat infrastruktur mobilitas yang tidak mendukung dan aksesabilitas terhadap dunia pekerjaan yang rendah, dalam arti belum memanfaatkan potensi yang dimiliki disabel. Tingginya ketergantungan tersebut akan membawa konsekuensi pelayanan disabel dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam bentuk asistensi (tanpa menghargai potensi yang dimiliki disabel) menjadi semakin tinggi, karena eksistensi disabel tidak dapat dilepas sendiri akibat mobilitas kehidupan mereka yang sulit untuk dilakukan secara mandiri, sehingga dari segi pemikiran, tenaga, dan anggaran yang dibutuhkan untuk disabel, justru semakin tinggi. Lain halnya apabila kehidupan disabel dapat difasilitasi sedemikian rupa, sehingga mereka mampu mengekspresikan potensinya (seberapa pun terbatasnya) secara mandiri.

Pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Sosial, direkomendasikan untuk mempromosikan pemahaman tentang permasalahan, kebutuhan, dan eksistensi disabel dengan berbagai konsekuensinya, dalam membuat ruang publik dan gedung (perkantoran dan pertokoan), kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat menciptakan kota ramah disabel, sehingga disabel dapat melakukan mobilitas kehidupan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar (pergi jalan-jalan, memperoleh akses pekerjaan, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, memanfaatkan potensi yang dimiliki)

untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain. Berkurangnya eksistensi disabel pada orang lain akan membawa konsekuensi pada berkurangnya kebutuhan program khusus untuk disabel, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penyikapan, pemikiran, tenaga, dan anggaran terhadap disabel, karena disabel dapat melakukan sendiri mobilitas tanpa ketergantungan pada orang lain.

Pustaka Acuan

- Bagenstos, Samuel. (20013). *Law and the Contradictions of the Disability Rights Movement*. New Haven: Yale University Press.
- Braddock, David, and Susan Parrish. (2016). *An Institutional History of Disability*. London: Sage.
- Denzin, Norman dan Yvona S. Linclon. (2014). *Handbook of Qualitative Research*.
- Garden, R. (2010). *Disability and Narrative: New Directions for Medicine and The Medical Humanities*". New York: Journal of Medical Humanism.
- Hough, Andrew. (2013). *Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and Income Security for Disabled People*. Paris: OECD.
- Kaushik, R. (2014). *Acces Denied: Can We Overcome Disabling Attitude*. New York: Unesco.
- Kemple, Miriamdan Ahmad, Fatima et al. (2011). *Shaping Disability Rights through the Disability Movement*. London: Journal of Human Rights Practices.
- Koentjorowati, Elly. (2016). *Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik*. Yogyakarta: JPKS.
- Linton, Simi. (2011). *Claiming Disability: Knowledge and Identity*. New York: New York University Press.
- Masala C, Petretto. (2013). *From disablement to Enablement*. Conceptual Models of disability. London: PIMD.
- Meyers, Stephen. (2014). *Groups and Individuals Honored at PWD Day*. London: Routledge.
- Morris, Jenny. (2011). *Pride Against Prejudice Transforming Attitudes to Disability*. Alesbury: The Women's Press.
- Olkin, Rhoda. (2012). *What Psychotherapists Should Know About Disability*. London: Guilford Press.
- Shakespeare, Tom. (2016). *The Social Model of Disability*. New York: Routledge.
- Sobh, Tarek. (2014). *Disability Rights*. Wisconsin: Disabilityrightswi.org.
- Stiker, Henri. (2012). *Disabilities*. New York: World Health Organization.
- Smith, T.B. (2012). *A New and Emerging Model of Disability*. White Paper: The Pennsylvania State University.

Footnotes

- 1) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak berkecenderungan mengukur objek yang diteliti, tetapi lebih menekankan pada pengungkapan realitas bentuk konstruksi sosial, kedekatan dengan objek yang diteliti, dan memaknai gejala sosial yang terjadi dari sisi objek yang diteliti dan proses terjadinya gejala sosial tersebut (Denzin, 2014: 4).
- 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Biro Hukum dan Kepegawaian Departemen Sosial RI)

Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik

Fulfilling Physical Disable Base Right

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta. Telpn(0274) 377265, Fax (0274) 373530
Badiklit Kesos Kementerian Sosial, E-mail: <ellykuncorowati@yahoo.co.id.> HP +6287838724537.
Diterima 3 Maret, diperbaiki 11 april, disetujui 2016 10 Mei 2016.

Abstract

The numbre of physical disabled coming from poor families are not fulfilled their basic rights, such as food, clothing, education, health and employment, showed an unqualified families in meeting their basic needs and attention to the disabled. The research aimed to find out the level of fulfillment of physical disabled basic needs by their family. The type of research was descriptive, data collected through interviews and observation techniques. The research location in Ogan Komering Ilir, South Sumatra Province. Data were analyzed through descriptive tehniue. The research showed that lack of social support from family, especially parents, to meet basic needs of disables such as nutrition, education, health and employment. It recomended that is required to hold empowerment for of disable's parents to improve their knowledge and ability to care and gain access to existing social services programs.

Keywords: *fulfillment; basic rights; physical disabled*

Abstrak

Banyaknya disabel dari keluarga miskin yang tidak terpenuhi hak dasarnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, memperlihatkan kurang mampunya keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan perhatian terhadap disabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan dasar disabel oleh keluarga. Jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis data menggunakan deskriptif berdasarkan data yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya dukungan sosial dari keluarga terutama orangtua terhadap kebutuhan dasar disabel seperti gizi, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Rekomendasi diperlukan agar diadakan pemberdayaan bagi orangtua disabel untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guna perawatan dan pengasuhan anak disabel, juga agar bisa mengakses program-program pelayanan sosial yang ada.

Kata Kunci: *pemenuhan hak dasar; disabel fisik*

A. Pendahuluan

Kurangnya kemampuan orangtua disabel dalam memenuhi kebutuhan dasar disebabkan kemiskinan. Kemiskinan juga membawa keluarga disabel tidak dapat mengakses informasi berbagai pelayanan bagi disabel, sehingga mereka terpinggirkan, terisolasi dari pelayanan sosial. Kajian Kementrian Sosial tahun 2008 menunjukkan sebagian besar disabel berada dalam keluarga miskin, yang faktanya menunjukkan mereka sulit mendapatkan hak dasar secara wajar dan memadai. Banyak disabel dari keluarga miskin tidak terpenuhi kebutuhan nutrisi, tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan khusus sesuai

dengan kecacatannya dari keluarga. Orientasi orangtua lebih diprioritaskan pada upaya untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarga, dan tanpa sadar terabaikan keperluan anaknya yang disabel karena sumber dana terbatas. Tingkat pendidikan kedua orangtua yang rendah mengakibatkan ketidak tahuan orangtua mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi perkembangan anaknya yang disabel. Kondisi lain ada orangtua disabel yang secara sosial dan psikologis belum siap menerima anaknya dengandisabel, bahkan ada orang tua yang menolak kehadiran anaknya yang disabel.

Jumlah disabel di Indonesia menurut data dari Pusdatin Kemensos untuk tahun 2010 mencapai 11.580.117 orang, terdiri dari 3.474.035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3.010.830 (penyandang disabel fisik), 2.547.626 (penyandang disabel pendengaran), 1.389.614 (penyandang disabel mental) dan 1.158.012 (penyandang disabel kronis). Mereka memerlukan perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, agar hak-hak disabel bisa terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pikiran Rakyat, 12 Maret 2015).

Disabel adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karakteristik berbeda ini yang memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan (UU No 19 tahun 2011).

Menurut WHO, disabel adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabel adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2009). Dahulu disabel dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabel) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabel. Penyandang disabel adalah orang yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak (BPS RI, Susenas, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabel, disebutkan bahwa penyandang disabel yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (UU No 19 Tahun, 2011).

Pemenuhan hak dasar disabel merupakan kewajiban bagi Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabel atau *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Melalui Undang-undang nomor 19 Tahun 2011, negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan hak-hak dasar disabel, termasuk dalam hal aksesibilitas menerima program-program pelayanan sosial bagi disabel. Berkaitan dengan hal tersebut seluruh kementerian yang berkompeten seperti Kementerian Sosial sebagai koordinator, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan, telah melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak-hak disabel (dr Mujadid, MMR, 2014)

Menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak yang timbul apabila hukum mulai bergerak. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik substansi dari hak tersebut, yakni sesuatu yang dimiliki subjek hukum yang apabila tidak dipenuhi, subyek hukum tersebut dapat menuntutnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran orangtua

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar disabel, karena selama ini hak-hak dasar disabel sering terabaikan, sehingga mereka terisolir dan terabaikan kesejahteraannya.

Disabel fisik merupakan salah satu jenis disabilitas dari empat kelompok, yakni fisik, mental, dan mental. Pertama, disabel fisik ini meliputi beberapa macam, yaitu kelainan tubuh (Tunadaksa), individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. Kedua, kelainan indera penglihatan (Tunanetra), individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan, buta total (*blind*) dan *low vision*. Ketiga, kelainan pendengaran (Tunarungu), individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Oleh karena memiliki hambatan pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Keempat, kelainan bicara (Tunawicara), seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional, disebabkan karena ketunarunguan dan organik, yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara ataupun adanya gangguan organ motorik yang berkaitan dengan bicara (Nur Cholis Raefani, 2013). Penelitian ditujukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar disabel oleh keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

Lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dengan mengambil responden orangtua disabel sejumlah 35 orang dan 10 disabel.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Tetapi demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji, melainkan berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah (Etna Widodo, 2000).

C. Kondisi Pemenuhan Hak Dasar Disabel di Ogan Komering Ilir

1. Kondisi Orangtua Anak Disabel: Keluarga disabel terutama orangtua merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan disabel, terutama berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar disabel, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kepedulian orangtua terhadap program-program pelayanan sosial bagi disabel, dan kondisi pernikahan orangtua disabel, karena kondisi keluarga yang sejahtera tidak akan menelantarkan anaknya, baik yang normal maupun disabel. Hasil penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari 35 responden diketahui bahwa 94,29 persen orangtua disabel semuanya berstatus menikah, dan tinggal bersama dengan anaknya yang disabel, walaupun kondisinya miskin dan tidak berdaya. Keadaan psikologis keluarga khususnya ibu-bapak yang terlibat dalam pengasuhan anak menunjukkan rata-rata dalam keadaan stabil, tidak menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi anaknya yang disabel. Ada orangtua yang secara sosial dan psikologis belum siap menerima anak dengan disabel, bahkan ada orangtua yang menolak kehadiran anaknya yang disabel (Harry Hikmat, 2010; Ho dan Keiley, 2003; Sullivan, Bolyai et al., 2003).

Orangtua sebagian besar 90 persen menerima keadaan disabilitas anaknya, sebagai ujian Tuhan yang harus dijalani, sebagian kecil saja 5 persen yang memberi perhatian dan kasih sayangnya secara berlebihan karena merasa kasihan. Sebagian kecil lagi yakni 5 persen memperlakukan sama dengan anak normal. Pengasuhan terhadap anak pada seluruh keluarga secara dominan dilakukan oleh ibunya dan ada yang dibantu oleh anggota keluarga lain, misalnya oleh bapakknya, tante dan nenek. Dalam pengasuhan terhadap anak, ibu mengasuh berdasarkan naluri dan rasa sayang bercampur rasa kasihan, sehingga ada kelompok ibu yang memberikan perhatian lebih kepada anaknya yang disabel dari pada yang normal, ada yang memberikan perhatian yang sama kepada seluruh anaknya dan ada kelompok yang tidak tahu seharusnya mengasuh, mengajarkan, atau mendidik anaknya yang memiliki disabilitas. Hal ini disebabkan kondisi orangtua dari anak disabel pada umumnya dalam keadaan tidak mampu dalam hal ekonomi dan pengetahuan tentang cara mengasuh disabel yang benar.

2. Kondisi Perekonomian Orangtua Disabel: Menurut UNESCO dari hasil pertemuan *The High-Level Meeting on Disable and Development (HLMDD)* sesi ke-68 di Majelis Umum PBB, yang berlangsung di New York pada bulan September 2013 disebutkan, bahwa lebih dari satu miliar orang hidup dalam beberapa jenis disabel, dan 80 persen dari mereka tinggal di negara-negara berkembang. Disabel merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan. Orang miskin lebih cenderung menjadi penyandang disabel dan mereka adalah salah satu kelompok yang paling miskin dan rentan dari populasi global. Dari hasil penelitian terhadap 35 orang responden yang merupakan orangtua disabel, diketahui bahwa kondisi penghasilan orang tua seperti tersaji dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1
Penghasilan Orangtua Disabel

No	Penghasilan Orangtua	f	persen
1	< Rp.600.000	20	57,1
2	> Rp 600.000	8	22,9
3	Rp 600.000	7	20.0
Jumlah		35	100.0

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari data di atas terlihat jelas, bahwa sebagian besar penghasilan orangtua disabel yang merupakan kepala keluarga, sejumlah 20 orang atau 57,1 persen berada di bawah Rp 600.000,-. Menurut indikator kemiskinan yang dibuat oleh BPS, seseorang dikatakan miskin apabila penghasilannya di bawah garis kemiskinan yaitu Rp 600.000,- dari data tersebut dapat dikategorikan, bahwa sebagian besar keluarga disabel masuk keluarga miskin, karena penghasilannya kurang dari Rp 600.000,-. Sejumlah 8 orang atau 22,9 persen, penghasilannya di atas Rp 600.000,- dan yang Rp 600.000,- 7 orang atau 20 persen.

Kemiskinan yang dialami oleh keluarga juga berkontribusi terjadinya disabel. Keluarga yang miskin terkadang menunda untuk mendapatkan pertolongan ketika salah seorang anggotanya mengalami masalah kesehatan, dan terlambat membutuhkan bantuan medis guna pemulihan kondisinya. Keterlambatan mendapatkan pertolongan medis itulah yang mengakibatkan seseorang mengalami cacat permanen.

Penundaan untuk memperoleh pengobatan juga dipengaruhi oleh jarak yang relatif jauh dengan fasilitas kesehatan terdekat, yang dikombinasikan juga dengan terbatasnya kemampuan finansial untuk membayar biaya transportasi. Kemiskinan turut pula berperan terhadap terbatasnya akses terhadap sumber informasi. Keluarga miskin cenderung hidup dalam kondisi lingkungan dengan tingkat higienitas rendah, yang dicirikan dengan minimnya fasilitas pembuangan limbah manusia dan fasilitas air bersih. Hal itu pun masih diperparah dengan rendahnya kualitas makanan bergizi keluarga miskin.

Dalam situasi lingkungan sosial seperti di atas, keluargamiskin sangat rentan terpapar virus dan bakteri yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecacatan akibat buruknya imunitas tubuh. Pada ibu hamil, gangguan kekurangan gizi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin yang berpotensi menyebabkan bayi rentan mengalami infeksi. Situasi lingkungan yang tidak higienis tersebut bukannya tidak disadari oleh keluarga-keluarga miskin, tetapi keluarga miskin memiliki kesempatan terbatas untuk memodifikasi lingkungannya atau dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidupnya itu sendiri (Eide dan Ingstad 2011).

3. Pendidikan Orangtua Disabel: Pendidikan dan pekerjaan adalah dua faktor yang memiliki korelasi sangat dekat terhadap kemungkinan orangtua untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar disabel agar terpenuhi taraf kesejahteraan sosialnya. Dari hasil penelitian diketahui berikut ini.

Tabel 2
Pendidikan Orangtua Disabel

No	Pendidikan Orangtua	f	persen
1	SD	22	62,9
2	SMP	9	25,7
3	SMA	2	5,7
4	Tidak Sekolah	2	5,7
Jumlah		35	100,0

Sumber: Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas terlihat sebagian besar pendidikan orangtua responden hanya berpendidikan SD dengan jumlah 22 orang atau 62,9 persen, dengan bekal pendidikan SD tentu menyulitkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena harus bersaing dengan mereka yang lebih potensial untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Minimnya pendidikan yang dimiliki orangtua disabel menyebabkan dirinya hanya bisa terserap pada jenis pekerjaan kasar, seperti buruh dengan upah yang sangat rendah, atau bahkan tidak terserap sama sekali, sehingga

sangat sulit bagi orangtua disabel untuk dapat memenuhi hak dasar disabel seperti makanan yang bergizi, kesehatan dan pendidikannya.

Dukungan orangtua sangat penting dalam mewujudkan hak-hak disabel. Minimnya pendidikan orangtua disabel, menyebabkan minimnya pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki sehingga menyebabkan kurangnya dukungan orangtua terhadap disabel. Sesungguhnya anak disabel bisa berkembang secara penuh dan terpenuhinya hak-hak dasarnya, apabila didukung oleh orangtua secara penuh. Kebanyakan disabel yang tidak terpenuhi hak-haknya, dikarenakan kondisi orangtua yang miskin dan kurang pengetahuan, informasi tentang pelayanan dan pemenuhan hak disabel.

Tingkat pendidikan ibu bapak yang rendah, mengakibatkan ketidaktahuan ibu bapak tentang bagaimana mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi perkembangan anaknya yang disabel. Kondisi lain ada ibu bapak secara sosial dan psikologis belum siap menerima anak dengan disabel, bahkan ada ibu bapak menolak kehadiran anaknya disabel (Harry Hikmat, 2010; Ho dan Keiley, 2003; Sullivan, Bolyai et al., 2003). Stigma masyarakat terhadap anak disabel terkadang masih kuat pada kumpulan masyarakat, karena rendahnya pengetahuan dan faktor sosial budaya (Janene Byrne, 2002). Anak diisolasi didiskriminasi dalam pengasuhan dan tidak tersentuh oleh pelayanan sosial dasar, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pemukiman yang layak serta tidak memiliki alat bantu kecacatan. Kondisi di atas menunjukkan dukungan sosial yang rendah diberikan oleh orang tua dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak. Rothman (2003) mengemukakan, bahwa ibu bapak yang memiliki ADD sering dihadapkan dengan banyak keperluan, banyak masalah, karena kondisi disabel anaknya. Demikian pula dengan anggota keluarga yang lain seperti adik, kakak ataupun kerabat tidak dapat menerima anggota keluarganya yang disabel, menampilkan sikap penolakan baik secara halus maupun terang terangan.

4. Pengeluaran Orangtua Disabel: Biaya hidup orangtua yang memiliki anak disabel seharusnya lebih besar jika dibanding dengan yang tidak memiliki anak disabel, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan dan pengasuhan, dan mereka juga tidak mempunyai kesempatan untuk mencari biaya tambahan. Melalui tabel 3 berikut dapat diketahui tingkat pengeluaran orangtua disabel.

Tabel 3
Pengeluaran Orangtua Disabel

No	Pengeluaran Orangtua Disabel	f	%
1	< Rp 600.000,-	19	54,3
2	> Rp 600.000,-	6	17,1
3	Rp 600.000,-	10	28,6
	Jumlah	35	100,0

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas jelas terlihat pengeluaran orangtua disabel sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan, yakni Rp. 600.000,-, sehingga dapat diketahui bahwa orangtua tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar disabel, mereka sebagai orangtua lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, kadang-kadang masih kurang. Menurut Unicef kebanyakan disabel kurang terpenuhi hak dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan kesehatan, karena fungsi kognitifnya terhambat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Unicef, diketahui bahwa sebagian besar penyebab disabel adalah anemia. Kemiskinan menyebabkan disabel mendapat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan.

5. Karakteristik Disabel: Karakter disabel (orang dengan kebutuhan khusus) berbeda dengan orang pada umumnya. Karakteristik yang berbeda menyebabkan disabel membutuhkan pelayanan khusus, agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Hasil penelitian

terhadap sepuluh orang disabel di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diketahui beberapa karakternya.

Tabel 4
Alat Bantu Disabel

No	Pekerjaan Disabel	f	persen
1	Tongkat ketiak 4	11	31,43
2	Kursi Roda	8	22,86
3	Kaki palsu 1	10	28,57
4	Tanpa alat bantu	8	17,14
	Jumlah	35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari data tersebut diketahui karakteristik disabel fisik adalah adanya alat bantu yang digunakan untuk berjalan, yakni kaki palsu, tongkat ketiak, kursi roda. Tanpa alat bantu tersebut sangat sulit bagi mereka untuk dapat berjalan dan beraktivitas. Alat bantu merupakan aksesibilitas bagi penyandang disabel agar terpenuhi hak-hak pokok untuk bergerak agar bisa berjalan seperti manusia pada umumnya. Karakteristik lainnya adalah aksesibilitas pada bangunan rumahnya. Bentuk bangunan rumah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya adalah rumah panggung, sehingga menyulitkan bagi disabel jika setiap kali harus naik turun tangga, sehingga mereka menempati bangunan yang di bawah, atau rumah mereka tidak berbentuk panggung, untuk memudahkan keluar masuk rumah.

6. Tingkat Pendidikan: Data susenas 2012 yang menunjukkan bahwa sebanyak 6.640.000 penyandang disabel di seluruh Indonesia, hanya kurang dari 5 persen yang menyelesaikan pendidikan dasar. Padahal dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 disebutkan akan hak-hak, kewajiban dan kesempatan disabel yang sama dengan manusia normal lainnya. Melalui tabel berikut ini akan dapat diketahui tentang tingkat pendidikan disabel di Kabupaten Ogan Komering Ilir berikut.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Disabel

No	Pendidikan	f	Persen
1	SD	18	51,43
2	SMA	8	22,86
3	Tidak sekolah	9	25,71
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendidikan formal disabel sebagian besar 18 orang atau 51,43 persen hanya berpendidikan SD, dikarenakan orang tua mereka tidak sanggup untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi. Disabel yang tidak sekolah 25,71 persen atau 9 orang, yang berpendidikan SMA hanya 8 orang atau 22,86 persen. Hal ini sesuai dengan data Susenas 2012 yang menunjukkan, bahwa sebanyak 6.640.000 penyandang disabel di seluruh Indonesia, kurang dari 5 persen yang menyelesaikan pendidikan dasar. Melihat dari tingkat pendidikan disabel yang sebagian besar hanya berpendidikan SD, tampaknya keluarga atau orangtua kurang pengetahuan tentang adanya hak-hak disabel yang harus dipenuhi, termasuk pendidikannya.

7. Umur Disabel: Data dari WHO, Bank Dunia dan ILO, hampir sebanyak 785 juta perempuan dan laki-laki dengan disabel berada pada usia kerja, tetapi mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang non-disabel di perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali. Para penyandang disabel kerap kali terkucil dari pendidikan, pelatihan kejuruan dan peluang kerja. Melalui tabel berikut dapat diketahui umur disabel.

Tabel 6
Umur Disabel

No	Umur Disabel	f	persen
1	25 -30 tahun	20	57,14
2	31-35 tahun	8	22,86
3	36-40 tahun	7	20,00
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Melihat dari tabel 6 tersebut diketahui bahwa seluruh usia disabel berada pada usia kerja, tetapi sebagian dari mereka tidak bekerja, karena kemungkinan mereka tidak mempunyai keterampilan yang membuat mampu memperebutkan lapangan kerja dengan orang yang tidak disabel, sehingga mereka sering dikucilkan dari lapangan kerja, pendidikan dan juga pelatihan keterampilan. Mereka dipinggirkan dari lapangan kerja karena tidak mempunyai keterampilan khusus. Lapangan kerja memang belum terbiasa dengan disabel, sehingga dengan berbagai alasan mereka menganggap disabel tidak bisa produktif. Mengutip data dari WHO, Bank Dunia dan ILO tersebut, sudah tentu memunculkan konsekuensi logis untuk memberi perhatian khusus pada banyaknya disabel usia kerja dan produktif yang terkucilkan.

8. Pekerjaan Disabel: Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan, seperti yang dinyatakan di dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan. Melalui tabel 7 berikut dapat diketahui secara lebih jelas pekerjaan disabel.

Tabel 7
Pekerjaan Disabel

No	Pekerjaan Disabel	f	Persen
1	Tata boga	18	51,43
2	Pemijat	10	28,57
3	Warung	7	20,00
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar disabel sejumlah 18 orang atau 51,43 persen pekerjaannya sebagai tata boga, yakni semacam *catering*, menerima pesanan masakan apabila ada yang membutuhkan, tetapi apabila sedang tidak ada pesanan mereka hanya

menjual lauk pauk dan kue. Keterampilan tata boga pelatihannya diperoleh dari Panti Sosial Bina Daksa Palembang.

Tampaknya, bekerja di perusahaan atau perkantoran bagi mereka masih sulit, karena mereka sudah pernah mencobanya dan hampir semua perusahaan tidak mau menerimanya karena kecacatannya, dengan alasan pekerjaan tersebut membahayakan bagi fisik yang cacat. Terlihat, bahwa pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan beberapa aturan batang tubuh telah secara tegas menjamin pemenuhan hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali disabel.

Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan juga telah menyebutkan tanpa membedakan disabel, dipertegas pula dengan adanya UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan wajib merekrut tenaga kerja penyandang disabel sebanyak satu persen dari jumlah tenaga kerja keseluruhan perusahaan tersebut. Nampaknya belum dilaksanakan oleh beberapa perusahaan dalam kaitannya dengan penerimaan pekerjaan bagi disabel, terlihat masih adanya diskriminasi dalam penerimaan pekerjaan bagi disabel, dan kurangnya dukungan keluarga terhadap akses pekerjaan, karena pada umumnya disabel hanya berpendidikan SD dikarenakan orangtua tidak mampu membiayai pendidikan. Pekerjaan sangat berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan yang rendah hanya memungkinkan disabel bekerja sebagai buruh dengan upah yang rendah, atau bahkan pekerjaan tersebut membahayakan fisiknya disabel.

Keluarga juga mengetahui akan hak-hak disabel, tetapi tidak pernah mengakses pekerjaan ke perusahaan atau ke kantor-kantor, karena mereka pun mengetahui kondisi anaknya yang disabel, dan mereka juga tidak tahu harus mengakses ke mana. Solusi yang dilakukan oleh keluarga mereka, agar anaknya yang disabel membantu orang tuanya dalam mengerjakan *home industri* seperti jual makanan, atau warung.

8. Keterampilan Disabel: Memiliki keterampilan bagi disabel akan membuat dirinya bisa berusaha sesuai keterampilan yang dimilikinya, karena disabel tidak boleh menyerah ataupun pasrah dengan keadaannya, ia harus yakin bahwa di setiap kekurangan Tuhan pasti memberikan kelebihan kepada kita. Melalui tabel 8 berikut ini akan dapat diketahui secara lebih jelas.

Tabel 8
Keterampilan Disabel

No	Pekerjaan Disabel	f	persen
1	Tata boga	18	51,43
2	Jahit	1	2,86
3	Pijat	10	28,57
4	Kesenian	1	10,00
5	PS	1	10,00
6	Tidak punya keterampilan	4	11,44
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas dapat diketahui keterampilan yang dimiliki disabel, terbanyak ada 18 orang atau 51,43 persen adalah keterampilan berupa tata boga. Mereka peroleh karena mendapatkan pelatihan dari Panti Sosial Bina Daksa yang berada di Palembang selama 5 hari, pelatihan tersebut menurut disabel sangat bermanfaat, karena bisa membuat disabel mandiri dan produktif, sehingga bisa untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, tidak tergantung pada orang lain. Ada sejumlah 11,44 persen atau 4 orang responden yang tidak punya keterampilan, berarti memang secara umum masih banyak disabel yang belum punya keterampilan khusus, karena mereka tidak tahu kemana harus memperoleh keterampilan, dan kemana dia harus belajar, seperti di panti, mereka tidak mengetahui.

9. Pelayanan Kesehatan: Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabel juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, hal itu jelas tercantum pada Pembukaan

Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat, tetapi kenyataannya di kehidupannya sehari-hari, disabel masih sulit untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka, termasuk layanan kesehatan. Ada beberapa kemungkinan karena keadaan fisiknya sulit untuk mobilisasi dengan jarak tempat berobat yang jauh. Melalui tabel 8 berikut ini akan dapat diketahui secara lebih jelas bagaimana keluarga mengakses layanan kesehatan bagi disabel.

Tabel 9
Layanan Kesehatan Disabel

No	Layanan Kesehatan	f	persen
1	Ke Puskesmas	25	74,1
2	Jemput bidan terdekat	5	14,3
3	Ke Dokter	4	11,4
4	Beli obat	1	2,9
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas dapat diketahui sebagian besar responden yang merupakan orangtua disabel 25 orang atau 74,1 persen mengakses layanan kesehatan ke Puskesmas, 5 orang atau 14,3 persen mengakses layanan kesehatan dengan menjemput bidan terdekat dari rumah mereka, karena lebih memudahkan daripada harus menggendong ke Puskesmas, transportasinya pun sulit. Ada 4 orang responden atau 11,4 persen yang mengatakan bahwa mereka membawanya ke dokter jika anak mereka sakit, sedangkan seorang atau 2,9 persen mengatakan, dengan membeli obat di warung saja bila anaknya sakit.

Wawancara dilakukan pula terhadap 17 orang disabel. Menurut mereka sejumlah 48,57 persen mengatakan bahwa orangtua cukup menjaga kesehatan mereka dengan menyediakan gizi yang mencukupi, olahraga, serta memeriksakannya ke Puskesmas apabila sakit. Sebagian lagi sejumlah 18 orang atau 51,43 persen lagi mengatakan bahwa keluarga kurang memperhatikan gizi, karena makan seadanya, kurang olahraga, dan jarang membawanya ke Puskesmas apabila sakit, karena ketidak mampuan keluarga. Fak-

tor pendukung mereka untuk mudah berobat ke Puskesmas cukup hanya dengan menggunakan KTP, Jamkesda. Faktor penghambat adalah jauhnya jarak Puskesmas yang harus ditempuh sehingga harus sewa kendaraan ojek. Pernyataan tersebut dikonfirmasi kepada pelaksana program, menurut mereka sejumlah 10 orang atau 100 persen mengatakan bahwa layanan kesehatan bagi disabel ke rumah oleh Puskesmas belum ada, yang paling penting adalah keluarga yang harus mendampingi dan membawa ke Puskesmas.

Aksesibilitas bagi disabel di Puskesmas tampaknya belum ada, kalau di rumah sakit sudah ada. Faktor pendukung adalah adanya keluarga yang mau mengantar anaknya berobat agar sembuh. Faktor penghambat adalah sulitnya membawa disabel berat ke Puskesmas karena harus digendong, dan sulitnya transportasi, kadang harus sewa ojek. Indikator keberhasilan layanan kesehatan bagi disabel adalah kondisi disabel berat yang sehat. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi kepada masyarakat, mereka semua 35 orang atau 100 persen mengatakan, bahwa yang mereka ketahui untuk layanan kesehatan bagi disabel adalah Puskesmas, dan mereka pun juga mengetahui bahwa disabel dibawa ke Puskesmas jika sakit, bagi mereka cukup memadai mengingat layanan rumah sakit membutuhkan biaya lebih besar, ditambah untuk sewa kendaraan.

10. Akses terhadap Program Layanan Kesehatan: Seiring dengan dimulainya Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggung jawab untuk membayar iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu, yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Melalui tabel berikut akan dapat diketahui akses layanan kesehatan yang digunakan disabel.

Tabel 10
Kartu Kesehatan Orangtua Disabel

No	Kartu Kesehatan	f	persen
1	KTP	25	74,1
2	Askeskin	8	14,3
3	BPJS	1	11,4
4	Jamkesmas 1	1	2,9
Jumlah		35	100,00

Sumber: Jawaban Responden 2016 (N=35)

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar keluarga disabel 25 orang atau 74,1 persen mengakses layanan kesehatan ke Puskesmas dengan menggunakan KTP, menurut mereka hal ini dirasa lebih mudah bagi warga miskin, karena tidak harus membayar iuran BPJS setiap bulan. Sebagian lagi 8 orang atau 22,9 persen responden mengatakan, bahwa mereka menggunakan Askeskin, dan yang sebagian lagi 2,9 persen menggunakan BPJS, dan 2,9 persen lagi menggunakan Jamkesmas.

Faktor pendukung dalam mengakses layanan kesehatan menurut mereka adalah karena adanya dukungan dari pemerintah seperti Puskesmas, Askesos dan jamkesmas, serta yang terpenting adanya dukungan keluarga yang sangat menginginkan anaknya sembuh, sehingga faktor penghambat seperti sulitnya transportasi, beratnya menggondong, serta jarak ke Puskesmas yang cukup jauh, tidak terlalu dipikirkan. Hal tersebut juga dikonfirmasi pula oleh disabel ringan, hasil wawancara diketahui bahwa 50 persen mempunyai kartu Jamkesda, sedangkan yang 50 persen lagi tidak mempunyai. Faktor pendukung menurut mereka adalah adanya dukungan pemerintah dengan menyediakan kartu kesehatan, sedangkan faktor penghambat adalah jarak dan transportasi yang harus ditempuh.

Menurut pelaksana program, faktor penghambat mengakses layanan kesehatan bagi disabel sejumlah 17 orang atau 48,57 persen mengatakan kurangnya tenaga medis yang khusus melayani disabel, dan yang sebagian lagi sejumlah 14 orang atau 40 persen mengatakan sulitnya mengambil rujukan di tiap-tiap kabu-

paten yang jaraknya cukup jauh, dan yang 4 orang lagi atau 11,43 persen mengatakan sulitnya membawa disabel ke Puskesmas dengan jarak yang cukup banyak. Faktor pendukung menurut pelaksana program adanya dukungan pemerintah pada layanan kesehatan, untuk dukungan dari pemerintah adalah dengan KTP bisa digunakan oleh keluarga miskin untuk berobat di Puskesmas sangat membantu dan merupakan faktor pendukung, dan sebagian lagi 14 sejumlah 40 persen mengatakan Askeskin merupakan faktor pendukung bagi keluarga disabel yang miskin untuk berobat. Hanya saja keluarga terkadang kesulitan membawa anaknya ke lokasi layanan kesehatan, karena harus menyewa kendaraan, disebabkan kondisi fisik disabel yang cukup berat.

D. Penutup

Dari hasil penelitian terlihat dukungan fisik dan sosial orangtua untuk pemenuhan hak-hak dasar disabel tampaknya masih sangat kurang, karena kalau dilihat dari kondisi orangtua disabel yang miskin, berakibat pada tidak terpenuhinya hak dasar disabel seperti gizi, perawatan dan pengasuhan khusus bagi disabel. Orientasi orangtua lebih diprioritaskan pada upaya untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarga, dan mengabaikan keperluan anaknya yang disabel karena sumber dana yang terbatas. Tingkat pendidikan orangtua yang rendah, mengakibatkan ketidaktahuan orangtua tentang cara mengasuh atau memberi stimulus yang tepat bagi perkembangan anaknya yang disabel dan kurang informasi tentang layanan pemerintah seperti panti-panti.

Dari tingkat pendidikan, sebagian besar orangtua disabel hanya berpendidikan SD, dengan bekal pendidikan SD, orangtua tersebut hanya bisa bekerja sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah, bisa diketahui dari penghasilan orangtua disabel yang sangat rendah. Penghasilan orangtua yang rendah tentu kurang bisa memenuhi hak-hak disabel seperti pendidikan. Rendahnya akses pendidikan bagi disabel, di samping rendahnya kondisi ekonomi orangtua disabel, juga rendahnya jumlah sekolah bagi disabel, apabila di sekolah umum, sekolah terse-

but tidak mau menerima murid disabel, akibatnya anak disabel tidak mempunyai kepandaian dan keterampilan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik nilai upahnya.

Pada layanan kesehatan bagi disabel, tampaknya sebagian besar orangtua disabel membawanya ke Puskesmas hanya dengan menggunakan KTP, terlihat mereka tidak menggunakan BPJS dan PBI. Menurut mereka terlalu rumit untuk menggunakan BPJS, sehingga mereka lebih senang hanya dengan menggunakan KTP, karena tidak harus membayar tiap bulan. Pada akses ke pekerjaan orangtua disabel juga kurang mendukung, dikarenakan orangtua mengetahui kondisi anaknya yang disabel serta pendidikannya yang sangat rendah bahkan tidak sekolah, sehingga orangtua tidak pernah mendukungnya untuk bekerja di luar rumah karena tidak punya keterampilan. Solusi yang mereka lakukan adalah bekerja di rumah dengan membuka warung, masak, dan memijat yang bisa untuk membantu perekonomian keluarga. [Keterampilan memasak dan memijat mereka peroleh dari pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial setempat.

Rekomendasi: kepada Kementerian Sosial terutama Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat, perlu pemberdayaan bagi keluarga atau orangtua disabel agar memiliki pengetahuan dan kemampuan perawatan dan mengasuh anak disabel, agar mempunyai kemampuan ekonomi, mental spiritual yang kuat, karena orangtua yang mempunyai anak disabel dan dalam kondisi miskin, akan mengalami beban sosial psikologis yang cukup berat, apabila tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya yang disabel. Pemerintah daerah perlu sosialisasi akan adanya sekolah gratis bagi tunadaksa dari keluarga tidak mampu, di panti tunadaksa. Banyak disabel dari keluarga miskin di pelosok desa yang perlu pendataan oleh pemerintah daerah setempat untuk membantu mempermudah pelayanan dalam rangka memenuhi hak dasar disabel.

Pustaka Acuan

- Adi, Isbandi. (2008). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Beberapa Pokok Bahasan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adi, Isbandi. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Antara News. (7 Oktober 2013). *Penyandang Cacat di Indonesia mencapai 2,8 Juta*, Jakarta.
- Eide H. Arne dan Ingstad, Benedicte. (2011). *Disable and Poverty : A Global Challenge*. Bristol: The Policy Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erna Widodo. (2000). *Konstruksi Kearifan Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Avyrouz.
- Harry Hikmat. (2010). Jumlah anak cacat di Indonesia. Antara News. <http://antajawabarat.com>
- Ho, K.M., dan Keiley, M.K. (2003). Dealing with denial : A systems approach for family professionals working with parents of individuals with multiple disabilities. The family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 11 (3), 239-247.
- Irwanto, dkk. (2010). *Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Miskin : Sebagai Bagian dari Kajian BAPPENAS terhadap Program Perlindungan Sosial bagi Anak, Penyandang Cacat dan Lansia di Kementerian Sosial RI*. Jakarta: Pusat Kajian Disabel, FISIP-UI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Group.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Sosial RI. (2007). *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Disabel*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mujadid, dr, MMR. (2014). *Kesehatan anak dengan disabel*. Jakarta: Buletin data dan informasi kesehatan.
- Nur Kholis Reefani. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2012.
- Sanapiah Faisal. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sullivan-Bolyai, S., Sadler, L., Knafl, K.A., et al. (2003). *Great expectations : a position description for parents as caregivers* : Part 1. Pediatric Nursing, 29 (6), 457-461.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 *Tentang Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Wirawan, IB. (2013). *Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*. Surabaya: Jurusan Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga.

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 15 Nomor 2 Juni 2016, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., B.SW., Ph. D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Drs. Doddy Sumbogo Singgih, M.Si. (Sosial Kemasyarakatan, Unair)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS